



# PCDSC Annual Review

# EDISI 1 2022

- **Dinamika Keamanan Laut Hitam ditengah Tensi Rusia, NATO, dan AS era Presiden Joe Biden**  
Alya Fathia Fitri, Cattleya Liutantri
- **Never Ending Afghanistan; Melihat Kesiapan Taliban Dalam Menghadapi Ancaman ISIS-K Setelah Berhasil Menguasai Afghanistan**  
Charisya, Puput Heravina, Wandy Ardiyansyah Hasibuan
- **Self-Destructive Conflict: Hubungan Aljazair-Maroko Dalam Kontestasi Pengaruh di Wilayah Magreb**  
Amy Jesscia Pakpahan, Diya Meiliza Putri
- **Konflik Sahara Barat: Intervensi Amerika Serikat Dalam Maroko dan Polisario Front**  
Rahmat Ilahi, Siti Zaimatun Nabila
- **Eksistensi Etnis Jawa asal Indonesia di Suriname-Amerika Selatan**  
Fifi Melyna Halim
- **Dampak Collapse-nya Evergrande Terhadap Perekonomian Global**  
Elsa Mulyani, Salsabila
- **Dampak Climate Change bagi Gajah dan Manusia: Perburuan Gading Mamut Sebagai Subtitusi Gading Gajah**  
Abimanyu Rizky Ilahi, Ayuda Lestika Putri, Elga Velisya



# **PCD STUDIES CENTER ANNUAL REVIEW**

## **Edisi I (2022)**

Ditulis oleh anggota PCD Studies Center

Alya Fathia Fitri, Cattleya Liutantri

Charisya, Puput Heravina, Wandy Ardiyansyah Hasibuan

Amy Jesscia P, Diya Meiliza Putri

Rahmat Ilahi, Siti Zaimatun Nabila

Fifi Melyna Halim

Elsa Mulyani, Salsabila

Abimanyu Rizki Ilahi, Ayuda Lestika Putri, Elga Velisya

Editor:

Wandy Ardiyansyah Hasibuan

PCD Studies Center

2022

# **PCD STUDIES CENTER ANNUAL REVIEW**

*A Series of Papers of PCD Studies Center Members*

Diterbitkan Oleh PCD Studies Center

PCD Studies Center Annual Review adalah kumpulan *paper* yang ditulis oleh anggota PCD Studies Center sebagai sarana menuangkan ide dan kemampuan penulisan selama satu tahun menjadi bagian dari organisasi

Pekanbaru, Riau, Indonesia

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-nya, sehingga *PCD Studies Center Annual Review* ini dapat terselesaikan. Terbitnya *Annual Review* ini bertujuan untuk memberikan ide dan gagasan mengenai suatu isu hubungan internasional yang diharapkan dapat membantu pembaca dalam mendapatkan pengetahuan baru maupun sebagai bahan inspirasi dalam melakukan suatu kegiatan akademis lainnya. Menyadari bahwa isu-isu internasional tidak pernah selesai di belahan bumi manapun, maka dalam paper ini para penulis telah menjelaskan beberapa isu yang masih menarik untuk dibahas dan dipelajari bagi para pembaca. Pada edisi yang pertama ini, kami berharap bahwa terbitnya *Annual Review* ini dapat memberikan dampak positif kepada semua pihak, khususnya mahasiswa hubungan internasional, sehingga pada edisi-edisi selanjutnya *Annual Review* ini akan semakin baik kualitasnya.

Semoga tulisan ini mampu memberikan manfaat kepada kita semua.

Pekanbaru, Februari 2022

Direktur PCD Studies Center

## DAFTAR ISI

Dinamika Keamanan Laut Hitam ditengah Tensi Rusia, NATO, dan AS era Presiden Joe Biden .....	1
<i>Never Ending</i> Afghanistan; Melihat Kesiapan Taliban Dalam Menghadapi Ancaman ISIS-K Setelah Berhasil Menguasai Afghanistan .....	14
Self-Destructive Conflict: Hubungan Aljazair-Maroko Dalam Kontestasi Pengaruh di Wilayah Magreb .....	25
Konflik Sahara Barat: Intervensi Amerika Serikat Dalam Maroko dan Polisario Front .....	38
Eksistensi Etnis Jawa asal Indonesia di Suriname-Amerika Selatan .....	51
Dampak <i>Collapse</i> -nya <i>Evergrande</i> Terhadap Perkenomian Global .....	61
Dampak Climate Change bagi Gajah dan Manusia: Perburuan Gading Mamut Sebagai Subtitusi Gading Gajah.....	74

# **Dinamika Keamanan Laut Hitam**

## **ditengah Tensi Rusia, NATO, dan AS era Presiden Joe Biden**

Alya Fathia Fitri, Cattleya Liutantri

### ***Abstract***

*This paper aims to analyze the security dynamic between the U.S, NATO, and Russia in the Black Sea region after the annexation of Crimea 2014 through the realms of neoliberalism, or commonly known as liberalism institutional. The main question within this paper is how the U.S and NATO considering the role of their alliance to deter Russian escalating presence in the Black Sea region. By considering collective security means through NATO and its allies, the aggressiveness of Russian presence in the region can possibly be deterred with comprehensive strategies. Those comprehensive strategies are considered within this paper by explaining: First, the security dynamic of the Black Sea region after the annexation of Crimea in 2014. Second, NATO and the U.S under Joe Biden's presidency interest in the Black Sea region. Third, strategies that the U.S and NATO possibly do to deter Russian presence in the Black Sea region, and ended with conclusion.*

**Keywords:** *Russia, United States, NATO, Geopolitics, Black Sea*

### **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dinamika keamanan antara AS, NATO, dan Rusia di kawasan Laut Hitam pasca aneksasi Krimea 2014 melalui ranah neoliberalisme, atau yang biasa dikenal dengan liberalisme institusional. Pertanyaan utama dalam makalah ini adalah bagaimana AS dan NATO mempertimbangkan peran aliansi mereka untuk menghalangi kehadiran Rusia yang meningkat di wilayah Laut Hitam. Dengan mempertimbangkan sarana keamanan kolektif melalui NATO dan sekutunya, agresivitas kehadiran Rusia di kawasan itu mungkin dapat dicegah dengan strategi yang komprehensif. Strategi komprehensif tersebut dipertimbangkan dalam makalah ini dengan menjelaskan: Pertama, dinamika keamanan wilayah Laut Hitam setelah aneksasi Krimea pada tahun 2014. Kedua, NATO dan AS di bawah kepentingan kepresidenan Joe Biden di wilayah Laut Hitam. Ketiga, strategi yang mungkin dilakukan AS dan NATO untuk menghalangi kehadiran Rusia di kawasan Laut Hitam, dan diakhiri dengan kesimpulan.

**Kata Kunci:** Rusia, Amerika Serikat, NATO, Geopolitik, Laut Hitam

### **Pendahuluan**

Tulisan ini akan menganalisis dinamika keamanan di Laut Hitam yang dipengaruhi oleh kembalinya AS, NATO yang berkonfrontasi dengan Rusia di kawasan tersebut. Konflik keamanan di Laut Hitam selama ini didominasi oleh presensi militer Rusia yang terus meningkat pasca aneksasi Krimea 2014. Meningkatnya aktivitas Rusia di Laut Hitam membuat negara-negara sekitarnya seperti Ukraina, dan negara-negara Baltik, yang merupakan aliansi AS dan NATO

merasa terancam. Tidak hanya itu, AS dibawah presidensi Joe Biden juga kembali melirik kawasan Laut Hitam dengan meningkatkan aktivitas militer disana yang tentunya membuat tensi konflik keamanan di Laut Hitam semakin panas. Maka dari itu, penelitian ini hendak berfokus pada bagaimana NATO sebagai organisasi regional berperan dalam menanggapi peningkatan tensi konflik keamanan di Laut Hitam, serta bagaimana AS dan aliansinya dapat menguatkan eksistensi pengaruhnya di kawasan Laut Hitam bersama NATO untuk menghadapi Rusia. Dalam menganalisis permasalahan ini, penulis menggunakan kacamata neoliberalisme atau liberalisme institusional yang berfokus pada peran institusi dalam membentuk dan mengakomodasikan kepentingan aktor negara yang berbeda-beda, serta bagaimana aktor-aktor tersebut bekerjasama dalam menghadapi permasalahan bersama. Agar pembaca dapat lebih mudah memahami tulisan ini, maka penulis membagi penelitian menjadi beberapa pembahasan. Pertama, penulis akan membahas mengenai dinamika keamanan Laut Hitam pasca aneksasi Krimea tahun 2014 dengan menjelaskan konflik antara Rusia, AS dan NATO. Kedua, penulis akan menjelaskan mengenai kembalinya AS, NATO ke Laut Hitam era Joe Biden. Ketiga, penulis akan membahas mengenai strategi yang dapat dilakukan AS dan NATO di Laut Hitam dalam menghadapi Rusia. Lalu, tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan.

## **Dinamika Keamanan Laut Hitam Pasca Aneksasi Krimea 2014**

### **A. Hubungan antara Rusia dan AS, NATO pasca aneksasi Krimea 2014**

Meingkatnya jumlah dan keagresifan pengunjung rasa pro-Rusia di Krimea dan menurunnya pengaruh Ukraina terhadap Krimea dimanfaatkan oleh Rusia untuk menginvasi dan menganeksasi Krimea. Justifikasi yang diberikan oleh Rusia atas aksi mereka adalah bahwa aksi mereka ini merupakan bentuk perlindungan terhadap masyarakat Rusia dan aset militer di Krimea. Pada 21 Maret 2014, setelah diratifikasinya traktat aneksasi oleh Parlemen Rusia, Putin menandatangani sebuah hukum yang secara formal mengintegrasikan Krimea pada Rusia. Aksi aneksasi Krimea ini dikecam oleh negara-negara lain terutama negara Barat dan Eropa. Amerika Serikat dan Uni Eropa memberlakukan pembekuan aset dan larangan perjalanan pada banyak pejabat Rusia dan anggota parlemen Krimea. Kecaman dari negara luar ini muncul tidak hanya karena aksi ini dianggap ilegal, tetapi juga karena terdapat spekulasi bahwa Rusia memiliki motif lain yaitu, untuk mengambil alih dominasi di Laut Hitam. Hal ini bertolak-belakang dengan pernyataan Rusia yang mengatakan bahwa aksi aneksasi ini dilakukan atas dasar persatuan. Berkat

berbagai aksi oposisi dari Amerika Serikat dan Eropa, hubungan antara Rusia dan kedua negara ini semakin memburuk setelah isu aneksasi Krimea ini berakhir.

Hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat memang tidak selalu baik dikarenakan perbedaan ideologi negara yang inheren, namun, aksi Rusia pada tahun 2014 memperburuk hubungan di antara kedua negara ini. Kejadian ini menjadi katalis yang memicu terjadinya berbagai bentuk perpecahan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari aksi Rusia yang selalu berada pada posisi oposisi seperti saat Rusia mengintervensi perang saudara Suriah untuk menopang Presiden Suriah Bashar al-Assad yang diperangi, mencegah terulang kembali kejadian di Libya. Kemudian pada tahun 2016, Rusia berupaya untuk menggecoh pemilihan presiden Amerika Serikat, yang kemudian meningkatkan jumlah sanksi yang diberikan dan memperburuk hubungan.

Selain Amerika Serikat, Rusia juga memiliki hubungan yang buruk dengan *North Atlantic Treaty Organization* atau NATO. Mula-mula saat Uni Soviet baru saja bubar, NATO berusaha untuk membangun kerja sama dengan Rusia namun, hubungan kerja sama ini kemudian ditangguhkan sebagai respon terhadap intervensi militer dan aksi agresif Rusia di Ukraina serta aneksasinya yang ilegal terhadap Krimea. Ukraina sendiri memiliki hubungan kerja sama yang erat, sehingga aksi Rusia terhadap Ukraina mendatangkan respon negatif dari NATO. NATO menyatakan bahwa organisasi ini tidak akan mengakui aneksasi ilegal Rusia terhadap Krimea. Setelah aneksasi Krimea ini, aksi Rusia yang semakin agresif, termasuk aktivitas militer provokatif di sekitar perbatasan NATO yang membentang dari Baltik ke Laut Hitam, retorika nuklir yang tidak bertanggung jawab dan agresif, upaya campur tangan dalam proses pemilu, kampanye disinformasi yang meluas dan aktivitas siber yang berbahaya. Sehingga, walaupun forum untuk berdialog masih terbuka bagi Rusia dan NATO, hubungan antara keduanya masih buruk.

## **B. Kepentingan Rusia di Laut Hitam**

Laut Hitam terletak di wilayah strategis yaitu jalur persimpangan dari peradaban ekonomi di Eropa. Selain itu, Laut Hitam juga kaya akan sumber daya berupa minyak dan gas dimana terdapat pipa energi utama serta jalur perdagangan. Pendekatan Rusia terhadap Laut Hitam memiliki sejarah panjang yang melibatkan konfrontasi dengan kekuatan besar Eropa dan persaingan geopolitik dengan Turki. Kepentingan Rusia di Laut Hitam juga berhubungan dengan upayanya untuk menangkal ancaman dari NATO, baik terhadap Rusia atau benteng strategisnya di Krimea. Beberapa juga berpendapat bahwa Rusia sedang berusaha untuk merusak kohesi



NATO dengan cara membentuk celah antara anggota aliansi di sepanjang Laut Hitam, dan juga untuk mencegah Ukraina dan Georgia bergabung dengan aliansi.

Bagi Moskow, Laut Hitam merupakan wilayah yang penting bagi strategi geoekonominya yaitu untuk memproyeksikan kekuatan dan pengaruh Rusia di mediteranian, melindungi jalur ekonomi dan perdagangan Rusia dengan pasar utama Eropa, dan membuat Eropa Selatan lebih bergantung pada Rusia dalam kebutuhan minyak dan gasnya. Untuk melaksanakan seluruh kepentingan ini, Rusia memerlukan Laut Hitam terutama dalam ekspor komoditas utama Rusia (hidrokarbon). Laut Hitam memberi akses pada mediteranian dan wilayah lainnya. Pelabuhan Rusia yang terletak di Laut Hitam juga merupakan satu-satunya pelabuhan air hangat yang dimiliki Rusia. Hal ini membuat wilayah ini sebagai wilayah yang penting bagi keberlangsungan perekonomian Rusia. Salah satu bentuk aktivitas ekonomi di Laut Hitam yaitu menjelang Perang Dunia Pertama, 50% dari keseluruhan ekspor Rusia, dan 90% dari ekspor agrikulturnya, diangkut melalui Bosphorus dari Laut Hitam.<sup>1</sup> Sekarang, setiap lima belas menit, sebuah kapal tanker minyak melakukan perjalanan serupa, membawa minyak Rusia atau Kazakh.<sup>2</sup> Dalam bidang militer, Laut Hitam berfungsi sebagai batu loncatan untuk memproyeksikan kekuatan militer di tempat-tempat seperti Georgia, Ukraina dan bahkan Suriah yang letaknya jauh. Kepemilikan kontrol atas Laut Hitam juga berarti kontrol total atas Laut Azov, yaitu sebuah perairan kecil yang dikelilingi oleh Rusia dan Ukraina dan terhubung ke Laut Hitam melalui Selat Kerch.

Dari sini dapat dilihat bahwa Laut Hitam merupakan salah satu bagian penting bagi Rusia dalam mencapai tujuan negaranya. Aksi-aksi agresif yang dilakukan Rusia, bahkan hingga melakukan aneksasi ilegal, dilakukan untuk mengambil kontrol atas Laut Hitam yang signifikan dalam implementasi rencana ekonomi dan militer Rusia.

### **C. Aktifitas Rusia di Laut Hitam Pasca Aneksasi Krimea**

Aneksasi Rusia atas Ukraina telah memotong setengah dari garis pantai Ukraina, dan Rusia mengklaim hak atas sumber daya bawah laut semenanjung Krimea. Perlu juga diketahui bahwa Krimea bukanlah satu-satunya pendudukan Rusia di sekitaran pesosor pantai Laut Hitam. Selain Krimea, Rusia juga telah mempertahankan pasukan militer yang diperkirakan berjumlah empat ribu tentara di wilayah Georgia Abkhazia. Rusia juga mengerahkan dua puluh delapan ribu

---

<sup>1</sup> Luke Coffey, "Russia In The Black Sea", *Middle East Institute*, 2020, <https://www.mei.edu/publications/russia-black-sea>.

<sup>2</sup> Luke Coffey, "Russia In The Black Sea"

pasukan paska aneksasi Krimea dan memulai program besar untuk membangun perumahan, memulihkan lapangan terbang dan memasang radar baru. Pemasangan radar baru dengan kemampuan jangkauan pasif hingga 450 km, “memberikan militer Rusia gambaran waktu nyata yang sangat baik akan posisi kapal asing yang beroperasi di Laut Hitam”.<sup>3</sup> Rusia juga telah mengerahkan sistem pertahanan udara S400 canggihnya di sana sebagai upaya untuk mendominasi wilayah udara di Laut Hitam.<sup>4</sup> Tidak hanya dalam bidang keamanan udara, Rusia juga berfokus pada militer di laut. Rusia juga memperkuat pertahanan pantai Bastion P dan dipersenjatai dengan rudal jelajah anti-kapal. Kapabilitas dari rudal ini memiliki jangkauan hingga 300 km dengan kecepatan yang sangat tinggi. Selain itu, Rusia juga menempatkan ratusan tank, kendaraan lapis baja dan artileri di semenanjung ini.

Kontrol Rusia atas Laut Hitam digunakan untuk meluncurkan dan mendukung operasi laut Presiden Suriah, Bashar al-Assad. Kapal penjelajah rudal angkatan laut Rusia memiliki peran penting saat Rusia mulai mengintervensi di Suriah. Rudal ini menjadi pertahanan udara yang penting bagi pasukan Rusia. Ratusan ribu ton biji-bijian dan gandum dikirim dari Krimea ke Suriah untuk membantu masalah kekurangan pangan Rezim Assad. Hal ini dilakukan melalui kota pelabuhan Sevastopol di Krimea dan angkatan laut Rusia di Tartus.

Aktivitas Rusia di Laut Hitam dapat dikategorikan sebagai aksi keamanan, dimana perkembangan yang dilakukan terletak dalam bidang persenjataan. Dapat dikatakan bahwa usaha Rusia untuk meningkatkan keamanan di Laut Hitam merupakan upaya untuk melindungi kepentingan Rusia yang begitu besar di wilayah ini. Aksi Rusia ini kemungkinan besar juga merupakan respon terhadap Amerika Serikat dan NATO yang semakin besar pengaruhnya di wilayah ini.

## **Kembalinya Amerika Serikat dan NATO ke Laut Hitam di Era Joe Biden**

### **A. Aktivitas AS dan NATO tahun 2021 di Laut Hitam**

Selama lebih dari satu dekade, wilayah Laut Hitam telah menjadi medan perang bagi pasukan pro-Barat dan pro-Rusia. Pada tahun 2008 perang antara Rusia dan Georgia yang berusaha demokratisasi berakhir dengan Moskow membantu dua wilayah Georgia untuk lepas dari pemerintah pusat. Pada 2014, Rusia menganeksasi semenanjung Krimea dari Ukraina setelah pemerintah pro-Kremlin runtuh. Hingga, akhir-akhir ini Rusia telah melakukan berbagai investasi

---

<sup>3</sup> Luke Coffey, "Russia In The Black Sea"

<sup>4</sup> Luke Coffey, "Russia In The Black Sea"

yang signifikan dalam pasukan angkatan lautnya di Laut Hitam dan beberapa bulan terakhir, aset ini digunakan untuk mengancam pasukan Barat selama latihan bersama dan saat kapal-kapal bergerak melintasi wilayah tersebut.

Amerika Serikat kemudian juga berusaha untuk memberikan dukungan pada negara sekutunya di wilayah ini. Sekitar seribu pasukan Amerika Serikat ditempatkan di Rumania yang merupakan anggota NATO secara bergilir, keberadaan pasukan ini tidak bersifat permanen. Pemerintahan Biden juga telah meningkatkan bantuan keamanan pada Ukraina dan Georgia, hal ini dilakukan dengan menyediakan kapal patroli, menyetujui penjualan dan transfer rudal javelin dan memperluas latihan militer bilateral dan multilateral. Ukraina, Georgia, dan Bulgaria juga menjadi bagian dari negara yang program maritimnya disponsori oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat juga mengirimkan pesawat pengintai terbaiknya ke Laut Hitam sebagai antisipasi akan kemungkinan terjadinya invasi di Ukraina. Selain Amerika Serikat, NATO juga secara rutin menerbangkan pesawat pengintai di seiring perbatasan Rusia.

Dilaksanakan juga latihan maritim yang disebut dengan *Exercise Sea Breeze*. *Exercise Sea Breeze* merupakan sebuah latihan maritim multinasional yang dengan Amerika Serikat dan Ukraina sebagai tuan rumahnya yang diadakan di Laut Hitam dengan tujuan untuk meningkatkan interoperabilitas negara yang berpartisipasi. Latihan ini merupakan latihan maritim tahunan yang sudah berlangsung sejak 1996. *Breeze* pada tahun 2021 diikuti lebih dari dua ribu pasukan dan tiga puluh kapal. Latihan maritim yang dipimpin oleh Bulgaria ini dimulai pada 12 Juli dan berakhir pada 19 Juli 2021 melibatkan Albania, Belgia, Bulgaria, Georgia, Yunani, Itali, Latvia, Polandia, Rumania, Spanyol, Turki, Ukraina, Inggris dan Amerika Serikat. NATO semakin meningkatkan keberadaannya di Laut Hitam terutama setelah terjadinya aneksasi ilegal oleh Rusia. Kapal-kapal dari NATO kemudian secara rutin berpatroli di Laut Hitam.

Dapat dikatakan bahwa aktivitas Amerika Serikat dan NATO semakin meningkat di tahun 2021. Kedua aktor ini berusaha untuk meningkatkan keberadaannya di Laut Hitam. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah pasukan serta kapal yang ditempatkan di sana. Dilaksanakan juga latihan rutin oleh kedua aktor ini. Pegintaian juga dilakukan dengan pesawat. Hal-hal ini dilakukan oleh Amerika Serikat dan NATO sebagai respon terhadap keberadaan pasukan yang ditempatkan Rusia di wilayah ini.

## **B. Kepentingan Amerika Serikat di Laut Hitam**

Walaupun Amerika Serikat terletak ribuan mil jauhnya dari Laut Hitam, wilayah ini tetap menjadi bagian yang penting dari agenda Amerika Serikat. Laut Hitam memiliki peran dalam kepentingan strategis Amerika Serikat. Sehingga, membuat AS mulai memperhatikan Laut Hitam. Salah satu kepentingan dari Amerika Serikat berada dalam bidang energi. Seperti yang telah kita ketahui, Laut Hitam merupakan wilayah dengan sumber energi yang besar. Amerika Serikat telah menampakkan ketertarikannya pada berbagai proyek energi di Laut Hitam. Salah satunya pada saluran pipa Nabucco, dimana akan dibangun saluran pipa dari Turki hingga Balkan dan akan menghubungkan sumber gas Caspian dengan Eropa. Washington memberikan dukungan politik yang kuat pada proyek ini. Amerika Serikat juga menunjukkan dukungan yang kuat pada proyek konstruksi saluran pipa Caspia. Keberadaan dari saluran gas ini akan menghentikan monopoli gas Rusia atas ekspor gas Turkmenistan.

Kemudian, kepentingan Amerika Serikat di Laut Hitam juga berhubungan dengan keamanan. Berbagai masalah keamanan seperti penjualan obat-obatan terlarang, penyelundupan senjata, perdagangan manusia, imigrasi ilegal, terorisme dan kemungkinan proliferasi nuklir menjadi masalah keamanan yang termasuk dalam kepentingan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Berbagai konflik-konflik yang tidak terselesaikan di wilayah ini menciptakan wilayah-wilayah terlarang. Wilayah-wilayah ini biasanya dikelilingi oleh pasukan Rusia baik di dalam atau di sekitarnya. Daerah dengan karakteristik ini menjadikannya tempat yang cocok untuk berkembangnya kegiatan kriminal dan kemungkinan besar menjadi pusat kegiatan kriminal tersebut, seperti pencucian uang, yang kemudian menjadi pendukung dalam kejahatan terorganisir di Eropa dan Amerika Serikat. Amerika Serikat berupaya untuk melawan terorisme, kejahatan terorganisir dan penyelundupan *Weapon of Mass Destruction* melalui wilayah Laut Hitam ini. Sehingga dilakukan berbagai usaha seperti peningkatan keamanan perbatasan dan respon militer. Amerika Serikat juga terlihat memberikan dukungan pada *Black Sea Border Security Initiative*. Departemen Pertahanan Amerika Serikat juga mendanai *Black Sea Civil Emergency Response Planning* yang dibuat untuk meningkatkan koordinasi antar perbatasan di wilayah ini.

Amerika Serikat, bersama dengan NATO, juga berusaha untuk meningkatkan kekuasaannya di Laut Hitam dengan tujuan untuk menyeimbangi kekuatan Rusia yang semakin mendominasi di Laut Hitam. Setelah dilakukannya ankesasi ilegal Rusia terhadap Krimea, mulai terlihat intensi Rusia untuk memiliki kuasa atas Laut Hitam. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pasukan dan kapal-kapal Rusia yang ditempatkan di Laut Hitam. Namun, meningkatkan dominasi

dan jumlah masukan Rusia di wilayah ini dianggap sebagai ancaman bagi negara-negara sekitar, dimana kebanyakan merupakan sekutu AS dan anggota dari NATO. Usaha Amerika Serikat dan NATO untuk terlibat dan juga menempatkan pasukan di Laut Hitam juga dapat dilihat sebagai upaya dari kedua aktor ini untuk menghentikan Rusia dengan ekspektasi untuk mencegah kejadian yang sama dengan ankesasi Krimea pada 2014.

### **C. Bentuk Penguatan Aliansi Amerika Serikat dan NATO**

Amerika Serikat dan NATO memiliki hubungan yang sangat erat. Kedua aktor internasional ini telah banyak bekerja sama dalam berbagai isu keamanan. Sebagai salah satu negara yang menjadi anggota pembangun NATO, hubungan antara Amerika Serikat dan NATO telah berlangsung hingga lebih dari tujuh puluh tahun sejak tahun 1949 hingga saat ini. Hubungan erat ini dapat dilihat dari perkataan Presiden AS saat ini, dimana Biden menyatakan:

*“Our Alliance is the strong foundation on which our collective security and our shared prosperity can continue to be built...the U.S. commitment to Article 5 of the NATO Treaty is rock solid and unshakable. It’s a sacred commitment... Among our most important shared missions is renewing and strengthening the resilience of our democracies, by pointing out that we have to prove to the world and to our own people that democracy can still prevail against the challenges of our time and deliver for the needs of our people.”<sup>5</sup>*

Pernyataan Biden ini pada dasarnya mengakui bahwa hubungan aliansi antara Amerika Serikat dan NATO dapat terus berjalan dikarenakan kesamaan tujuan dan ideologi dari kedua aktor. Biden juga mengakatan bahwa Amerika Serikat berkomitmen terhadap Artikel 5 dari Perjanjian NATO, dimana berarti Amerika Serikat akan mengambil aksi jika anggota NATO diserang dan begitu juga sebaliknya.

Hubungan aliansi kedua aktor ini juga dapat dilihat dari peran aktif Amerika Serikat dalam berpartisipasi di NATO. Salah satunya pada 30 November hingga 1 Desember 2021, Antony J. Bilken sebagai Sekretaris Negara, menghadiri *NATO Foreign Ministerial* di Riga.<sup>6</sup> Selain itu Biden juga menghadiri *Brussels Summit 2021* sebagai upaya untuk semakin memperkuat hubungan dengan anggota NATO. Pertemuan-pertemuan ini dilaksanakan dengan tujuan untu mendiskusikan perkembangan strategi NATO sehingga lebih sesuai dengan isu-isu keamanan saat

---

<sup>5</sup> "The Ironclad U.S. Commitment To NATO - United States Department Of State", *United States Department Of State*, 2021, <https://www.state.gov/the-ironclad-u-s-commitment-to-nato/>.

<sup>6</sup> "The Ironclad U.S. Commitment To NATO - United States Department Of State"

ini. Dalam *Brussels Summit* didiskusikan mengenai Kebijakan Pertahanan Cyber Komperhesif dan dikembangkan rencana aksi cyber yang dibuat untuk meningkatkan ketahanan NATO terhadap aksi cyber yang semakin kompleks saat ini. Selain isu cyber, dibahas juga mengenai promosi aksi keamanan perubahan iklim yang kemudian membantu para negara anggota NATO untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim terhadap keamanan.

Keterlibatan Amerika Serikat dalam pertemuan NATO dan juga deklarasi komitmen dari Biden telah menunjukkan bahwa Amerika Serikat berniat untuk terus melanjutkan aliansinya dengan NATO dan tidak hanya berpartisipasi namun juga turut serta dalam pengembangan organisasi ini.

### **Strategi AS dan NATO dalam Menghadapi Konflik Keamanan di Laut Hitam**

NATO sebagai organisasi yang memiliki kepentingan di Laut Hitam, dengan dasar keamanan dan kedaulatan negara-negara anggotanya harus memiliki perkembangan dalam menentukan strategi yang tepat di kawasan Laut Hitam. Strategi tersebut juga harus dapat menampung kepentingan negara-negara anggota NATO sebagai penyatu kepentingan keamanan mereka. Secara lebih luas, NATO juga memiliki kepentingan untuk mencegah aksi ofensif Rusia secara tepat dan menjaga kedaulatan negara-negara lainnya yang bukan anggota NATO, namun secara geopolitik berada dibawah kawasan kepentingan NATO.

Salah satu wujud dari perluasan kepentingan ini adalah diadakannya *the Warsaw Summit Communique* yang memperjelas komitmen NATO kepada negara non-anggota seperti Ukraina, Georgia, dan Moldova.<sup>7</sup> Dalam perjanjian ini, NATO menyampaikan komitmennya secara jelas untuk meningkatkan pertahanan secara kolektif, meningkatkan kekuatan deterensi dalam melawan ancaman keamanan di kawasan, serta meningkatkan kerjasama antara NATO dengan Uni Eropa dalam meningkatkan keamanan Euro-Atlantic dari berbagai bentuk ancaman hibrida, dan ancaman keamanan lainnya.<sup>8</sup> Komitmen ini tidak secara khusus disampaikan untuk menghadapi Rusia di Laut Hitam, namun komitmen ini telah meliputi kawasan yang secara geopolitik menyebabkan ancaman bagi kepentingan NATO, yang mana meliputi kawasan Laut Hitam. Kerjasama tersebut juga menjadi langkah defensif yang tepat bagi NATO dan aliansinya untuk meningkatkan pengaruh di kawasan Laut Hitam. Langkah-langkah defensif yang dilakukan aliansi NATO dengan

---

<sup>7</sup> STEVEN HORRELL, "A NATO Strategy for Security in the Black Sea Region" (Atlantic Council, 3 Januari 2016), <http://www.jstor.org/stable/resrep03475>.

<sup>8</sup> NATO, "the Warsaw Summit Communique," in *The Warsaw Declaration on Transatlantic Community* (Warsaw, 2016).

komitmen ini harus dilakukan dengan penuh optimisme, sebab dengan menguatnya tindakan aliansi NATO di Laut Hitam, maka tindakan tersebut dapat menekan presensi Rusia di kawasan.

Langkah-langkah defensif yang dilakukan oleh AS dan aliansi NATO di Laut Hitam dapat berupa beberapa tindakan strategis. Pertama, melakukan penguatan presensi militer angkatan laut di Laut Hitam, yang mana penguatan ini dilakukan dengan mengembangkan program latihan bersama di Laut Hitam yang dapat membentuk *framework* untuk keamanan regional.<sup>9</sup> Dengan dikembangkannya program seperti ini, maka keamanan kolektif seperti yang ditargetkan NATO dengan negara aliansi maupun non-aliansi dapat terwujud. Sebelumnya, pada tahun 2001 NATO telah memiliki BLACKSEAFOR atau *Black Sea Naval Force* sebagai kerjasama keamanan kawasan Laut Hitam. Dapat dinilai bahwa dengan mengacu pada *framework* sebelumnya, NATO dapat lebih mudah menjalankan strategi keamanan regional Laut Hitam bersama negara anggota dan non-anggota, yang diperlukan adalah pengembangan pada arah kerjasama melihat tantangan keamanan di Laut Hitam pada saat ini mulai lebih kompleks.

Kedua, AS dan NATO juga dapat memanfaatkan kerjasama dengan negara-negara kawasan Laut Hitam seperti Romania, Georgia, dan Ukraina yang telah memiliki hubungan kerjasama keamanan sebelumnya dengan AS. Romania sebagai salah satu negara yang berada di kawasan Laut Hitam telah meningkatkan kerjasama latihan militer bersama AS dan NATO pasca aneksasi Krimea 2014, yang mana bila kegiatan ini terus dilanjutkan maka dapat meningkatkan pengaruh AS dan NATO di Laut Hitam.<sup>10</sup> Selain Romania, Georgia juga berperan penting dalam menjadi partner bagi AS dan NATO untuk meningkatkan presensi di Laut Hitam. Pasca invasi Rusia ke Georgia tahun 2008, Georgia secara tegas mendukung penuh NATO sebagai negara non anggota untuk membantu operasi yang dilakukan oleh AS dan NATO di Laut Hitam. Dalam tahun-tahun sebelumnya, Georgia telah menjadi rekanan aliansi AS dan NATO yang dapat diandalkan dengan banyaknya kontribusi negara tersebut untuk membantu operasi NATO di Afghanistan.<sup>11</sup> Dengan mengandalkan hubungan dengan Georgia, maka AS dan NATO dapat memanfaatkan peran negara ini dalam penyediaan infrastruktur dan sarana basis militer yang dapat mendukung presensi AS dan NATO di kawasan Laut Hitam. Hal ini tentunya dapat menjadikan Georgia sebagai salah satu kunci strategi bagi AS dan NATO. Strategi demikian pun sama hal nya dapat

---

<sup>9</sup> HORRELL, "A NATO Strategy for Security in the Black Sea Region."

<sup>10</sup> Luke Coffey, "While the U.S is not a Black Sea Country, It Needs to be a Black Sea Power," 2020.

<sup>11</sup> Luke Coffey. "While the U.S is not a Black Sea Country, It Needs to be a Black Sea Power,"

dimanfaatkan bersama Ukraina sebagai negara kawasan Laut Hitam yang pernah terkena imbas dari aneksasi oleh Rusia. Dengan meningkatkan keamanan dan dukungan bersama Ukraina, maka AS dan NATO dapat menjadi cerminan persatuan yang defensif bersama aliansinya untuk mencegah tindakan agresif Rusia di kawasan Eropa, khususnya Laut Hitam.

Ketiga, meningkatkan komunikasi keamanan bersama negara-negara aliansi di Laut Hitam sebagai langkah penegasan diplomatis mengenai presensi AS dan NATO di Laut Hitam. Diplomasi publik merupakan salah satu upaya damai yang dapat dilakukan oleh aliansi AS dan NATO dalam mengembangkan kerjasama keamanan regional.<sup>12</sup> Melalui peningkatan komunikasi keamanan ini, kepentingan nasional setiap negara yang ada di kawasan dapat dijadikan landasan bagi aliansi NATO untuk mengembangkan langkah pertahanan di masa mendatang serta mengkalkulasikan tantangan yang ada di kawasan Laut Hitam. Operasi yang dilakukan oleh AS dan NATO juga dapat disesuaikan dengan kepentingan yang telah tertampung melalui komunikasi tersebut, sehingga dapat terhindar dari kesalahan perhitungan dalam tindakan strategis di Laut Hitam.

Keempat, AS dan NATO harus memanfaatkan situasi pergeseran keamanan dari isu tradisional menjadi non-tradisional di kawasan Laut Hitam. Salah satunya, permasalahan energi dan pembangunan perekonomian di negara-negara kawasan Laut Hitam. Permasalahan non-tradisional ini dapat dimanfaatkan oleh AS dan NATO melalui operasi yang bersifat proteksi terhadap aset-aset infrastruktur dan perekonomian.<sup>13</sup> Operasi yang bersifat proteksi ini dapat dilakukan dengan mengedepankan peran kerjasama antara NATO dengan negara-negara non-anggota seperti beberapa negara Uni Eropa agar dapat mempertegas pengaruh NATO di kawasan dalam segi keamanan non-tradisional. Meskipun Rusia juga tidak lengah dengan masalah keamanan non-tradisional, cara deterensi seperti ini dapat meningkatkan peran NATO untuk melawan agresifnya Rusia secara strategis.

Kelima, AS dan NATO sebaiknya mengurangi tindakan yang berupa sanksi kepada Rusia. Sebab, dari langkah-langkah berupa sanksi yang telah banyak ditujukan kepada Rusia hanya semakin meningkatkan eskalasi konflik dan tindakan agresif Rusia di Laut Hitam. Perhitungan yang lebih strategis dan kooperatif harus lebih dipertimbangkan oleh NATO dan AS untuk meningkatkan pengaruhnya di Laut Hitam.

---

<sup>12</sup> HORRELL, "A NATO Strategy for Security in the Black Sea Region."

<sup>13</sup> HORRELL.



## **Kesimpulan**

Dari berbagai penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa AS dan NATO dapat meningkatkan peran aliansi mereka dalam mencegah agresifnya tindakan Rusia di kawasan Laut Hitam. Kompleksnya permasalahan keamanan di Laut Hitam tidak dapat diatasi tanpa melibatkan perhitungan yang strategis bersama dengan negara-negara kawasan tersebut. Ibaratkan masalah yang kompleks, maka tidak dapat diselesaikan secara instan, melainkan harus diselesaikan secara kompleks pula. Rusia bukanlah lawan yang mudah dalam permainan geopolitik di kawasan Laut Hitam. Tanpa mengedepankan peran kekuatan aliansi dan institusi, Rusia dapat dengan mudah memperluas pengaruhnya secara militer dan non-militer dengan langkah agresifnya, seperti yang telah terjadi yaitu aneksasi dan invasi yang terjadi di Ukraina dan Georgia. Penguatan secara diplomatik dan kolektif juga dapat mengarahkan fokus aliansi AS dan NATO untuk memperhitungkan keamanan Laut Hitam dari sisi tradisional dan non-tradisional. Dengan memperhitungkan secara tradisional dan non-tradisional, maka AS dan NATO dapat mengkalkulasikan langkah-langkah yang komprehensif dan membentuk komitmen dalam melawan pengaruh Rusia di kawasan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Axe, David. "NATO Surveillance Planes Crowd The Black Sea As Russian Troops Surround Ukraine". *Forbes*, 2021. <https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2021/12/10/nato-surveillance-planes-crowd-the-black-sea-to-track-russian-troops-around-ukraine/?sh=2ae89013254f>.
- Coffey, Luke. "Russia In The Black Sea". *Middle East Institute*, 2020. <https://www.mei.edu/publications/russia-black-sea>.
- Coffey, Luke. "While the U.S is not a Black Sea Country, It Needs to be a Black Sea Power," 2020.
- Demirjian, Karoun. "Pentagon Spotlights The Black Sea, But Plans For Confronting Russia Remain Murky". *The Washington Post*, 2021. [https://www.washingtonpost.com/national-security/biden-russia-black-sea/2021/10/25/3f5d458e-3562-11ec-9bc4-86107e7b0ab1\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/national-security/biden-russia-black-sea/2021/10/25/3f5d458e-3562-11ec-9bc4-86107e7b0ab1_story.html).
- Larrabee, F. Stephen. "The United States And Security In The Black Sea Region". *Southeast European And Black Sea Studies* 9, no. 3 (2009): 301-315. doi:10.1080/14683850902934309.

Stronski, Paul. "What Is Russia Doing In The Black Sea?". *Carnegie Endowment For International Peace*, 2021. <https://carnegieendowment.org/2021/05/20/what-is-russia-doing-in-black-sea-pub-84549>.

"The Ironclad U.S. Commitment To NATO - United States Department Of State". *United States Department Of State*, 2021. <https://www.state.gov/the-ironclad-u-s-commitment-to-nato/>.

HORRELL, STEVEN. "A NATO Strategy for Security in the Black Sea Region." Atlantic Council, 3 Januari 2016. <http://www.jstor.org/stable/resrep03475>.

NATO. "the Warsaw Summit Communique." In *The Warsaw Declaration on Transatlantic Community*. Warsaw, 2016.

# ***Never Ending Afghanistan; Melihat Kesiapan Taliban Dalam Menghadapi Ancaman ISIS-K Setelah Berhasil Menguasai Afghanistan***

Charisya, Puput Heravina, Wandy Ardiyansyah Hasibuan

## ***Abstract***

*This paper will discuss the preparations of the Taliban in dealing with the increasing threat of ISIS-K. After the Taliban succeeded in taking over Afghanistan in 2021, the Taliban was faced with several problems both from outside and inside the country. Especially from inside the country, the Taliban are faced with attacks carried out by the ISIS-Khorasan group that create discomfort and unrest in the country of Afghanistan. This makes the Afghan people distrust the leadership of the Taliban because in the end the country remains in a never ending conflict. By using a qualitative method, the author finds that the threat generated by ISIS-K in Afghanistan is not something to be taken lightly. The author believes that the Taliban must be active both militarily and diplomatically to attract assistance from other countries in overcoming the threat from ISIS-K. The author believe this will increase the existence of the Taliban as a government that is recognized internationally, as well as increase public confidence in the Taliban itself.*

**Keywords:** *Taliban, ISIS-K, Afghanistan, United States*

## **Abstrak**

Tulisan ini akan membahas tentang persiapan Taliban dalam menghadapi ancaman ISIS-K yang semakin meningkat. Setelah Taliban berhasil mengambil alih Afghanistan pada 2021 lalu, Taliban dihadapkan dengan beberapa masalah baik dari luar maupun dalam negeri. Terkhusus dari dalam negeri, Taliban dihadapkan dengan serangan yang dilakukan oleh kelompok ISIS-Khorasan yang menciptakan ketidaknyamanan dan kerusuhan di negara Afghanistan. Hal ini membuat masyarakat Afghanistan menjadi tidak percaya akan kepemimpinan Taliban sebab pada akhirnya negara itu tetap dalam gejala konflik yang tidak selesai-selesai. Dengan menggunakan metode kualitatif, penulis menemukan bahwa ancaman yang dihasilkan oleh ISIS-K di Afghanistan bukanlah suatu hal yang dianggap remeh. Adapun penulis menyakini bahwa Taliban harus bisa aktif baik secara militer maupun diplomasi untuk menarik bantuan dari negara lain dalam mengatasi ancaman dari ISIS-K. Hal ini penulis yakini akan meningkatkan eksistensi Taliban sebagai pemerintah yang diakui dalam dunia internasional, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap Taliban itu sendiri.

**Kata Kunci:** Taliban, ISIS-K, Afghanistan, Amerika Serikat

## **Pendahuluan**

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis mengenai bagaimana Taliban menghadapi ancaman ISIS-K setelah berhasil menguasai Afghanistan pada tahun 2021. Setelah Amerika Serikat Bersama sekutunya menarik diri dari Afghanistan, Taliban dengan cepat melakukan pergerakan dan berhasil menguasai Kabul hanya dalam beberapa minggu. Keberhasilan ini belum

membuat posisi Taliban di Afghanistan aman, sebab para pemimpin Taliban harus menghadapi pergolakan dan ancaman dari dunia internasional akibat dari gerakan merebut kekuasaan pemerintah Afghanistan yang sah. Namun, tidak hanya berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain, dari dalam negeri sendiri Taliban juga menghadapi ancaman yang lain yaitu serangan dari aktivitas kelompok yaitu ISIS-K.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa semenjak sekutu meninggalkan jejak dari Afghanistan, ISIS afiliasi Afghanistan atau ISIS-K (Khorasan) telah melakukan beberapa serangan terhadap Taliban di Afghanistan yang terutama menargetkan kelompok minoritas Syiah di wilayah ini. Pada minggu 3 Oktober, kelompok ISIS-K diketahui telah melakukan pengeboman di salah satu masjid di Kabul yang berhasil menewaskan setidaknya 5 orang warga sipil.<sup>14</sup> Aksi ini kemudian dibalas oleh Taliban dengan melakukan pencarian markas persembunyian dari ISIS-K dan berakhir dengan melakukan penyerangan dan penghancuran markas tersebut beserta seluruh anggota dari ISIS-K.<sup>15</sup> Beberapa hari kemudian, pada Jumat 8 Oktober, ISIS-K kembali melakukan penyerangan melalui bom bunuh diri yang dilakukan di Kunduz, Afghanistan bagian utara. Serangan bom bunuh diri ini dilakukan pada salah satu Masjid yang diledakkan pada saat mengadakan Salat Jumat. Pengeboman ini setidaknya memakan korban sebanyak 50 warga sipil dimana korbannya adalah kaum minoritas Syiah.<sup>16</sup>

Kelompok ISIS-K telah meningkatkan kampanye serangan mereka terhadap Taliban dalam beberapa bulan terakhir, di antaranya adalah serangan terhadap bandara Kabul pada Agustus kemarin serta beberapa masjid di Afghanistan yang targetnya adalah kaum minoritas Syiah. Peningkatan ini akibat dari ketidakstabilan yang terjadi di Afghanistan dimana kebangkitan Taliban dan penarikan Sekutu membuat ISIS-K mendapatkan kembali kelonggaran dalam melaksanakan aksi-aksinya. ISIS-K beroperasi pada wilayah Afghanistan bagian selatan dan timur, namun setelah aksi bom bunuh diri yang dilakukan di Kunduz pada Jumat kemarin, hal ini menandakan bahwa ISIS-K telah beroperasi juga di bagian utara Afghanistan. Pihak Taliban telah

---

<sup>14</sup> Dominick Mastrangelo, "Taliban: ISIS-K Cell destroyed after bombing mosque," The Hill, <https://thehill.com/homenews/575118-taliban-isis-k-cell-destroyed-after-mosque-bombing?rl=1> diakses pada 2 Desember 2021.

<sup>15</sup> Associated Press, "Taliban raid suspected IS hideout after bombing in capital," AP News, <https://apnews.com/article/afghanistan-bombings-kabul-taliban-islamic-state-group-7e7533c5af5854d7555474b138461c8d> diakses pada 7 Desember 2021.

<sup>16</sup> BBC, "Afghanistan: Deadly attack hits Kunduz mosque during Friday prayers," BBC News, <https://www.bbc.com/news/world-asia-58842793> diakses pada 10 Desember 2021.

mengatakan bahwa mereka telah melakukan penangkapan terhadap puluhan anggota ISIS dan juga telah membunuh beberapa orang yang dicurigai memiliki keterkaitan dengan kelompok itu.<sup>17</sup> ISIS-K merupakan saingan strategis Taliban di Afghanistan yang yang mempertaruhkan nilai serta kepentingan yang berbeda.

Dalam tulisan ini, penulis melihat bahwa Taliban tidak akan mudah mampu mengatasi serangan dari ISIS-K di wilayah Afghanistan. Hal ini disebabkan karena ISIS-K telah beroperasi cukup lama di wilayah ini dan strategi yang mereka gunakan juga pada umumnya gerilya. Sehingga, Taliban harus memiliki strategi dan kekuatan yang lebih dalam menghadapi ancaman ini. Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis berusaha untuk menjawab bagaimana strategi Taliban dalam menghadapi serangan ISIS-K di Afghanistan pasca merdeka. Dalam pembahasan, penulis akan menjelaskan mengenai identitas ISIS-K, pasang surut relasi Taliban-ISIS K, dan juga bagaimana penggunaan strategi Taliban dalam menghadapi ancaman ISIS-K.

### **ISIS-Khorasan; cabang ISIS di Afghanistan-Pakistan**

Kelompok yang dikenal sebagai Negara Islam Provinsi Khorasan, yang di singkat ISIS-K atau ISIS-KP (*Islamic State of Khorasan Province*) merupakan kelompok kelompok ISIS afiliasi Afghanistan yang berpusat kepada kelompok ISIS pusat di Timur Tengah. Kelompok ISIS-K ini muncul pertama kali pada Januari 2015 di dua lokasi di Afghanistan, yakni di provinsi Nangarhar, Afghanistan Timur, dekat perbatasan dengan FATA, dan distrik Kajaki di provinsi Helmand, Afghanistan Selatan.<sup>18</sup> Kedua lokasi ini khususnya provinsi Nangarhar merupakan rute tempat penyelundupan narkoba dari dan keluar Pakistan. Selain itu, tahun 2015 juga situasi dimana ISIS sedang berada dalam puncak kejayaanya di Irak dan Suriah. Menurut pusat strategis dan internasional, “Khorasan” yang berarti “Tanah Matahari” juga mengacu pada wilayah bersejarah yang mencakup bagian dari Iran, Afghanistan dan Pakistan.<sup>19</sup> Kelompok ISIS-K ini melakukan rekrutmen anggota yaitu para jihadis yang berasal dari Afghanistan dan Pakistan, terkhusus mereka yang telah membelot dari Taliban Afghanistan yang umumnya menganggap Taliban tidak ekstrem dan ideologi yang digunakan tidak memadai. Sebagai pemahaman, orang-orang yang bergabung dengan ISIS-K merupakan para jihadis yang memiliki aspirasi lebih besar untuk

---

<sup>17</sup> BBC, “Afghanistan”

<sup>18</sup> Amin Tarzi, “Islamic State-Khorasan Province,” dalam *The Future of ISIS, Regional and International Implications*, ed. Feisal al-Istrabadi dan Sumit Ganguly (Washington, D.C.:Brookings Institution Press, 2018) hlm. 121.

<sup>19</sup> Azi Paybarah, “What is the Islamic State Khorasan, a.k.a ISIS-K?,” *New York Times*, 2021 <https://www.nytimes.com/2021/08/27/world/asia/who-isis-k-afghanistan.html> diakses pada 27 Desember 2021.

mendirikan kekhalifahan Islam di Timur Tengah dan Asia. Selain itu, kelompok ISIS-K juga merupakan bagian dari ISIS Global.

Untuk mencapai tujuan yakni menciptakan organisasi jihad terkemuka, ISIS-K memiliki strategi untuk mendirikan kekhalifahan di Asia Tengah dan Selatan sebagai wadah bagi gerakan Negara Islam mereka. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan keahlian para jihadis dan aliansi operasionalnya dengan kelompok lain untuk melakukan serangan-serangan yang menargetkan minoritas seperti populasi Hazara, Sikh Afghanistan, Syiah, bahkan jurnalis, personel keamanan dan infrastruktur pemerintah. Serangan-serangan yang dilakukan oleh ISIS-K ini bertujuan untuk menciptakan kekacauan dan ketidakpastian politik sehingga mendorong para pejuang yang kecewa dari kelompok lain, misalnya Taliban bergabung ke barisan ISIS-K. Selain itu, hal ini juga akan menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat yang melihat bahwa pemerintah Afghanistan tidak bisa memberikan keamanan bagi mereka. Secara khusus, kelompok ini juga memiliki sikap *sektarian* dan cenderung untuk menentang legitimasi hak asasi manusia perempuan seperti menentang pendidikan untuk dinikmati oleh perempuan.

Berkaitan dengan Taliban, ISIS-K menyakini kelompok Taliban sebagai nasionalis kotor yang hanya memiliki ambisi untuk membentuk pemerintahan yang terbatas di perbatasan Afghanistan. Hal ini membuat terjadi perselisihan pemahaman dengan tujuan dari ISIS yaitu menciptakan Gerakan Negara Islam yang mendirikan kekhalifahan global. ISIS-K dan Taliban tampak saling bermusuhan dimana ISIS-K berusaha untuk merekrut anggota Taliban Afghanistan sambil menargetkan posisi Taliban di wilayah Afghanistan. Bentrokan yang terjadi antara Taliban dan ISIS-K terjadi bersamaan dengan serangan yang dilakukan oleh kekuatan Amerika Serikat bersama dengan tentara nasional Afghanistan yang menjadikan ISIS-K tersudutkan. Bagi Taliban, hal ini tentu menguntungkan karena memiliki tenaga tambahan dari Amerika Serikat meskipun keduanya juga bermusuhan.

Dalam tiga tahun pertama setelah pembentukan, ISIS-K telah melancarkan beberapa serangan terhadap sejumlah kelompok minoritas dan area publik seperti institusi-institusi dan pejabat pemerintah di kota-kota besar di Afghanistan dan Pakistan. Pada tahun 2016, pemerintah Amerika Serikat telah mengkonfirmasi bahwa mereka telah berhasil membunuh pemimpin ISIS-

K saat itu Hafiz Saeed Khan.<sup>20</sup> Tidak lama setelah itu, ISIS-K telah berhasil mengembalikan kekuatannya dengan berhasil menguasai beberapa teritorial di distrik pedesaan utara dan timur laut Afghanistan, yang mana wilayah ini menjadi *base* dalam meluncurkan kampanye mematikan di Afghanistan dan Pakistan. Setelah kematian Khan, ISIS-K memiliki tiga pemimpin pengganti yang kini masing-masing telah tewas. Pada April 2017, Abdul Hasib terbunuh yang disusul kematian Abu Sayed pada 11 Juli 2017. Pada 25 Agustus 2018 pemimpin berikutnya Abu Saad Orakzai kemudian terbunuh. Saat ini pemimpin tertinggi ISIS-K adalah Sanaullah Ghafari. Ghafari ditunjuk oleh ISIS pusat untuk memimpin ISIS-K pada Juni 2020, dimana ia bertanggung jawab untuk menyetujui semua operasi ISIS-K di seluruh Afghanistan dan mengatur pendanaan untuk melakukan operasi.<sup>21</sup>

Semenjak Amerika Serikat menarik diri dari Afghanistan, namun masih terlalu dini untuk melihat apakah hal ini akan menguntungkan ISIS-K sepenuhnya. Namun, apa yang mungkin akan terjadi adalah ISIS-K akan melanjutkan upayanya untuk membuat kepanikan dan kekacauan yang bertujuan membuat citra Taliban jelek dan tidak bisa memberikan keamanan kepada penduduk Afghanistan. Alhasil, jika rencana ini terus dilakukan dan ISIS-K mendapatkan dukungan berupa SDM yang meningkat, maka hal ini akan menimbulkan ancaman di tingkat nasional, regional bahkan internasional.

### **Pasang Surut Hubungan antara ISIS-K dan Taliban**

Selain menyerang dan merusak fasilitas negara Afghanistan termasuk tantara nasionalnya, ISIS-K juga menargetkan pasukan Amerika Serikat, sekutu Amerika Serikat, termasuk warga sipil Amerika Serikat yang berada di wilayah Afghanistan. Sebagian besar ISIS-K bermusuhan dengan Taliban, dan kedua kelompok ini telah berjuang untuk memperebutkan wilayah khususnya pada wilayah Afghanistan Timur. Sejak tahun 2017, para ahli mengatakan bahwa ISIS-K telah bertanggung jawab atas sekitar 250 bentrokan dengan pasukan Amerika Serikat, Afghanistan, dan Pakistan.<sup>22</sup> Setelah Taliban berhasil menguasai Afghanistan, ISIS-K dengan tegas mengecam

---

<sup>20</sup> Richard Gonzales, "U.S Official Confirm Death of Senior ISIS Leader in Afghanistan and Pakistan," *NPR*, 2016 <https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/08/12/489830363/u-s-officials-confirm-death-of-senior-isis-leader-in-afghanistan-and-pakistan> diakses pada 27 Desember 2021.

<sup>21</sup> U.S Department of State, "Taking Actions Against ISIS-K," Press Statement, 2021 <https://www.state.gov/taking-action-against-isis-k/>

<sup>22</sup> Azi Paybarah, "What Is the Islamic State Khorasan, a.k.a. ISIS-K?", *The New York Times*, Aug 27, 2021, <https://www.nytimes.com/2021/08/27/world/asia/who-isis-k-afghanistan.html>.

pengambilalihan itu dengan mengatakan bahwa versi pemerintahan islam kelompok Taliban tidaklah cukup keras.

Pada bulan Agustus 2021, ISIS-K mengklaim menjadi dalang dibalik serangan yang terjadi di Jalalabad yang telah memakan korban hingga puluhan anggota Taliban. Taliban yang mengetahui ini tidak menghindar dan mengkonfirmasi bahwa ancaman ISIS-K kian meningkat. Pada akhir Agustus 2021, ketika ISIS-K melakukan serangan bom bunuh diri di bandara Kabul, hal ini membuat kecaman terhadap Taliban kian berdatangan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Setelah peristiwa ini terjadi, Taliban memberikan pernyataan bahwa serangan-serangan yang dilakukan oleh kelompok ISIS-K dapat diatasi jika Amerika Serikat benar-benar sudah angkat kaki dari Afghanistan. Namun, meskipun Amerika Serikat telah meninggalkan Afghanistan sepenuhnya, perlawanan yang dilakukan ISIS-K belum surut dan tampaknya kedua kelompok ini masih saling berusaha untuk menaklukkan satu sama lain.

Sebelumnya, pada 28 Agustus 2021, Taliban telah dituduh telah melakukan penangkapan terhadap salah satu ulama salafi terkenal Abu Obaidullah Mutawakil di Kabul yang kabarnya telah tewas tak lama setelah berita ini. Meskipun Taliban telah membantah tuduhan ini, namun nampaknya rakyat tetap mencurigai pihak Taliban, hingga akhirnya Taliban menutup 36 masjid salafi di 16 provinsi berbeda.<sup>23</sup> Selain itu, ISIS-K memiliki sedikit hubungan yang rumit dengan Taliban. Hal ini karena ISIS-K telah memiliki hubungan dengan jaringan Haqqani yang sekarang sangat berkaitan dengan Taliban. Dengan demikian hubungan kedua kelompok ini cukup rumit untuk dipahami, namun yang jelas kedua kelompok sangat berbeda dalam beberapa aspek, terkhusus perbedaan ideologi.

Meskipun sebelumnya pada tahun 2019 ISIS pusat telah mengalami kemunduran setelah dibombardir oleh Amerika Serikat, para simpatisan ISIS terus memperjuangkan dan ke-khalifahan islam di luar teritori Irak dan Suriah, yakni Khorasan Afghanistan. Pada awalnya, ISIS-K menjalin hubungan dengan Taliban untuk menjadikan Afghanistan sebagai poros utama wilayah kekuasaan dan kekuatan ISIS. Ketika Taliban dan Amerika Serikat sedang merundingkan perjanjian damai yang disepakati di Qatar, terdapat perpecahan pandangan diantara tokoh elit Taliban untuk setuju

---

<sup>23</sup> Anisa Dewi, "ISIS-K, Ancaman Serius Taliban di Afghanistan", *CNN Indonesia*, Sept 30, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210930091433-113-701359/isis-k-ancaman-serius-taliban-di-afghanistan>



atau tidak terhadap kesepakatan. ISIS-K yang mengetahui ini sengaja memanfaatkan situasi untuk merekrut anggota Taliban yang tidak puas terhadap perjanjian damai.

Ketika Taliban berhasil menggulingkan pemerintahan Afghanistan yang sah dan mengambil alih negara itu, ISIS-K merasa terkianati karena Taliban tidak melanjutkan perjuangan. ISIS-K tidak menerima dengan baik mengenai situasi Taliban yang Afghanistan dimana ISIS-K menuduh bahwa Taliban telah mengabaikan tujuan jihad dan bersumpah untuk tetap melanjutkan perjuangannya.<sup>24</sup> Hal ini langsung dilakukan oleh ISIS-K dengan melakukan serangkaian serangan ledakan bom di kota timur Jalalabad. Pada awalnya juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid telah meremehkan ancaman ini dan mengatakan bahwa ISIS-K tidak akan bisa melakukan perlawanan yang efektif di Afghanistan. Meskipun demikian, hingga saat ini ISIS-K masih melanjutkan perjuangan dan aktif melakukan serangan gerilya terhadap Taliban.

Hal yang jelas adalah bahwa ISIS-K melihat Taliban sebagai musuh yang tidak dapat didamaikan yang perlu dikalahkan secara militer.<sup>25</sup> Permusuhan antara kedua kelompok telah diperburuk oleh permusuhan militer yang berkelanjutan, tetapi penyebab utama tetap perbedaan sektarian mereka. ISIS-K menganut ideologi Jihadi Salafisme — dan memainkan 'kemurnian' kredensial anti penyembahan berhala. Taliban, di sisi lain, berlangganan sekolah sektarian Islam Sunni alternatif, mazhab Hanafi, yang dianggap kurang oleh ISIS-K. Kedua kelompok juga berbeda dalam peran nasionalisme. ISIS-K dengan keras menolaknya, yang bertentangan dengan tujuan Taliban Afghanistan untuk menguasai Afghanistan.

### **Strategi Taliban dalam Menghadapi Ancaman ISIS-K Pasca Menguasai Afghanistan**

Terlepas dari peran Taliban dan ISIS-K yang merupakan militan Islam Sunni garis keras, kedua kelompok ini memiliki perbedaan dalam rincian agama dan strategi pergerakan. Hal ini dilihat bahwa ISIS-K sangat berambisi untuk menyerang para penganut Muslim Syiah karena mereka menganggap Muslim Syiah sebagai bidat dan gerakan mereka murni menganut paham sektarian. Menurut salah satu pejabat Taliban, Mawlawi Zubair, ISIS-K bukanlah sebuah ancaman dan Taliban tidak merasa untuk mengkhawatirkan mereka, apalagi sampai memerlukan bantuan pihak luar untuk melawan ISIS. Mawlawi kemudian menambahkan bahwa dengan menyelesaikan masalah ekonomi dan administrasi yang dihadapi Afghanistan, maka ancaman dari ISIS akan

---

<sup>24</sup> Amelia Fitriani, "ISIS-K, Musuk Bebuyutan dan Ancaman Terbesar Taliban di Afghanistan", *Republik Merdeka*, Aug 26, 2021, <https://dunia.rmol.id/read/2021/08/26/501924/isis-k-musuh-bebuyutan-dan-ancaman-terbesar-taliban-di-afghanistan>

<sup>25</sup> Asfandyar Mir, "The ISIS-K Resurgence," *Wilson Center*, 2021, hlm.2.

hilang hanya dengan tempo waktu 15 hari.<sup>26</sup> Taliban nampaknya mengambil sikap yang penuh percaya diri dihadapan dunia, namun kenyataannya setelah mengambil alih Afghanistan negara ini tidak mudah untuk memperbaiki kondisi internal dan eksternalnya.

Taliban memahami bahwa semenjak kepergian Amerika Serikat dari Afghanistan, ISIS-K akan melakukan sejumlah pergerakan yang akan berusaha merebut kekuasaan Taliban di Afghanistan. Meskipun dulu Taliban dan ISIS-K sama-sama menargetkan Syiah sebagai kelompok yang harus dimusnahkan, namun Taliban yang sekarang sudah berjanji untuk melindungi mereka. Hal ini kemudian membuat ISIS dan Taliban memiliki sedikit perbedaan terutama terhadap ideologi. Taliban 2021 telah menunjukkan sikap untuk menjadi lebih moderat, sementara ISIS masih teguh terhadap usaha pendirian kekhalfahan global.

Sebagai perbandingan, pemerintahan Afghanistan yang sebelumnya tidak mampu untuk mengalahkan baik Taliban maupun ISIS-K bahkan setelah menerima ratusan miliar dolar dari Amerika Serikat. Sekarang, Afghanistan yang dikuasai Taliban juga tidak bisa menghadapi ancaman dari ISIS-K sebab tidak memiliki modal yang banyak seperti Afghanistan yang sebelumnya. Apalagi hal ini diperparah dengan tidak adanya pengawasan intelijen yang canggih yang dilakukan oleh militer asing. Oleh karena itu, meskipun Taliban telah berupaya untuk mengalahkan ISIS-K dengan menghancurkan beberapa markas persembunyian mereka, hal ini akan memakan banyak usaha dan sumber daya. Hal ini menyatakan bahwa pernyataan pejabat Taliban yang seolah optimis dalam menghadapi ancaman ISIS-K perlu dipertimbangkan ulang.

Untuk menghadapi ancaman yang dihasilkan dari ISIS-K, terlebih dahulu rejim Taliban harus bisa menstabilkan kondisi Afghanistan baik dari dalam maupun dari luar. Sejak penguasaan Taliban dan pernyataan mereka dalam media, rejim Taliban telah berusaha untuk menunjukkan sisi ‘baru’ pada ideologi dan sikap politik mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat ini Taliban sudah sadar secara politik dan lebih proaktif.<sup>27</sup> Sebagai contoh, Taliban mempraktikkan seni diplomasinya dengan mengakui bahwa Tiongkok adalah principal dan mitra terdekatnya.<sup>28</sup> Hal ini tentunya ada kaitan tentang isu muslim Uyghur di Tiongkok, sehingga

---

<sup>26</sup> Oved Lobel, “The Taliban are losing the fight against Islamic State,” ASPI, <https://www.aspistrategist.org.au/the-taliban-are-losing-the-fight-against-islamic-state/> diakses pada 14 Desember 2021.

<sup>27</sup> Farooq Yousaf dan Moheb Jabarkhail, “US withdrawal and the Taliban regime in Afghanistan: Future policy directions,” Policy Brief 5/2021, hlm. 1

<sup>28</sup> Fisher, L. dan Squires, N, “Taliban declare China their closest ally,” The Telegraph, 2021. diakses pada 14 Desember 2021 <https://www.telegraph.co.uk/politics/2021/09/02/taliban-calls-china-principal-partner-international-community/>

sebagai gantinya Taliban tidak akan mengomentari isu muslim Uygur di Xinjiang, Tiongkok. Tidak hanya itu, Pada 7 Oktober, Rusia mengundang Taliban ke Konferensi Afghanistan di Moskow yang akan dilakukan pada tanggal 20 Oktober mendatang.<sup>29</sup> Pembicaraan itu akan mengikuti KTT G20 pada 12 Oktober yang bertujuan membantu negara Afghanistan dalam menghindari bencana kemanusiaan setelah pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban pada pertengahan Agustus. Rusia khawatir tentang potensi kejatuhan di wilayah yang lebih luas. Putin telah memperingatkan kemungkinan “ekstremis Islam” menyusup ke bekas Republik Soviet di Asia Tengah, yang dipandang Moskow sebagai *buffer zone* selatannya. Setelah pengambilalihan Taliban, Moskow telah mengadakan latihan militer di Tajikistan dan memperkuat *buffer zone*-nya di pangkalan militernya pada wilayah tersebut.

Diketahui bahwa Moskow telah bergerak untuk terlibat dengan kelompok Taliban dalam beberapa waktu terakhir tanpa harus mengakui kelompok tersebut karena di Rusia organisasi Taliban di cap sebagai organisasi teroris. Meskipun demikian, tidak seperti negara-negara barat yang bergegas mengevakuasi para diplomat dan warganya serta memindahkan kedutaanya dari Afghanistan, Rusia tetap membuka kedutaanya di ibu kota Afghanistan, Kabul. Selain itu, Taliban telah menjalin beberapa pertemuan sebelumnya dengan negara Tiongkok dalam membahas prospek kerjasama terkait masa depan Afghanistan. Tiongkok diketahui akan memberikan \$31 juta bantuan kepada Afghanistan termasuk makanan dan juga vaksin covid-19.<sup>30</sup> Selain itu, Tiongkok mencoba untuk menawarkan dan menyakinkan Taliban untuk bekerjasama dalam bidang ekonomi melalui program BRI-nya.

Saat ini, meskipun Taliban tidak lagi mengeluarkan sumber daya yang besar seperti saat melawan Amerika Serikat dan melawan pemerintah Afghanistan sebelumnya, kini Taliban menghadapi beban transisi menjadi sebuah aktor negara. Taliban harus bisa menghadapi beban negara dalam menjalankan pemerintahan dan mengatasi kekurangan sumber daya untuk memastikan keamanan bagi penduduk Afghanistan.<sup>31</sup> Tentunya, bagi Taliban yang sedang menghadapi tantangan-tantangan sebagai sebuah negara, diperlukan kesiapan yang jelas dalam

---

<sup>29</sup> Reuters, “Moscow invites Taliban to Afghanistan talks on Oct.20,” Reuters, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/moscow-host-afghanistan-talks-oct-20-2021-10-07/> diakses pada 17 Desember 2021.

<sup>30</sup> Yang Sheng, “China to provide emergency aid of 200m yuan, including food, 3 million vaccines to Afghanistan,” Global Times, <https://www.globaltimes.cn/page/202109/1233754.shtml> diakses pada 17 Desember 2021.

<sup>31</sup> Amira Jadoon dan Andrew Mines, “The Taliban can’t take on the Islamic State alone,” War on the Rocks, <https://warontherocks.com/2021/10/the-taliban-cant-take-on-the-islamic-state-alone/> diakses pada 20 Desember 2021.

menghadapi ISIS-K atau setidaknya mampu mengurangi perkembangan kelompok itu. Kelompok ISIS-K sangat bergantung kepada pejuang asing yang direkrut dari berbagai negara melalui propaganda. Oleh karena itu, Taliban harus memfokuskan kepada koordinasi regional dan pembagian intelijen yang memungkinkan Afghanistan untuk melacak pergerakan pejuang asing yang berada di zona konflik sehingga mampu mengurangi sumber daya ISIS di Afghanistan. Kerja sama dengan negara lain juga dapat fokus pada pelacakan dan mengganggu aliansi lintas batas, yang merupakan sumber utama kemampuan serangan ISIS di Afghanistan.

### **Kesimpulan**

Gejolak situasi konflik di Afghanistan terus berlanjut meskipun Amerika Serikat dan sekutunya telah meninggalkan negara itu. Kini, Taliban yang telah berhasil mengambil alih Afghanistan harus bisa menghadapi dinamika transisi dari yang mengatur sebuah kelompok menjadi mengatur sebuah negara. Ancaman-ancaman yang diberikan oleh ISIS-K haruslah bisa diatasi dengan tidak menganggapnya remeh. Taliban harus bisa menyakinkan kepada masyarakatnya untuk percaya bahwa pemerintah bisa mengatasi dan menghentikan serangan dan ancaman yang ada. Selain itu, Taliban sendiri harus bisa menguatkan dan menjamin masing-masing anggotanya agar tidak membelot kepada ISIS-K yang selama ini terus terjadi akibat dari perbedaan pandangan politik. Dalam strategi perang, Taliban harus bisa mengalahkan taktik ISIS-K yang beraksi secara gerilya dan menguasai distrik pedesaan sebagai lokasi persembunyian. Jika dibutuhkan, Taliban juga bisa memulai untuk meminta bantuan negara lain untuk bekerjasama dalam memberantas aktivitas-aktivitas ISIS-K yang semakin meningkat. Bagaimanapun, selain menghadapi urusan luar negeri, Taliban juga harus bisa memastikan kondisi dalam negeri aman. Meminta bantuan kepada negara lain bisa jadi menjadi salah satu kesempatan bagi Taliban-Afghanistan untuk menjalin kerjasama dan membentuk kepercayaan dunia internasional terhadap kepemimpinan Taliban di Afghanistan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Associated Press, "Taliban raid suspected IS hideout after bombing in capital," AP News, <https://apnews.com/article/afghanistan-bombings-kabul-taliban-islamic-state-group-7e7533c5af5854d7555474b138461c8d>.
- BBC, "Afghanistan: Deadly attack hits Kunduz mosque during Friday prayers," BBC News, <https://www.bbc.com/news/world-asia-58842793>

- Dewi, Anisa “ISIS-K, Ancaman Serius Taliban di Afghanistan”, *CNN Indonesia*, Sept 30, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210930091433-113-701359/isis-k-ancaman-serius-taliban-di-afghanistan>
- Fitriani, Amelia “ISIS-K, Musuk Bebuyutan dan Ancaman Terbesar Taliban di Afghanistan”, *Republik Merdeka*, Aug 26, 2021, <https://dunia.rmol.id/read/2021/08/26/501924/isis-k-musuh-bebuyutan-dan-ancaman-terbesar-taliban-di-afghanistan>
- Gonzales, Richard “U.S Official Confirm Death of Senior ISIS Leader in Afghanistan and Pakistan,” *NPR*, 2016 <https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/08/12/489830363/u-s-officials-confirm-death-of-senior-isis-leader-in-afghanistan-and-pakistan>
- L. Fisher dan Squires, N, “Taliban declare China their closest ally,” *The Telegraph*, 2021. diakses pada 14 Desember 2021 <https://www.telegraph.co.uk/politics/2021/09/02/taliban-calls-china-principal-partner-international-community/>
- Lobel, Oved “The Taliban are losing the fight against Islamic State,” *ASPI*, <https://www.aspistrategist.org.au/the-taliban-are-losing-the-fight-against-islamic-state/>
- Mastrangelo, Dominick “Taliban: ISIS-K Cell destroyed after bombing mosque,” *The Hill*, <https://thehill.com/homenews/575118-taliban-isis-k-cell-destroyed-after-mosque-bombing?rl=1>
- Mir, Asfandyar “The ISIS-K Resurgence,” *Wilson Center*, 2021.
- Paybarah, Azi “What is the Islamic State Khorasan, a.k.a ISIS-K?,” *New York Times*, 2021 <https://www.nytimes.com/2021/08/27/world/asia/who-isis-k-afghanistan.html>
- Reuters, “Moscow invites Taliban to Afghanistan talks on Oct.20,” *Reuters*, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/moscow-host-afghanistan-talks-oct-20-2021-10-07/>
- Tarzi, Amin “Islamic State-Khorasan Province,” dalam *The Future of ISIS, Regional and International Implications*, ed. Feisal al-Istrabadi dan Sumit Ganguly (Washington, D.C.:Brookings Institution Press, 2018)
- U.S Department of State, “Taking Actions Against ISIS-K,” *Press Statement*, 2021 <https://www.state.gov/taking-action-against-isis-k/>
- Yousaf, Farooq dan Moheb Jabarkhail, “US withdrawal and the Taliban regime in Afghanistan: Future policy directions,” *Policy Brief* 5/2021.

# **Self-Destructive Conflict: Hubungan Aljazair-Maroko Dalam Kontestasi Pengaruh di Wilayah Magreb**

Amy Jesscia Pakpahan, Diya Meiliza Putri

## ***Abstract***

*The relationship between Algeria and Morocco is the worst form of self-destructive conflict in this century. The combination of past wounds, territorial disputes and arms races has worsened relations between the two, resulting in millions of victims before and after the two countries officially achieved independence. This kind of relationship makes the conflictual situation between the two more heated. Close relations with different camps in the cold war era also added to the sentiments of Algeria and Morocco to suspect each other. Efforts for peace also do not help much due to the egoism of each country to exercise its influence in the regional order. This condition is further exacerbated by the involvement of the military to bring the two countries into an arm race. In addition, the involvement of separatist groups in the midst of conflict is an obstacle to the creation of peace between the two.*

**Keywords:** *Territorial Disputes, Western Sahara, Arms Race, Separatist Groups*

## **Abstrak**

Hubungan antara Aljazair-Maroko merupakan bentuk *self-destructive conflict* terburuk abad ini. Kombinasi luka masa lalu, sengketa wilayah hingga perlombaan senjata telah memperburuk relasi keduanya hingga mengakibatkan jutaan korban pra dan pasca kedua negara resmi mencapai kemerdekaan. Relasi yang demikian ini membuat situasi konflikual antara keduanya semakin memanas. Hubungan kedekatan dengan kubu yang berbeda di era perang dingin juga menambah sentimen Aljazair dan Maroko untuk saling mencurigai satu sama lain. Usaha untuk perdamaian juga tidak banyak membantu akibat egoisme masing-masing negara untuk melancarkan pengaruhnya di tatanan regional. Kondisinya ini semakin diperparah dengan keterlibatan militer hingga membawa kedua negara ke dalam *arm race*. Selain itu, keterlibatan kelompok separatis ditengah konflik menjadi penghambat terciptanya perdamaian diantara keduanya.

**Kata Kunci:** Sengketa Wilayah, Sahara Barat, Perlombaan Senjata, Kelompok Separatis

## **Pendahuluan**

Konflik Aljazair-Maroko diilhami sebagai kontestasi natural dalam memperebutkan dominasi regional, terkhusus di Kawasan Magreb. Dengan ukuran wilayah dan populasi yang lebih besar dibanding negara Magreb lainnya, kedua negara memiliki kapabilitas untuk menjadi hegemon. Melihat dari eksistensi ekonomi, sosial, dan politik kedua negara masing-masing menyajikan keunggulan yang dianalisis melalui kacamata hubungan internasional. Kemunculan

konflik disebabkan oleh banyak faktor yang saling tumpang-tindih antara satu sama lain yang membawa keduanya memasuki eskalasi konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Konflik yang terjadi di Maroko merupakan konflik pemberontakan rakyat sipil bukan konflik sengketa wilayah. Faktanya, pernyataan tersebut sulit untuk dipahami karena kasus ini merupakan sebuah perebutan sengketa kekuasaan wilayah. Meskipun Aljazair dan Maroko mengungkapkan berkeinginan untuk mengembangkan kerjasama yang lebih besar. Namun, isu Sahara Barat terus menjadi penghambat peluang kedamaian yang lebih nyata. Maroko dan Aljazair memiliki kondisi hubungan yang relatif stabil dengan adanya pemerintahan yang terpusat, dengan militer dan badan intelijen elit yang kuat. Kuatnya perselisihan dalam perebutan wilayah Sahara Barat membuat kedua negara selalu berada dalam kondisi dilema yang berkepanjangan. Persaingan yang terjadi antar negara dapat dilihat dari kondisi politik, ekonomi dan juga kondisi sosial mereka. Setelah merdeka dari Prancis dan Spanyol, Maroko dan Aljazair memiliki sudut kepentingan dan orientasi yang berbeda dalam menyebarkan paham pengaruhnya, Maroko lebih condong kebarat, sedangkan Aljazair sebaliknya, ke blok timur.

Isu Sahara Barat telah menjadi sarana negosiasi dalam hubungan antara Aljazair dan Maroko selama beberapa dekade. Maroko terus melihat Aljazair sebagai sekutu separatistis. Aljazair melihat masalah ini sebagai masalah dekolonisasi sambil mempertahankan dukungan diplomatik dan militer untuk Front Polisario. Sampai saat ini, kedua ibu kota mampu mengelola perbedaan, tetapi sekarang realitas sejarah dan geopolitik lainnya membentuk eskalasi baru ini.

Sejak zaman mantan Presiden Houari Boumédiène, perhatian dan kepedulian terhadap Maroko telah membentuk persepsi kelas politik Aljazair. Kewaspadaan otoritas Aljazair terhadap tetangga barat mereka berasal dari sentimen nasional antara kedua negara setelah Perang Pasir (*Sand War*) tahun 1963. Presiden Abdelmajid Teboon dan militer dari Aljazair telah berulang kali menekankan memori konflik. Penyelesaian diplomatik Maroko dengan Aljazair semakin diperumit oleh rekonsiliasi baru-baru ini antara Maroko dan Israel. Oleh karena itu, situasi antara Aljazair dan Maroko merupakan hasil dari serangkaian langkah kecil menuju krisis.

Menanggapi keberagaman krisis yang hadir diantara relasi Aljazair-Maroko, penulis akan melihat dari sudut pandang *balance of power* untuk menganalisis *security dilemma* yang dihadapi oleh kedua negara. Aljazair dan Maroko telah terlibat dalam eskalasi *self-destructive conflict* terparah sejak pertengahan abad 20 dimana sumber daya yang digunakan untuk membiayai “perang” melawan rivalnya disokong oleh cadangan minyak dan gas yang melimpah di wilayah

tersebut. Ironisnya, indeks kesejahteraan masyarakat di kedua negara berada di angka yang cukup rendah meski memiliki cadangan gas dan minyak yang mumpuni. Keadaan ini membawa konfigurasi supremasi regional sebagai tujuan utama dari rivalitas tersebut. Melihat keadaan dimana terror dan kecurigaan negara satu sama lain mengguncang stabilitas geopolitik di Kawasan kembali menimbulkan pertanyaan. Apakah keadaan ini akan berlangsung lebih lama dari sebelumnya? Atau adakah langkah strategis keduanya untuk mencapai kesepakatan?

### **Sejarah Konflik Aljazair-Maroko**

Perseteruan Aljazair-Maroko tidak terlepas dari keterlibatan Prancis dalam invasinya ke wilayah-wilayah Afrika. Kolonial Prancis yang didorong untuk memperluas pengaruh dan eksplorasi sumber daya alam membuat Maroko dan Aljazair yang bersinggungan langsung dengan dataran Eropa tidak terlepas dari incaran negara tersebut. Dimulai dari Aljazair, Prancis kemudian melanjutkan invasinya ke wilayah Maroko dengan menggunakan kombinasi diplomasi dan militeristik.

Penjajahan Prancis terhadap Aljazair di masa lalu telah merestrukturisasi corak perilaku pemerintahan Aljazair yang sebelumnya dikuasai oleh kekuatan Islam. Di tahun 1830, Prancis masuk ke dalam wilayah Aljazair setelah memblokir negara tersebut 3 tahun sebelumnya. Prancis pada awalnya tidak berniat untuk menganeksasi seluruh wilayah Aljazair namun pada 1837 Prancis memutuskan untuk mengambil seluruh wilayah di bawah kekuasaannya<sup>32</sup>. Prancis membentuk pemerintahan “*second republic*” dengan menetapkan berbagai peraturan yang mendiskriminasi warga local serta mengakui legalitas sejumlah wilayah Aljazair kedalam wilayah integral Prancis.

Memasuki babak baru perluasan wilayah dan pengaruh Eropa, Prancis mulai melirik Maroko yang saat itu berhadapan dengan Spanyol. Maroko merupakan wilayah di Kawasan Afrika Utara yang masih menggunakan sistem monarki absolut dengan menempatkan sultan sebagai pemimpin tertinggi. Konflik militer muncul atas keterlibatan Maroko yang mengizinkan pemimpin nasional Aljazair, Abd el Qadir, untuk berlindung dari serangan Prancis. Perlawanan ini terus berlangsung hingga Prancis menyerang Maroko pada 1844. Pelabuhan di Magrib barat dibombardir oleh serangan angkatan laut yang terkoordinasikan oleh operasi darat Aljazair. Pertempuran ini akhirnya berhenti ketika Inggris mendukung pemerintahan maroko saat itu.

---

<sup>32</sup> Alf Andreq Heggoy, “Colonial Origins of the Algerian-Moroccan Border Conflict of October 1963,” *African Security Review* 13, no. 1 (1970): 17–22.



Di masa kepemimpinan sultan Abd Al-Aziz, relasi Maroko dengan Eropa terjalin erat dimana kebijakan Eropa diadopsi di negaranya. Hal ini menyebabkan pemberontakan dari suku-suku lokal yang tidak menyetujui perubahan gaya dan perilaku yang bersinggungan dengan Islam. Pemberontakan ini menjadi celah bagi Eropa untuk memperluas pengaruhnya setelah membagi-bagi wilayah kekuasaan Afrika atas berbagai kesepakatan. Prancis mendapatkan wilayah Maroko atas persetujuan dari Inggris dimana Kawasan utara maroko dikuasai oleh Spanyol<sup>33</sup>. Setelah membereskan berbagai urusan pembagian wilayah, perwakilan maroko dipanggil ke Algericas, Spanyol untuk membicarakan kesepakatan lebih lanjut. Perjanjian Algericas mengatur wilayah integritas sultan tetapi mengizinkan Prancis dan Spanyol mengawasi pelabuhan-pelabuhan Maroko dan mengumpulkan iuran bea cukai.

Pada tahun 1886, Prancis memulai rencana besar untuk membangun jalur kereta yang menghubungkan seluruh wilayah kekuasaan Prancis di sekitar Sahara. Keberadaan Prancis di wilayah Maroko menyebabkan berbagai pemberontakan yang pada akhirnya membawa Maroko menjadi wilayah protektorat Prancis setelah ditandatanganinya “Treaty of Fez”. Ketika protektorat ini didirikan, Prancis menggambar batas baru antara wilayah Aljazair-Maroko dimana Teniet Sassi selatan ke Figuig tetap menjadi wilayah Maroko sementara Tidikelt dan Gouara diberikan kepada Aljazair.

Selanjutnya, delimitasi kembali terbentuk di tahun 1934 dibawah kontrol Prancis atau yang disebut dengan “Trinquet Line”. Pengaturan ini membagi batas wilayah Maroko-Aljazair yang kembali diubah dari kebijakan sebelumnya. Perjanjian 1904 dan 1912 mengesahkan wilayah Tindouf untuk menjadi bagian dari Aljazair tanpa melibatkan Maroko yang berwenang atas wilayah tersebut. Pasca merdeka, tensi di antara keduanya terus meningkat. Perselisihan ini dimulai dengan sengketa area Sahara yaitu wilayah Basyar dan Tindouf yang diatur di masa kolonial Prancis. Terlebih wilayah yang disengketakan ditemukan cadangan minyak yang sangat besar. Situasi ini membawa Aljazair dan Maroko kepada klaim atas wilayah tersebut. Pemerintah Aljazair mengklaim area ini berdasarkan pada kebijakan yang disahkan di masa kolonial Prancis, sementara Maroko berargumen pada keadaan wilayah sebelum adanya intrupsi dari pihak Eropa.

Kedua negara berkeras untuk mempertahankan klaim masing-masing hingga membawa situasi ini kearah yang lebih konfliktual. Rabat dan Aljir terpaksa menggunakan kekuatan militer sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Tensi terus meningkat hingga puncaknya pada 1963

---

<sup>33</sup> Alf Andreq Heggoy: 17-22

meletus perang antara keduanya. *Sand war* atau perang pasir merupakan tragedi sengketa wilayah yang terjadi pasca 18 bulan Aljazair merdeka setelah intervensi Liga Arab dan Organisasi Persatuan Afrika. Peristiwa tersebut memberikan dampak yang besar terhadap keberlangsungan hubungan kedua negara terlebih pada 1975 penarikan pasukan kolonial Spanyol dari wilayah Sahara Barat<sup>34</sup>. Aljazair secara terbuka mengumumkan dukungannya untuk *Popular Front for the Liberation of Saguia El Hamra and Oued Eddahab* (Polisario). Pecahnya bentrok perbatasan di tahun 1976 dengan pengakuan Aljazair atas Republik Demokratik Arab Sahrawi semakin meningkatkan tensi diantara keduanya.

### **Meningkatnya Tensi Aljazair dan Maroko**

Selain faktor sejarah, perbedaan geopolitik utama juga berkontribusi pada situasi saat ini. Meningkatnya tensi kedua negara disoroti dengan keputusan Aljazair untuk memutus hubungan diplomatiknya dengan tetangganya, Maroko di musim panas 2021. Keputusan ini tidak mengejutkan karena tampaknya kedua negara, terkhusus Aljazair menunjukkan tanda-tanda ketidakharmonisan dengan Maroko. Pada 22 Agustus 2020, Penandatanganan perjanjian normalisasi hubungan Israel-Maroko mendapat sambutan dari Amerika Serikat dan memberikan kedaulatan atas Sahara Barat kepada pihak Maroko.<sup>35</sup> Aljazair dengan pandangan historikal islam yang mendukung Palestina menyatakan bahwa langkah ini akan merusak stabilitas di Kawasan Magreb. Keadaan ini mengundang keprihatinan Israel melalui pernyataannya terhadap relasi Aljazair-Iran yang terjalin semakin erat.

Aljazair dan Maroko menghadapi masalah yang sama dengan kelompok separatisme yakni Polisario yang menentang kedaulatan Maroko serta Kabyle yang menentang kekuasaan Aljazair. sebelumnya, kelompok separatisme ini juga berperan besar dalam merusak relasi di antara keduanya dimana pada perang saudara Aljazair 1990-an, Maroko dinilai mendukung milisi pemberontak untuk membalas Aljazair setelah wilayah diakuisisi oleh kedaulatan Aljazair. Di November 2020, Maroko melakukan infasi militernya di Guerguerat (buffer zone Sahara Barat dan Mauritania) untuk mengusir Polisario dari wilayah tersebut dan adanya campur tangan dari Aljazair menjadi pemicu ketegangan diantara konflik internal tersebut. tampaknya kedua negara menggunakan kekuatan separtis ini untuk saling menuduh satu sama lain.<sup>36</sup> Di sisi lain, pada Juli

---

<sup>34</sup> Arab Center for Research & Policy Studies, "Algeria's Decision to Cut Diplomatic Relations with Morocco," 2021.

<sup>35</sup> Yasmine Akrimi, "Algeria-Morocco Tensions : A Costly Conflict," *Rethinking Security in The 2020s Series-Analysis Brussels International Center*, 2021.

<sup>36</sup> Studies, "Algeria's Decision to Cut Diplomatic Relations with Morocco."

2021 dalam pertemuan Non-Aligned Movement (NAM) di New York, Maroko menyatakan akan mendukung kelompok Kabyle sebagai reaksi atas dukungan Aljazair terhadap kelompok Polisario.

Masuknya Israel dalam Kawasan Magreb mengundang ketidaksepakatan dari Aljazair, dimana Israel akhirnya menjadi observer di Uni Afrika dan menuduh Maroko sebagai aktor dibalik kampanye Israel untuk masuk ke organisasi tersebut. Berdasarkan hal itu, Aljazair kembali mempertimbangkan hubungannya dengan Maroko dimana munculnya kebakaran di bagian utara negara tersebut pada pertengahan Agustus 2021, terkhusus di wilayah Kabylia merupakan dukungan dari Maroko. Puncak dari ketegangan ini adalah pemutusan hubungan diplomatiknya dengan Maroko pada 24 Agustus 2021. Keadaan ini semakin memanas ketika Aljazair menutup wilayah udaranya untuk semua pesawat baik pesawat sipil dan militer Maroko yang terdaftar di Maroko.<sup>37</sup> Penerbangan komersial langsung antar kedua negara belum dilanjutkan sejak keputusan tersebut.

Aljazair juga menuduh Maroko dan Israel mendukung MAK (Gerakan untuk Penentuan Nasib Sendiri Kabylia), sebuah organisasi pro-kemerdekaan, serta organisasi Islamo-konservatif Rachad, dua gerakan yang diklasifikasikan sebagai "organisasi teroris" oleh Aljazair.<sup>38</sup> Pada 1 November, Aljazair memutus pasokan gas ke Maroko melalui pipa Maghreb di Eropa. Ini terjadi setelah berminggu-minggu ketidakpastian ketika Aljazair mengambil langkah-langkah mendasar seperti pelarangan wilayah udaranya dilintasi oleh pesawat Maroko. Maroko berpendapat bahwa keputusan seperti itu tidak mempengaruhi Maroko, tetapi itu adalah tanda perjuangan berkelanjutan untuk hegemoni regional. Baik Aljazair dan Maroko tidak siap untuk menyerah karena mereka memiliki dua visi yang berbeda dan berpotensi bertentangan untuk Afrika Utara. Aljazair melihat kawasan itu hanya melalui sejarah dan perjuangan anti-kolonialnya, tetapi Maroko membela agenda liberal dan non-tradisional dengan cara yang benar-benar politis. Sekutu, strategi, dan eskalasi Aljazair dan Maroko dengan jelas menandai dimulainya Perang Dingin di wilayah tersebut.

### **Eskalasi Konflik Aljazair-Maroko**

Dalam kasus Aljazair dan Maroko, titik kontroversi utama adalah masalah Sahara, yaitu penjajahan. Tema ini telah membentuk hubungan dan arah politik luar negeri kedua negara selama

---

<sup>37</sup> Africa News "Algeria Announces Closure of Airspace to Morocco," *Africanews*, March 23, 2021, <https://www.africanews.com/2021/09/23/algeria-announces-closure-of-airspace-to-morocco-over-diplomatic-row/>.

<sup>38</sup> Africa News

40 tahun terakhir. Perbatasan antara keduanya ditutup pada tahun 1976, dibuka kembali pada tahun 1988, dan ditutup kembali pada tahun 1994. Sejak itu, ketegangan politik meningkat antara keduanya, terutama selama lima tahun terakhir. Konflik memuncak pada Oktober 2017 ketika Maroko memanggil duta besar Aljazair untuk Maroko selama beberapa minggu, percaya bahwa itu menghina pernyataan Menteri Luar Negeri Aljazair Abdel Khader Mesahel. Beberapa bulan kemudian, pada Januari 2018, bentrokan antara Front Polisario dan Rabat di wilayah tak bersenjata Sahara, Gergerat, kembali menimbulkan ketegangan dalam hubungan antara Aljazair dan Maroko. Butuh waktu berminggu-minggu untuk meredakan ketegangan, dan baru muncul di benak pada April 2018 ketika laporan Maroko mengancam intervensi militer di Front Polisario jika tidak mengevakuasi zona demiliterisasi Front Polisario muncul. Meningkat ke kemungkinan konflik dengan Aljazair.<sup>39</sup>

Kedua belah pihak akhirnya memutuskan untuk menentang eskalasi dan Polisario mundur. Namun tak lama kemudian, konflik baru muncul antara Aljazair dan Maroko. Ini adalah perselisihan tentang Timur Tengah. Ketika permusuhan antara Arab Saudi dan Arab meningkat, pendekatan Aljazair ke Teheran dan pendekatan Maroko ke Riyadh menjadi sumber ketegangan lainnya. Misalnya, Maroko telah setuju untuk bergabung dengan Penanggulangan Militer Islam (IMCTC) yang didirikan oleh Arab Saudi, tetapi Aljazair secara terbuka menolak. Dalam hal ini, Rabat menuduh Iran dan Hizbullah menyediakan rudal yang didukung Aljazair ke Polisario pada Mei 2018, yang dibantah Aljazair.<sup>40</sup> Aljazair menanggapi dengan latihan militer besar pada paruh pertama tahun 2018, termasuk latihan militer Toufane 2018 (atau Déluge 2018) pada bulan Mei di Oran, Aljazair barat. Ini adalah latihan militer terbesar dalam sejarah kemerdekaan Aljazair dan menunjukkan yang terbaru. Namun, kedua negara tidak putus hubungan dan terus bekerja sama di beberapa bidang, termasuk perang melawan terorisme.

### **Perlombaan Senjata Hingga Kepentingan Aljazair-Maroko di Kawasan Magreb**

Tren pembelian alat militer global telah marak terjadi pada dekade 2000an, dimana semangat ini ditonjolkan oleh Amerika Serikat. Di wilayah Timur Tengah dan Afrika, keterkaitan sumber daya alam seperti minyak dan gas alam secara jelas telah diberdayaakan untuk memenuhi kebutuhan negara akan peralatan militer. Tujuan dari negara mempersenjatai dirinya dengan impor

---

<sup>39</sup> Nefis Khider, "Morocco Threatens Algeria with Intervention in Western Sahara," 2018, Middle East Eye, <https://www.middleeasteye.net/node/70056> diakses pada 18 Desember 2021

<sup>40</sup> Nadia Lamlili 2018, "Le Maroc rompt ses relations diplomatiques avec l'Iran," 2018, dalam Jeune Afrique, <https://www.jeuneafrique.com/556388/>

alat militer yang canggih adalah untuk memberikan efek jera terhadap kelompok separatis dan memperluas pengaruhnya di tatanan regional. Selama tahun 2000an, kombinasi antara harga minyak yang tinggi dengan maraknya eksploitasi di daerah Timur Tengah dan Afrika mendukung pendapatan yang tinggi terhadap pemerintahan. Terkait dengan hal itu, pembelian terhadap peralatan militer juga semakin meningkat disamping banyaknya muncul konflik-konflik internal.

Keadaan ini juga terjadi di Aljazair dan Maroko dimana dukungan terbesar dalam pembelanjaan alat militernya merupakan pengorbanan dari sumber daya alam yang dieksploitasi habis-habisan. Aljazair merupakan negara di Afrika Utara dengan belanja militer tertinggi dengan USD 5,2 Milyar di tahun 2008. Skema pembelanjaan ini dimulai pada perang saudara Aljazair dan terus berlangsung meskipun ketegangan telah memudar di tahun 2000an. Selain itu, Aljazair juga melakukan upaya modernisasi militernya dengan kontrak importir Bersama Rusia (terbesar), disamping Tiongkok, Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa. Motivasi ini diprakasai oleh tiga faktor diantaranya; Sebagai respon atas ancaman dari kelompok Islam separatis dan pemberontak, Mendorong pengaruh Aljazair di internasional dan mencapai supremasi regional terutama atas Maroko, dan upaya pemerintah Aljazair untuk menenangkan militer yang mana memiliki pengaruh besar dalam perpolitikan Aljazair.<sup>41</sup> Militer Aljazair memiliki relasi kuat dengan partai penguasa Aljazair, the National Liberation Front (FLN), yang dituangkan dalam bentuk ideologi populis.<sup>42</sup>

Maroko yang lebih condong mendekati diri ke kekuatan Amerika Serikat beserta Israel mendapatkan dukungan dari sekutunya tersebut. Strategi Rabat mencakup rencana untuk membeli sistem pertahanan Iron Dome Israel dan versi lanjutan dari sistem pertahanan Patriot AS, untuk melindungi situs-situs strategis di negara itu, termasuk lokasi sipil dan militer yang sensitif, dari serangan roket, rudal, dan drone, di selatan dan tenggara Maroko.<sup>43</sup> Maroko juga termasuk dalam daftar negara yang meminta akuisisi sistem anti-drone “Skylock Dome” milik Israel yang mampu untuk menghalau misil SAM-6 dan SAM-7. Hubungan yang demikian erat antara Amerika dan Israel telah menguntungkan Maroko dalam pembelian alat-alat militer, terbukti dengan Maroko yang menjadi pembeli terbesar untuk persenjataan buatan Amerika Serikat di Afrika.

---

<sup>41</sup> Sam Perlo-Freeman dan Jennifer Brauner, “Natural Resources and Military Expenditure: The Case of Algeria,” *The Economics of Peace and Security Journal* 7, no. 1 (2012), doi:10.15355/epsj.7.1.15.

<sup>42</sup> Sam Perlo-Freeman dan Jennifer Brauner

<sup>43</sup> AW, “Escalation in Western Sahara Sparks Arms Race between Morocco, Algeria,” *The Arab Weekly*, November 24, 2021, <https://theArabweekly.com/escalation-western-sahara-sparks-arms-race-between-morocco-algeria>.

Pada tahun 2011–2015 dan 2016–2020 impor senjata utama oleh negara-negara Afrika menurun 13 persen. Namun performa pembelian senjata Aljazair tetap menjadi yang tertinggi dibanding negara-negara Afrika lainnya. Pada 2016–2020, tiga importir senjata terbesar di Afrika adalah Aljazair 4,3% dari impor senjata global, Maroko 0,9% dan Angola 0,5%. SIPRI telah mengidentifikasi 164 negara bagian sebagai importir senjata utama pada 2016–2020. Lima importir senjata teratas—Arab Saudi, India, Mesir, Australia, dan Tiongkok menerima 36 persen dari total impor senjata pada 2016–20. Dari kelima negara tersebut hanya Mesir yang tidak termasuk dalam lima importir teratas pada tahun 2011–15. Di tingkat regional, Asia dan Oseania menyumbang 42 persen persen impor senjata pada 2016–2020, diikuti oleh Timur Tengah 33 %, Eropa 12 %, Afrika 7,3 % dan Amerika 5,4 %.

Secara bersama-sama, impor senjata dari rival regional Aljazair dan Maroko menyumbang 70% dari total impor senjata utama Afrika pada 2016–2020. Impor senjata Aljazair 64% lebih tinggi pada 2016–2020 daripada 2011–2015, menjadikannya importir senjata terbesar keenam di dunia. Rusia tetap menjadi pemasok senjata terbesar ke Aljazair pada 2016–2020. Pengiriman senjata Rusia termasuk 16 pesawat tempur, 42 helikopter tempur dan 2 kapal selam. Terkenal lainnya pengiriman ke Aljazair termasuk 2 fregat dari Jerman dan 2 fregat dari Tiongkok. Impor senjata oleh Maroko turun 60% antara 2011–2015 dan 2016–2020. AS memasok 90% impor senjata Maroko pada 2016–2020.

Badan Perdagangan Internasional AS (ITA) melaporkan bahwa penjualan peralatan militer ke Maroko meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun 2020, tumbuh dari \$4,01 miliar (MAD 36 miliar) menjadi \$8,5 miliar (MAD 76 miliar).<sup>44</sup> Pada akhir tahun 2020 beberapa pengiriman senjata besar ke Maroko tetap luar biasa, termasuk untuk 24 pesawat tempur dan 24 helikopter tempur dari Amerika Serikat. Impor senjata Maroko kemungkinan akan meningkat secara signifikan dalam lima tahun mendatang jika pesanan ini dilaksanakan sesuai rencana.<sup>45</sup> Sementara Aljazair juga memiliki persenjataan yang canggih yang sebagian besar diperoleh dari masa Uni Soviet dan Rusia. Pembelian ini meliputi kendaraan lapis baja Main Battle Tank T-90S, Infantry BMP-2M, Anti-Tank Guns SU-100, Satelit Observasi, Rudal Jarak Menengah dan lain-lain.

---

<sup>44</sup> Toms Dumpis, "US Military Sales to Morocco Doubled in 2020," *Morocco World News*, January 21, 2021, <https://www.moroccoworldnews.com/2021/01/332729/us-military-sales-to-morocco-doubled-in-2020>.

<sup>45</sup> Wezeman, Kuimova, Wezeman, 2020, *Trends in international arms transfers 2020*, [https://sipri.org/sites/default/files/2021-03/fs\\_2103\\_at\\_2020.pdf?ltclid=](https://sipri.org/sites/default/files/2021-03/fs_2103_at_2020.pdf?ltclid=) diakses pada 19 Desember 2021

Menyoroti perilaku pembelian senjata yang cukup ambisius, kedua negara bertujuan untuk mencapai supremasi regional atas Kawasan Magreb. Aljazair telah berambisi untuk menguasai Sahara Barat agar akses menuju Samudra Atlantik menjadi lebih mudah. Sementara Maroko berambisi untuk melampaui gagasan “Greater Morocco” dengan penggabungan Sahara Barat dalam wilayah integritasnya.<sup>46</sup> Dengan pengembangan sumber daya alam yang dimiliki Sahara Barat, Maroko dapat mencapai pembangunan yang lebih besar untuk wilayah tersebut serta memajukan populasi Sahrawi. Sementara pembiayaan pembelian alat militer kedua negara disokong oleh sumber daya alam yang melimpah yakni Aljazair dengan minyak dan Maroko dengan mineralnya. Meskipun begitu agenda kepentingan utama terlihat samar karena banyaknya propaganda dan kecurigaan masing-masing negara antara satu sama lain.

### **Pengaruh Rivalitas Aljazair-Maroko Terhadap Kawasan Magreb**

Regional Afrika Utara tampaknya telah memasuki periode baru ketegangan geopolitik yang berisiko tinggi. Bentrokan baru-baru ini antara Aljazair dan Maroko adalah ekspresi persaingan kuno yang tidak bisa lagi diabaikan. Ketegangan antara Aljazair dan Maroko telah mencapai batas diplomatik dalam beberapa bulan terakhir. Setelah beberapa insiden politik, situasinya sekarang dalam tahap ekspansi militer. Masing-masing dari kedua negara terus mencari cara untuk memposisikan diri sebagai pemimpin regional.

Dengan Aljazair dan Maroko sebagai saingan untuk dominasi regional, kedua negara berusaha untuk mendapatkan pengaruh melawan Libya, tetapi dengan perubahan baru-baru ini dalam pemerintahan di Tripoli, ada peluang lebih besar untuk menggunakan kepemimpinan di wilayah tersebut untuk mengurangi posisi Libya dan menjadi kekuatan yang lebih kuat di Maghreb.<sup>47</sup> Di sisi yang lain, dengan Tunisia dalam masa transisi dan Mauritania dianggap sebagai negara yang lebih lemah secara komparatif, ini memungkinkan keduanya untuk terlibat dalam tantangan langsung satu sama lain di kawasan dan di luar negeri.<sup>48</sup> Aljazair terus mencari cara untuk menentang Maroko secara politik maupun ekonomi. Perilaku Aljazair tersebut telah berhasil membawa keduanya kedalam panggung internasional yang mana hasilnya dapat memperkuat sekaligus melemahkan posisi satu sama lain.

---

<sup>46</sup> Michael D. Jacobs, “Hegemonic Rivalry in the Maghreb: Algeria and Morocco in the Western Sahara Conflict,” *Graduate School Theses and Dissertations* (University of South Florida, 2012), <http://scholarcommons.usf.edu/etd/4086>.

<sup>47</sup> Jacobs

<sup>48</sup> jacobs

Afrika merupakan Kawasan yang cenderung melakukan regionalisasi dalam kelompok dan Kawasan Magreb dengan rivalitas Aljazair-Maroko telah cukup berhasil memperjelas agenda Aljazair dalam melawan tetangganya. Meskipun begitu, Maroko yang telah mendapatkan keuntungan dari dukungan internasional yang lebih besar terhadapnya hingga membuat Aljazair terpaksa bekerja di belakang layar untuk melemahkan tetangganya. Maroko terus mendapat untung dari transaksinya di luar negeri namun selama perbatasan tetap tidak pasti, Maroko akan terus merasakan tekanan dari organisasi dan perusahaan luar dalam pembuatan kontrak maupun mengambil keuntungan dari wilayah Sahara Barat.<sup>49</sup>

Kedua negara ini saling berjuang untuk dilihat sebagai pemain utama di Magreb. Aljazair terus mempertegas upaya untuk melemahkan Maroko di kawasan namun dengan strategi dukungannya terhadap Polisario yang masih samar tampaknya situasinya akan berbalik dan Aljazair terpaksa menerima posisi Maroko di Sahara Barat. Aljazair juga harus menghadapi kekuatan yang lebih besar dari dukungan terhadap Maroko. Sejak Maroko menjadi lebih penting bagi AS, itu menciptakan tingkat persaingan baru antara kedua belah pihak dalam upaya mereka untuk memposisikan masing-masing sebagai negara yang lebih diinginkan di kawasan itu.<sup>50</sup> Dukungan Amerika terhadap Maroko juga direalisasikan dalam bentuk rasionalisasi proposal otonomi Sahara Barat. Aljazair yang merasa dirinya tersudutkan oleh Barat mengambil langkah untuk bergerak di Uni Afrika sampai batas negosiasi di PBB.

Kebijakan luar negeri Aljazair dapat dianggap egois (dari sudut pandang Maroko), dan negara tersebut dapat menyebabkan ketegangan yang cukup besar dengan saingannya Maroko. Tetapi jika pihak berwenang Aljazair dan Maroko dibujuk untuk menyelesaikan konflik mereka secara damai, perang total masih bisa dihindari. Ketidakstabilan regional yang disebabkan oleh ketegangan ini bisa bersifat permanen. Setelah bertahun-tahun pemeliharaan, Perang Dingin pecah dan dapat menyebabkan konflik militer jika masyarakat internasional dan kedua negara tidak menanganinya. Sejauh ini, Aljazair hanya memobilisasi korps diplomatik karena ekspansi militer mahal dan tidak populer secara politik. Namun, itu tidak boleh dibaca sebagai tanda ketidakmampuan Aljazair atau penerimaan tanpa syarat saat ini, karena agresi militer di kawasan itu dapat berubah dengan cepat.

---

<sup>49</sup> Jacobs

<sup>50</sup> Jacobs



Partisipasi aktif organisasi internasional diperlukan untuk mengatasi akar penyebab konflik, termasuk konflik Sahara Barat. Pada saat yang sama, netralitas Aljazair dan mitra internasional Maroko (termasuk Eropa dan Amerika Serikat) penting untuk memastikan stabilitas. Baik di tingkat resmi maupun publik, orang Aljazair mengeksplorasi batas-batas hubungan mereka dengan Maroko. Ini adalah bagian dari proses nasional yang lebih luas untuk mengubah sistem politik dan masyarakat Aljazair. Ini adalah proses penentuan masa depan dan batas kerja sama di Afrika Utara. Pengejaran hegemoni regional memang mengkhawatirkan, namun persaingan ini tidak serta merta berujung pada konflik terbuka.

### **Kesimpulan**

Ketegangan historis, perselisihan perbatasan, dan pilihan regional akan terus mengatur sifat hubungan Maroko-Aljazair, seperti yang telah terjadi selama beberapa dekade. Tetapi permusuhan yang terus berlanjut juga tidak terhindarkan. Kedua negara bertetangga ini memiliki banyak kesamaan kepentingan dan kesamaan, yang dapat dibangun untuk menuju hubungan yang lebih positif. Tujuan melemahkan yang dibangun oleh kedua negara telah mempengaruhi eskalasi geopolitik di wilayah Magreb. Perilaku ini juga dibawa hingga kompetisi yang lebih besar agar dilihat sebagai pemain utama di Kawasan. Munculnya dukungan internasional terhadap Maroko juga mempersulit Aljazair untuk melancarkan agenda politiknya sehingga diperlukan adanya netralitas dalam memaknai kepentingan konflik yang telah merusak seluruh potensi pemanfaatan sumber daya alam sendiri. Sehingga, untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan ini membutuhkan perubahan radikal dalam pendekatan kedua negara terhadap beberapa masalah yang disebutkan di atas, berdasarkan pilihan strategis yang mendukung hubungan persaudaraan mereka daripada masalah-masalah kontroversial ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Akrimi, Yasmine. "Algeria-Morocco Tensions : A Costly Conflict." *Rethinking Security in The 2020s Series-Analysis Brussels International Center*, 2021.

"Algeria Announces Closure of Airspace to Morocco | Africanews." *Africanews*, March 23, 2021. <https://www.africanews.com/2021/09/23/algeria-announces-closure-of-airspace-to-morocco-over-diplomatic-row/>.

Dumpis, Toms. "US Military Sales to Morocco Doubled in 2020." *Morocco World News*, January 21, 2021. <https://www.morocoworldnews.com/2021/01/332729/us-military-sales-to-morocco-doubled-in-2020>.

- “Escalation in Western Sahara Sparks Arms Race between Morocco, Algeria | | AW.” *The Arab Weekly*, November 24, 2021. <https://thearabweekly.com/escalation-western-sahara-sparks-arms-race-between-morocco-algeria>.
- Heggoy, Alf Andreq. “Colonial Origins of the Algerian-Moroccan Border Conflict of October 1963.” *African Security Review* 13, no. 1 (1970): 17–22.
- Khider, Nefis, 2018, *Morocco Threatens Algeria with Intervention in Western Sahara*, in Middle East Eye, <https://www.middleeasteye.net/node/70056>
- Lamlili, Nadia, 2018, *Le Maroc rompt ses relations diplomatiques avec l’Iran*, in Jeune Afrique, <https://www.jeuneafrique.com/556388/>
- Jacobs, Michael D. “Hegemonic Rivalry in the Maghreb: Algeria and Morocco in the Western Sahara Conflict.” *Graduate School Theses and Dissertations*. University of South Florida, 2012. <http://scholarcommons.usf.edu/etd/4086>.
- Perlo-Freeman, Sam, and Jennifer Brauner. “Natural Resources and Military Expenditure: The Case of Algeria.” *The Economics of Peace and Security Journal* 7, no. 1 (2012). doi:10.15355/epsj.7.1.15.
- Pieter, Alexandra, Siemon, 2020, Trends in international arms transfers 2020, [https://sipri.org/sites/default/files/2021-03/fs\\_2103\\_at\\_2020.pdf?Itclid=](https://sipri.org/sites/default/files/2021-03/fs_2103_at_2020.pdf?Itclid=)
- Studies, Arab Center for Research & Policy. “Algeria’s Decision to Cut Diplomatic Relations with Morocco,” 2021.

# Konflik Sahara Barat: Intervensi Amerika Serikat Dalam Maroko dan Polisario Front

Rahmat Ilahi, Siti Zaimatun Nabila

## **Abstrack**

*This paper will analyze the impact of the US intervention recognizing Morocco's sovereignty over Western Sahara on the ongoing conflict in the region. In December 2020, the United States (US) recognized Morocco's sovereignty over all disputed territories in Western Sahara. The territory consists of 266,000 km<sup>2</sup> of land, of which 80% is controlled by Morocco. This region includes a coastal route along the Atlantic Ocean connecting Morocco and Mauritania. Western Sahara was previously a Spanish colony, but as a result of pressure from France, the United States and Britain, Spain left Western Sahara in 1975. When Spain left the territory, it divided the territory in part between Morocco and Mauritania. The Polisario Front which was founded in the struggle for the independence of Western Sahara is still ongoing after fighting Spain, Mauritania, and until now Morocco. The author finds that the US intervention in Western Sahara is an attempt to assert hegemony in the Middle East.*

**Keywords:** West Sahara. Morocco, Front Polisario, United States, Intervention

## **Abstrak**

Tulisan ini akan menganalisis dampak dari intervensi AS yang mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat terhadap konflik yang sedang berlanjut di kawasan tersebut. Pada Desember 2020, Amerika Serikat (AS) mengakui kedaulatan Maroko atas semua wilayah yang disengketakan di Sahara Barat. Wilayah tersebut terdiri dari 266.000 km<sup>2</sup> tanah, dimana 80% di antaranya dikendalikan oleh Maroko. Wilayah ini termasuk rute pantai di sepanjang Samudra Atlantik yang menghubungkan Maroko dan Mauritania. Sahara Barat sebelumnya merupakan daerah koloni Spanyol, namun setelah akibat dari tekanan dari Prancis, Amerika Serikat, dan Inggris, Spanyol meninggalkan Sahara Barat pada tahun 1975. Ketika Spanyol meninggalkan wilayah itu, ia membagi wilayah tersebut sebagian kepada Maroko dan Mauritania. Front Polisario yang didirikan dalam memperjuangkan kemerdekaan Sahara Barat masih berlangsung setelah melawan Spanyol, Mauritania, dan hingga saat ini Maroko. Penulis menemukan bahwa intervensi yang dilakukan AS di Sahara Barat adalah usahanya untuk menegaskan hegemoni di Timur Tengah.

**Kata Kunci:** Sahara Barat, Maroko, *Front Polisario*, Amerika Serikat, Intervensi

## **Pendahuluan**

Sahara Barat merupakan daerah yang terletak di pantai barat laut Afrika. Wilayah ini merupakan bekas koloni Spanyol dan dianeksasi oleh Maroko pada tahun 1975 dan 1979. Sejak saat itu, wilayah ini telah menjadi sengketa teritorial yang berlangsung lama antara Maroko dan penduduk asli, 'Sahrawi', yang dipimpin oleh Front Polisario. *Sahrawi Arab Democratic Republic*

(SADR), yang dideklarasikan oleh Front Polisario pada tahun 1976, sekarang diakui oleh banyak pemerintah dan merupakan anggota penuh dari Uni Afrika.<sup>51</sup> Konflik ini telah memicu banyak pertempuran antara kedua belah pihak. Keinginan Maroko untuk mengontrol wilayah tersebut dan Front Polisario yang ingin Sahara Barat harus menjadi negara merdeka menjadikan konflik ini masih berlanjut hingga sekarang. Saat ini, Maroko telah menguasai sebagian besar Sahara Barat termasuk pantai Atlantik.

Front Polisario (*Popular Front for the Liberation of Saguia el-Hamra and Rio de Oro*) merupakan organisasi politik-militer yang berjuang untuk mengakhiri kendali Maroko atas bekas wilayah Spanyol di Sahara Barat. Front Polisario dimulai pada Mei 1973 sebagai pemberontakan yang saat itu berbasis di Mauritania untuk melawan kontrol Spanyol di Sahara Barat. Setelah Spanyol mundur dari Sahara Barat, Maroko dan Mauritania membagi Sahara Barat pada tahun 1976. Saat itu, Front Polisario berpindah dan dibantu oleh Aljazair dalam membangun pangkalan dan bantuan militer di Aljazair. Pada 1979, Mauritania menandatangani perjanjian damai dengan Front Polisario, dan pada saat yang bersamaan Maroko melakukan aneksasi terhadap wilayah Mauritania di Sahara Barat secara sepihak.<sup>52</sup>

### ***Legal Status dan Situasi di Sahara Barat***

Sejak tahun 1963, Sahara Barat termasuk ke dalam daftar wilayah-wilayah *non-self-governing* PBB. *Non-self-governing* diatur dalam Bab XI Pasal 73 *UN Charter*, yang didefinisikan sebagai:

*“territories whose people have not yet attained a full measure of self government.”*<sup>53</sup>

Pasal ini menjelaskan tentang tanggung jawab dari anggota PBB dalam administrasi wilayah yang masyarakatnya belum mencapai standar pemerintahan sendiri. Pasal ini juga menegaskan pengakuan dari anggota PBB untuk memerhatikan kepentingan dan kesejahteraan penduduk menurut sistem perdamaian dan keamanan internasional. Berdasarkan pasal ini, Sahara Barat memiliki status terpisah yang berbeda dari wilayah negara yang mengelolanya. Sahara Barat

---

<sup>51</sup> “Geopolitical hotspot: Western Sahara - Geographical Magazine,” diakses 19 Januari 2022, <https://geographical.co.uk/geopolitics/hotspot/item/3978-geopolitical-hotspot-western-sahara>.

<sup>52</sup> Weinstein, Brian. “The Western Sahara.” *Current History* 78, no. 455 (1980): 110–37. <http://www.jstor.org/stable/45314816>.

<sup>53</sup> United Nations, “Chapter XI: Declaration Regarding Non-Self-Governing Territories (Articles 73-74) | United Nations,” diakses 8 Januari 2022, <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-11>.

menjalankan haknya untuk menentukan nasib sendiri sesuai dengan *UN Charter*, khususnya sesuai dengan tujuan dan prinsipnya. Dengan kata lain, Sahara Barat bukanlah wilayah yang disengketakan, tetapi wilayah yang sedang terjadi konflik dan masih bertujuan untuk menentukan batas-batasnya secara hukum internasional. Dikutip dari tulisan Fastenrath (2012) dari buku “*The Charter of the United Nations: A Commentary*”, ia menyatakan bahwa hanya Majelis Umum PBB yang dapat mengakui suatu wilayah sebagai wilayah yang tidak memiliki pemerintahan sendiri dan menunjuk kekuasaan administrasinya.<sup>54</sup>

**Gambar 1.** Peta Wilayah Sahara Barat<sup>55</sup>



Prinsip ini sesuai dengan Resolusi 1514 (XV) sebagaimana dinyatakan oleh Mahkamah Internasional tentang pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri oleh negara-negara jajahan.<sup>56</sup> Lebih lanjut, Mahkamah Internasional dalam Resolusi 1514 (XV) menyatakan bahwa:<sup>57</sup>

1. Ketundukan bangsa-bangsa pada penaklukan, dominasi dan eksploitasi asing merupakan pengingkaran terhadap hak asasi manusia yang mendasar, bertentangan dengan *UN Charter* dan merupakan halangan bagi misi perdamaian dan kerjasama dunia.

<sup>54</sup> Georg Nolte dan Albrecht Randelzhofer, “Action with Respect to Threats to the Peace , Breaches of the Peace, and Acts of Aggression, Article 51,” *The Charter of the United Nations: A Commentary II*, no. November 2012 (2012): 1397–1428.

<sup>55</sup> “Western Sahara summary | Britannica,” diakses 15 Januari 2022, <https://www.britannica.com/summary/Western-Sahara>.

<sup>56</sup> “OHCHR | Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples,” diakses 9 Januari 2022, <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Independence.aspx>.

<sup>57</sup> “OHCHR | Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples.”

2. Semua orang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri; berdasarkan hak itu mereka dapat dengan bebas menentukan status politik mereka dan mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka.
3. Kurangnya kesiapan politik, ekonomi, sosial atau pendidikan tidak menjadi alasan untuk menunda kemerdekaan.
4. Semua tindakan bersenjata atau tindakan represif harus dihentikan untuk memberikan hak kebebasan dan kehormatan bagi mereka yang ingin melakukan proses kemerdekaan dan integritas wilayah nasional mereka.

Sejak *Madrid Agreement 1975* hingga saat ini, PBB tidak pernah mengakui Maroko ataupun *Sahrawi Arab Democratic Republic* (SADR) sebagai kekuatan administrasi di Sahara Barat. Kesimpulan dari *Madrid Agreement 1975* adalah bahwa perjanjian ini tidak menetapkan pengalihan kedaulatan wilayah ini (Sahara Barat) atau tidak memberikan kepada salah satu penandatanganan status kekuasaan administrasi (Spanyol, Maroko dan Mauritania), yang tidak dapat dialihkan oleh Spanyol secara sepihak.<sup>58</sup> Sehingga, pada akhirnya wilayah kedaulatan Sahara Barat didasarkan pada prinsip-prinsip penentuan nasib sendiri dan persetujuan dari orang-orang Sahara Barat.

Bagian barat dari Sahara Barat tetap berada di bawah supremasi Maroko sejak melakukan aneksasi pada tahun 1976 dan 1979. Aneksasi pertama terjadi pada 14 April 1976, dimana Maroko dan Mauritania membuat perjanjian tentang pembagian wilayah Sahara Barat dan melakukan aneksasi terhadap provinsi-provinsi di wilayah tersebut.<sup>59</sup> Saat itu, wilayah ini sering terjadi konflik militer antara Maroko, Mauritania, dan Front Polisario yang membuat Mahkamah Internasional turun tangan dalam menyelesaikan konflik di wilayah tersebut. Aneksasi kedua terjadi pada 10 Agustus 1979, dimana Mauritania mundur dari Sahara Barat setelah menandatangani perjanjian damai dengan Front Polisario, serta melepaskan hak atas klaim teritorialnya dari Sahara Barat. Pada saat yang bersamaan, Maroko melakukan aneksasi pada bagian Sahara Barat yang awalnya diduduki oleh Mauritania.<sup>60</sup> Sejak saat itu, Sahara Barat telah

---

<sup>58</sup> "Declaration of Principles on Western Sahara (Madrid Accords) | UN Peacemaker," diakses 10 Januari 2022, <https://peacemaker.un.org/mauritania-morocco-spain-principles75>.

<sup>59</sup> "No. 15406 MAURITANIA and MOROCCO Convention concerning the State frontier line established between the Islamic Republic of Mauritania and the Kingdom of Morocco (with map). Signed at Rabat on 14 April 1976," n.d.

<sup>60</sup> "Visor Redalyc - The international legal status of Western Sahara," diakses 10 Januari 2022, <http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/463/4632029003/index.html>.

diatur secara teratur oleh Maroko, tanpa persetujuan dari orang-orang Sahara Barat, yang sejauh ini belum menggunakan haknya untuk menentukan nasib sendiri.

### ***Intervensi dan Kepentingan Amerika Serikat di Sahara Barat***

Sebuah intervensi tidak akan dilakukan oleh suatu negara apabila tidak memberikan dampak menguntungkan bagi dirinya. Begitu pula dengan yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS), salah satu negara *superpower* di dunia. Negara tersebut lagi-lagi melakukan intervensi kepada sebuah konflik, yang kali ini intervensi tersebut ditujukan kepada konflik Sahara Barat. Intervensi dimulai pada Desember 2020, di mana Amerika Serikat memberikan putusan bahwa mereka mengakui klaim Maroko yang menyatakan bahwa Sahara Barat adalah bagian dari wilayahnya sebagai imbalan dari normalisasi hubungan mereka dengan Israel.<sup>61</sup> Hal ini mungkin saja berdasar pada fakta bahwa Israel adalah sekutu Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Maka dari itu, tidak akan mengherankan apabila timbul pertanyaan lebih lanjut mengenai apa sebenarnya kepentingan yang dimiliki AS sehingga ia ikut campur tangan pada konflik berkepanjangan yang kompleks tersebut.

Apabila suatu negara ikut campur tangan terhadap suatu hal di luar urusan negerinya, maka dapat dipahami bahwa negara tersebut memiliki suatu kepentingan yang hendak diperolehnya. Situasi ini merupakan situasi yang sudah tidak asing lagi bagi hubungan antar negara dalam sistem internasional. Di mana pada dasarnya, jalinan hubungan antar negara tidak akan terjadi apabila sebuah negara tidak memiliki kepentingan yang ingin dicapainya melalui hubungannya dengan negara lain. Sederhananya, sebuah negara membutuhkan bantuan dari negara lain atau juga dapat dikatakan sebagai tindakan memanfaatkan kehadiran dari negara lain dalam upaya mencapai kepentingan yang tidak mungkin dicapai melalui internal negaranya. Amerika Serikat sebagai salah satu aktor yang terjun pada konflik di Sahara Barat, memiliki kepentingan dan kebutuhannya sendiri, sehingga ia akan memposisikan dirinya dalam pola hubungan yang diinginkannya untuk dapat mencapai apa yang menjadi tujuannya melalui cara-cara sedemikian rupa.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Eka Yudha Saputra, "Amerika Akui Klaim Sahara Barat Maroko Sebagai Imbalan Normalisasi Dengan Israel," *Tempo*, December 11, 2020, <https://dunia.tempo.co/read/1413571/amerika-akui-klaim-sahara-barat-maroko-sebagai-imbalan-normalisasi-dengan-israel>.

<sup>62</sup> Sri Khairunnisa Ariyati, "Analisa Konflik Wilayah Sahara Barat dan Upaya Resolusi Konflik [West Sahara Conflict Analysis and resolution Effort]," *Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)* 11, no. 22 (June 12, 2020): 33, <https://doi.org/10.19166/verity.v11i22.2458>.

Jika kita memfokuskan diri pada sudut pandang hubungan Maroko dengan Israel yang menjadi benang merah dalam campur tangan AS di Sahara Barat. Kita dapat melihat bahwa Maroko sendiri tadinya merupakan salah satu negara yang mendukung perjuangan Palestina, dan hubungannya dengan Israel tidak dapat dikatakan cukup baik sebelumnya. Namun, Maroko seketika berputar haluan dan menormalisasikan hubungannya dengan Israel setelah AS mengakui Sahara Barat sebagai bagian dari wilayah Maroko, dengan tameng pernyataan yang menyebutkan bahwa negara tersebut masih mendukung perjuangan Palestina. Hal ini menjadi cukup aneh, ketika negara dapat dengan seketika merubah arahnya setelah mendapatkan apa yang menjadi kepentingannya. AS sendiri mengklaim alasannya mengeluarkan putusan terhadap kepemilikan Sahara Barat kepada Maroko adalah dikarenakan oleh keseriusan Maroko yang tertuang dalam proposal otonominya, yang juga dinilai realistis serta kredibel sehingga dianggap sebagai satu-satunya solusi yang adil bagi konflik Sahara Barat.<sup>63</sup> Padahal, keputusan AS ini tidak dianggap adil sama sekali oleh Polisario Front yang telah berjuang sekian lama untuk memerdekakan dirinya. Jadi, keadilan bagi siapa dan keadilan yang bagaimanakah yang diukur oleh Amerika Serikat dalam hal ini? Pertanyaan ini menimbulkan kesan bahwa AS memiliki kepentingan terselubung dalam intervensinya di Sahara Barat. Bagaimana tidak, pada kenyataannya, Sahara Barat diputuskan sebagai bagian dari Maroko adalah sebagai bentuk imbalan atau hadiah atas kesediaan Maroko untuk melakukan pemulihan hubungannya dengan Israel.

Jika kita mengkaji lebih lanjut, kepentingan AS secara perlahan akan tampak melalui upayanya untuk menjadi ‘penyambung’ hubungan antara Israel yang merupakan sekutunya dengan negara-negara di Timur Tengah, dan salah satu negara tersebut adalah Maroko. Pencapaiannya dalam membantu hubungan diplomatik Israel dengan Maroko kemudian disebutnya sebagai ‘terobosan untuk perdamaian kawasan’.<sup>64</sup>

Dengan keberhasilan campur tangan atau intervensi AS di Sahara Barat, kita dapat semakin melihat bahwa pengaruh AS sangat besar dan dominan bagi sistem internasional. Berdasarkan hal itu, apakah kepentingan AS di Sahara Barat adalah memperluas dan menegaskan dominasinya di kawasan Timur Tengah? Jawaban dari pertanyaan tersebut hanya bisa ditentukan melalui perspektif masing-masing orang sebagai opini yang dimiliki. Opini penulis dalam hal ini cukup

---

<sup>63</sup> “Maroko resmi jalin hubungan diplomatik dengan Israel, apa dampaknya bagi wilayah sengketa Sahara Barat?,” *BBC News Indonesia*, accessed December 15, 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55255487>.

<sup>64</sup> “Maroko resmi jalin hubungan diplomatik dengan Israel, apa dampaknya bagi wilayah sengketa Sahara Barat?”



mengarah pada kemungkinan penegasan dominasi tersebut, di mana AS adalah negara hegemon, dan dengan keuntungan yang didapatkannya sebagai negara hegemon akan membuatnya mempertahankan status hegemonnya dalam dunia internasional. Dengan terjalin kembalinya hubungan antara Maroko dengan Israel, tampaknya AS di bawah Donald Trump (yang ketika itu masih menjabat sebagai presiden AS) berada pada titik kesenangan yang cukup besar atas kemenangannya. Trump bahkan menulis ungkapan kesenangannya mengenai kesepakatan diplomatis Israel dan Maroko di *Twitter*-nya, yang dilanjutkan dengan pernyataan melalui Gedung Putih yang menyebutkan bahwa dirinya telah mencapai kesepakatan dengan Raja Maroko Mohammed VI untuk memajukan stabilitas regional dengan cara memperluas kerja sama ekonomi dan budaya di antara mereka.<sup>65</sup>

Lebih jauh lagi, selain status hegemon yang melekat di dirinya, Amerika Serikat juga diketahui telah berupaya untuk memperoleh pengakuan dari Arab atas Israel. Dan dukungannya kepada Maroko mengenai putusan terhadap Sahara Barat sebagai balasan dari kemauan Maroko untuk menjalin kembali hubungan dengan Israel, adalah salah satu kebijakan yang diupayakannya dalam rangka untuk memperoleh tujuan yang diinginkannya tersebut.<sup>66</sup> Maka, apa yang dikatakannya sebagai ‘stabilitas regional’ akan memunculkan makna yang ambigu, bahwa stabilitas regional yang disebutkan olehnya sebenarnya merupakan tujuan dan/atau kepentingan yang ingin diperolehnya melalui dukungannya kepada Israel dengan cara memperluas hubungan diplomatis Israel dengan negara-negara di Timur Tengah, termasuk Arab. Bisa jadi pula, stabilitas regional ini dimaksudkan ke dalam stabilitas hubungan Israel dengan negara-negara di Timur Tengah. Bagi AS, semakin meluasnya normalisasi hubungan Israel dengan Arab dan negara lainnya di Timur Tengah adalah langkah maju untuk stabilitas regional.

Selanjutnya, penulis ingin *me-review* kembali alur perjalanan Amerika Serikat dengan sekutunya, Israel, sebelum mendapatkan dukungan dari beberapa negara di Timur Tengah atas pengakuan terhadap Israel. Amerika Serikat saat itu sempat mengalami kelumpuhan dalam pemerintahannya dikarenakan berusaha sekuat tenaga untuk menopang Israel atau seccara mandiri memberikan ‘dukungan regional’ kepada Israel bahkan setelah adanya agresi Iran. Saat ini, setelah ia berhasil menormalisasikan hubungan Israel dengan Maroko, maka bertambah luas lagi jangkauannya di Timur Tengah. Setelah itu, AS juga terus mengupayakan pencapaian hubungan

---

<sup>65</sup> “Maroko resmi jalin hubungan diplomatik dengan Israel, apa dampaknya bagi wilayah sengketa Sahara Barat?”

<sup>66</sup> Saputra, “Amerika Akui Klaim Sahara Barat Maroko Sebagai Imbalan Normalisasi Dengan Israel.”

Israel dengan negara seperti Arab dan lainnya, yang mungkin dalam waktu dekat akan segera tercapai, meski tentunya dengan konsolidasi yang membutuhkan waktu tidak sebentar, namun kepastian mungkin menjadi sangat mudah bagi AS dan Israel ke depannya. Dengan semakin luasnya dukungan dari berbagai negara di kawasan Timur Tengah tersebut, AS mungkin saja dapat menciptakan solidaritas yang kuat untuk melakukan pembalasan kepada agresi Iran yang sebelumnya menjadi salah satu faktor dari kelumpuhan pemerintahannya.<sup>67</sup> Dengan begitu, akan menjadi masuk akal apabila kita membicarakan kepentingan AS di Sahara Barat adalah untuk memperluas dominasinya melalui pengakuan atas sekutunya, beserta pula dengan normalisasi hubungan yang semakin luas oleh Israel dengan negara-negara di Timur Tengah.

### ***Dampak Intervensi Amerika Serikat di Sahara Barat***

Sahara Barat merupakan konflik berkepanjangan mengenai legalitas wilayah di antara dua pihak yang berlawanan, yaitu Maroko dan Polisario Front. Intervensi Amerika Serikat di Sahara Barat tentu saja menghasilkan atau membawa dampak yang berbeda bagi kedua pihak yang berseteru tersebut. Pemerintahan Maroko yang saat ini didukung oleh Amerika Serikat melalui putusan pengakuan Sahara Barat sebagai bagian dari Maroko tentu saja menyambut baik keputusan yang dikeluarkan oleh AS,<sup>68</sup> namun sebaliknya, Polisario Front tentu saja tidak senang terhadap intervensi Amerika Serikat di Sahara Barat. Perjuangan yang dilakukan oleh mereka untuk memerdekakan Sahara Barat selama puluhan tahun rasanya tidak ada artinya jika mendengar keputusan AS yang dengan sepihak membela Maroko dalam klaimnya atas wilayah tersebut.<sup>69</sup> Polisario Front menyatakan pertentangan keras terhadap putusan Amerika Serikat dengan menyebutkan bahwa tindakan tersebut menjadi penghalang bagi penyelesaian konflik di Sahara Barat. Meskipun begitu, Polisario Front menegaskan bahwa intervensi Amerika Serikat tidak akan memengaruhi keinginan mereka untuk tetap berjuang dalam mencapai kemerdekaan Sahara Barat.<sup>70</sup> Dapat kita simpulkan bahwa meski intervensi Amerika Serikat tidak membawa kerugian yang begitu nyata dan signifikan bagi Polisario Front, dampak negatif masih dapat dirasakan melalui pikiran dan perasaan para pejuang Polisario Front itu sendiri.

---

<sup>67</sup> Vivian Salama, "Trump Announces Israel and Morocco to Normalize Relations," CNN, accessed December 15, 2021, <https://www.cnn.com/2020/12/10/politics/trump-israel-morocco/index.html>.

<sup>68</sup> Salama.

<sup>69</sup> Saputra, "Amerika Akui Klaim Sahara Barat Maroko Sebagai Imbalan Normalisasi Dengan Israel."

<sup>70</sup> "Polisario Front Condemns U.S. Backing of Moroccan Claim to Western Sahara," *Reuters*, December 10, 2020, sec. World News, <https://www.reuters.com/article/uk-israel-usa-morocco-polisario-idUKKBN28K2N5>.

Seiring dengan penegasan Polisario Front yang mengecam putusan AS dengan keras, Aljazair yang merupakan negara penyokong Polisario Front sejak awal juga menyatakan penolakan terhadap putusan AS tersebut. Pihak Aljazair melalui kementerian luar negerinya menyebutkan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh AS adalah ilegal dan tidak memiliki efek hukum apapun terhadap Sahara Barat, mengingat hal itu juga bertentangan dengan resolusi PBB dan resolusi DK (Dewan Keamanan) PBB terkait Sahara Barat.<sup>71</sup>

Hal itu juga dibuktikan dengan tidak adanya langkah khusus yang dilakukan oleh negara-negara Barat lainnya setelah apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga teguh pada sikapnya kepada Sahara Barat sejak semula, dengan berada pada posisi netral, yaitu sejak PBB menjadi penengah pada konflik dan membawa gencatan senjata di antara mereka, meski hingga saat ini belum ada langkah pasti dari apa yang telah dijanjikan oleh PBB mengenai referendum kemerdekaan ketika gencatan senjata pada tahun 1991. Dengan ini kita juga mengetahui bahwa peran PBB dalam konflik Sahara Barat bahkan hanya sampai pada tahap penghentian kekerasan, resolusi yang dikeluarkannya juga belum dapat dikatakan sebagai upaya resolusi konflik yang berhasil, setelah dua resolusi sebelumnya mengalami kegagalan.<sup>72</sup> PBB bahkan mengalami kesulitan untuk mengatasi konflik Sahara Barat, sementara AS yang dengan mudahnya memberikan putusan terhadap klaim Sahara Barat oleh Maroko ini tidak heran dapat dinilai sebagai penghalang bagi upaya penyelesaian konflik di wilayah tersebut.

Selanjutnya, tercapainya normalisasi hubungan antara Maroko dan Israel sebagai akibat dari intervensi Amerika Serikat di Sahara Barat berhasil menarik perhatian negara-negara Afrika dan Arab untuk membuka konsulat mereka di Sahara Barat.<sup>73</sup> Kekhawatiran yang ada menjadi semakin besar. Kekhawatiran ini didasarkan pada ketakutan atas tindakan pemerintahan AS yang terkesan memberikan legitimasi terhadap dugaan penindasan penduduk di wilayah tersebut. Selain itu, kekhawatiran juga dirasakan oleh masyarakat internasional terhadap jangkauan Israel yang semakin besar di kawasan Timur Tengah.

---

<sup>71</sup> Eka Yudha Saputra, "Aljazair Menolak Pengakuan Amerika Atas Klaim Sahara Barat Maroko," *Tempo*, December 13, 2020, <https://dunia.tempo.co/read/1414008/aljazair-menolak-pengakuan-amerika-atas-klaim-sahara-barat-maroko>.

<sup>72</sup> Ariyati, "Analisa Konflik Wilayah Sahara Barat dan Upaya Resolusi Konflik [West Sahara Conflict Analysis and resolution Effort]," 37.

<sup>73</sup> "Analysis-Washington's Western Sahara Pledge the Ultimate Prize for Morocco | Reuters," accessed December 15, 2021, <https://www.reuters.com/article/uk-israel-usa-morocco-westernsahara-anal/analysis-washingtons-western-sahara-pledge-the-ultimate-prize-for-morocco-idUKKBN28K376?edition-redirect=uk>.

Meski begitu, pertanyaan mendasarnya muncul ketika kita mengetahui bahwa PBB saja bahkan menyebut Sahara Barat sebagai ‘wilayah yang tidak memiliki pemerintahannya sendiri’, lalu bagaimana bisa putusan yang dikeluarkan AS memengaruhi situasi konflik di Sahara Barat? Penulis menjawab pertanyaan ini dengan pernyataan bahwa kemungkinan pengaruh AS hanya sebagian kecil saja, mengingat klaim Maroko sendiri sejak awal tidak diakui secara luas pada dunia internasional.<sup>74</sup>

## **Kesimpulan**

Sahara Barat merupakan daerah yang terletak di pantai barat laut Afrika. Wilayah ini merupakan bekas koloni Spanyol dan dianeksasi oleh Maroko pada tahun 1975 dan 1979. Sejak saat itu, wilayah ini telah menjadi sengketa teritorial yang berlangsung lama antara Maroko dan penduduk asli, ‘Sahrawi’, yang dipimpin oleh Front Polisario. Bagian barat dari Sahara Barat tetap berada di bawah supremasi Maroko sejak melakukan aneksasi pada tahun 1976 dan 1979. Aneksasi pertama terjadi pada 14 April 1976, dimana Maroko dan Mauritania membuat perjanjian tentang pembagian wilayah Sahara Barat dan melakukan aneksasi terhadap provinsi-provinsi di wilayah tersebut.<sup>75</sup> Saat itu, wilayah ini sering terjadi konflik militer antara Maroko, Mauritania, dan Front Polisario yang membuat Mahkamah Internasional turun tangan dalam menyelesaikan konflik di wilayah tersebut. Aneksasi kedua terjadi pada 10 Agustus 1979, dimana Mauritania mundur dari Sahara Barat setelah menandatangani perjanjian damai dengan Front Polisario, serta melepaskan hak atas klaim teritorialnya dari Sahara Barat. Pada saat yang bersamaan, Maroko melakukan aneksasi pada bagian Sahara Barat yang awalnya diduduki oleh Mauritania.<sup>76</sup> Sejak saat itu, Sahara Barat telah diatur secara teratur oleh Maroko, tanpa persetujuan dari orang-orang Sahara Barat, yang sejauh ini belum menggunakan haknya untuk menentukan nasib sendiri.

Intervensi Amerika Serikat di Sahara Barat tidak terlepas dari kepentingan yang ingin dicapainya sebagai suatu negara. Kepentingan ini, dinilai penulis sebagai keinginan untuk menegaskan status hegemonnya di kawasan Timur Tengah, namun juga berkaitan erat dengan keberadaan sekutunya, Israel. Kaitannya dengan Israel adalah bagaimana AS mengupayakan pengakuan negara-negara di Timur Tengah atas Israel, yang salah satunya adalah pengakuan dari Arab, satu langkahnya adalah dengan mengupayakan kebijakan di mana dirinya diposisikan

---

<sup>74</sup> Salama, “Trump Announces Israel and Morocco to Normalize Relations.”

<sup>75</sup> “No. 15406 MAURITANIA and MOROCCO Convention concerning the State frontier line established between the Islamic Republic of Mauritania and the Kingdom of Morocco (with map). Signed at Rabat on 14 April 1976.”

<sup>76</sup> “Visor Redalyc - The international legal status of Western Sahara.”

sebagai penghubung yang membantu normalisasi hubungan antara Maroko dengan Israel. Dengan dilangsungkannya hubungan antara Israel dengan Maroko serta berlanjutnya upaya normalisasi Israel dengan negara-negara lainnya di Timur Tengah, AS percaya bahwa nantinya akan terbentuk solidaritas kuat yang mendukung Israel secara penuh di kawasan, bahkan dalam memberikan balasan terhadap agresi yang dilakukan oleh Iran.

Mengenai dampak dari intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat, yang perlu dicatat adalah bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat terhadap wilayah Sahara Barat tidak dapat memberi pengaruh yang sangat nyata dan signifikan bagi legalitas Sahara Barat itu sendiri, namun tetap saja seakan memberikan pertarungan dan beban yang berat kepada Polisario Front yang sejak semula berjuang keras untuk mendapatkan kemerdekaan yang telah didambakan puluhan tahun lamanya. Meski Polisario Front menegaskan pihaknya akan terus berjuang untuk mencapai tujuannya, tidak dapat dipungkiri bahwa sedikit banyaknya, hal ini akan membawa pengaruh bagi harapan-harapan yang ada terhadap status kemerdekaan Sahara Barat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- “Analysis-Washington’s Western Sahara Pledge the Ultimate Prize for Morocco | Reuters,” accessed December 15, 2021, <https://www.reuters.com/article/uk-israel-usa-morocco-westernsahara-anal/analysis-washingtons-western-sahara-pledge-the-ultimate-prize-for-morocco-idUKKBN28K376?edition-redirect=uk>.
- “Declaration of Principles on Western Sahara (Madrid Accords) | UN Peacemaker,” diakses 10 Januari 2022, <https://peacemaker.un.org/mauritania-morocco-spain-principles75>.
- “Geopolitical hotspot: Western Sahara - Geographical Magazine,” diakses 19 Januari 2022, <https://geographical.co.uk/geopolitics/hotspot/item/3978-geopolitical-hotspot-western-sahara>.
- “Maroko resmi jalin hubungan diplomatik dengan Israel, apa dampaknya bagi wilayah sengketa Sahara Barat?,” *BBC News Indonesia*, accessed December 15, 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55255487>.
- “No. 15406 MAURITANIA and MOROCCO Convention concerning the State frontier line established between the Islamic Republic of Mauritania and the Kingdom of Morocco (with map). Signed at Rabat on 14 April 1976,” n.d.

- “No. 15406 MAURITANIA and MOROCCO Convention concerning the State frontier line established between the Islamic Republic of Mauritania and the Kingdom of Morocco (with map). Signed at Rabat on 14 April 1976.”
- “OHCHR | Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples,” diakses 9 Januari 2022, <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Independence.aspx>.
- “Polisario Front Condemns U.S. Backing of Moroccan Claim to Western Sahara,” *Reuters*, December 10, 2020, sec. World News, <https://www.reuters.com/article/uk-israel-usa-morocco-polisario-idUKKBN28K2N5>.
- “Visor Redalyc - The international legal status of Western Sahara,” diakses 10 Januari 2022, <http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/463/4632029003/index.html>.
- “Western Sahara summary | Britannica,” diakses 15 Januari 2022, <https://www.britannica.com/summary/Western-Sahara>.
- Ariyati, “Analisa Konflik Wilayah Sahara Barat dan Upaya Resolusi Konflik [West Sahara Conflict Analysis and resolution Effort],” 37.
- Eka Yudha Saputra, “Aljazair Menolak Pengakuan Amerika Atas Klaim Sahara Barat Maroko,” *Tempo*, December 13, 2020, <https://dunia.tempo.co/read/1414008/aljazair-menolak-pengakuan-amerika-atas-klaim-sahara-barat-maroko>.
- Eka Yudha Saputra, “Amerika Akui Klaim Sahara Barat Maroko Sebagai Imbalan Normalisasi Dengan Israel,” *Tempo*, December 11, 2020, <https://dunia.tempo.co/read/1413571/amerika-akui-klaim-sahara-barat-maroko-sebagai-imbalan-normalisasi-dengan-israel>.
- Georg Nolte dan Albrecht Randelzhofer, “Action with Respect to Threats to the Peace , Breaches of the Peace, and Acts of Aggression, Article 51,” *The Charter of the United Nations: A Commentary II*, no. November 2012 (2012): 1397–1428.
- Sri Khairunnisa Ariyati, “Analisa Konflik Wilayah Sahara Barat dan Upaya Resolusi Konflik [West Sahara Conflict Analysis and resolution Effort],” *Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)* 11, no. 22 (June 12, 2020): 33, <https://doi.org/10.19166/verity.v11i22.2458>.

United Nations, “Chapter XI: Declaration Regarding Non-Self-Governing Territories (Articles 73-74) | United Nations,” diakses 8 Januari 2022, <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-11>.

Vivian Salama, “Trump Announces Israel and Morocco to Normalize Relations,” CNN, accessed December 15, 2021, <https://www.cnn.com/2020/12/10/politics/trump-israel-morocco/index.html>.

Weinstein, Brian. “The Western Sahara.” *Current History* 78, no. 455 (1980): 110–37. <http://www.jstor.org/stable/45314816>.

# Eksistensi Etnis Jawa asal Indonesia di Suriname-Amerika Selatan

Fifi Melyna Halim

## *Abstract*

*The existence of Javanese ethnicity from Indonesia in Suriname-South America is inseparable from the influence of Dutch colonialism in the Suriname region and Indonesia, especially in the mid-19th to 20th centuries. Currently, the presence of Javanese ethnicity in Suriname reaches 13.7% of the total population. Although ethnic Javanese are a minority, ethnic Javanese people still strive to maintain the existence of their original culture in Suriname. This paper aims to describe the efforts made by ethnic Javanese in Suriname, in maintaining their existence. This is done through cultural institutions as well as by reviewing various forms of existence in the fields of language, culture and politics. In this paper, the author finds that although the Javanese in Suriname are a minority, the Javanese have succeeded in taking part in Suriname's politics.*

**Keywords:** *Javanese Ethnicity, Minority, Culture, Language, Politics*

## **Abstrak**

Keberadaan etnis Jawa asal Indonesia di Suriname-Amerika Selatan tidak terlepas dari pengaruh kolonialisme Belanda di wilayah Suriname dan Indonesia khususnya pada pertengahan abad ke-19 hingga 20. Saat ini, keberadaan etnis Jawa di Suriname mencapai 13,7% dari total penduduk. Meskipun etnis Jawa merupakan minoritas, orang-orang etnis Jawa tetap berupaya dalam mempertahankan eksistensi budaya asli mereka di Suriname. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang upaya yang dilakukan oleh etnis Jawa di Suriname, dalam mempertahankan eksistensi mereka. Hal ini dilakukan melalui lembaga budaya serta dengan meninjau berbagai bentuk eksistensinya di bidang bahasa, budaya dan politik. Dalam tulisan ini, penulis menemukan bahwa meskipun etnis Jawa di Suriname merupakan minoritas, namun etnis Jawa berhasil mengambil peran dalam perpolitikan Suriname.

**Kata Kunci:** Etnis Jawa, Minoritas, Budaya, Bahasa, Politik

## **Pendahuluan**

Dalam suatu bangsa ataupun negara, terdapat masyarakat yang kerap hidup berdampingan di lingkungan tempat tinggal mereka. Masyarakat ini pun saling berinteraksi dan juga yakin bahwa mereka memiliki kesamaan dalam segi kebudayaan, sejarah, ikatan kekeluargaan, asal-usul, tradisi dan hingga bahasa yang sama, hal inilah yang disebut dengan kelompok etnis.<sup>77</sup> Namun, kerap kali kita menemukan keberadaan suatu etnis tertentu yang berasal dari negara yang jaraknya cukup jauh dari tempat tinggalnya sekarang. Dalam hal ini, globalisasi, migrasi dan juga kolonialisme

---

<sup>77</sup> Alex Thomson, *An Introduction to African Politics*. (Abingdon: Routledge, 2010), 61.



menjadi alasan utama terjadinya fenomena tersebut, seperti halnya keberadaan etnis Jawa asal Indonesia yang mendiami Suriname di Amerika Selatan yang berjarak sangat jauh. Tulisan ini akan membahas tentang bagaimana etnis Jawa dari Indonesia yang dalam kasus ini adalah kelompok minoritas dapat mempertahankan eksistensinya di negara Suriname yang terletak di Amerika Selatan.

### **Sejarah Etnis Jawa di Suriname**

Berdasarkan sejarah, Indonesia pernah dijajah oleh Belanda yang diawali dengan datangnya serikat dagang VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*, atau dalam bahasa Indonesianya “Kompeni Dagang Belanda di Hindia Timur”) dengan tujuan awalnya hanya sekedar mencari rempah-rempah.<sup>78</sup> Wilayah yang sangat kuat dengan pengaruh dan campur tangan VOC adalah di wilayah Jawa Tengah, Maluku dan Sunda Banten.<sup>79</sup> Terlebih lagi Jawa menjadi pusat kekuasaan kolonial Belanda,<sup>80</sup> maka dari itu tidak mengherankan bahwa para penjajah dapat memonopoli dan mengeksploitasi sumber daya alam hingga sumber daya manusia di kawasan Jawa seperti dilakukannya perbudakan tanam paksa kala itu.

Hubungan etnis Jawa dengan keberadaannya di negara Suriname tentunya dikarenakan oleh kolonialisme Belanda. Kekuasaan kolonial Belanda mencakup Afrika Selatan, Kepulauan Antilan Hindia-Belanda dan juga Suriname.<sup>81</sup> Suriname merupakan negara tropis yang terletak di kawasan Amerika Selatan, dan pada tahun 1667 telah menjadi koloni Belanda.<sup>82</sup> Hingga sekarang pun, Suriname merupakan satu-satunya negara berbahasa resmi Belanda di kawasan Amerika Selatan.<sup>83</sup> Suriname juga merupakan negara yang dihuni dan memiliki berbagai macam etnis, hal ini dikarenakan peristiwa kedatangan para pekerja dari berbagai belahan dunia, yang salah satunya adalah etnis Jawa dari Indonesia (Hindia-Belanda saat itu) yang didatangkan oleh Belanda.

---

<sup>78</sup> Mestika Zed, “Warisan Penjajahan Belanda di Indonesia Pasca-Kolonial (Perspektif Perubahan dan Kesenambungan),” *Diakronika: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan* 17, no. 1 (2017): 91, <http://diakronika.pj.unp.ac.id/index.php/diakronika/article/view/18/7>.

<sup>79</sup> Ibid, hlm. 92.

<sup>80</sup> Ibid, hlm. 94.

<sup>81</sup> H.L. Wesseling & P.C. Emmer, *Reappraisals in Overseas History: Essays on Post-war Historiography about European Expansion*. (Leiden: Leiden University Press, 1979). Dalam Ibid, hlm. 91.

<sup>82</sup> “Suriname,” The World Factbook, Central Intelligence Agency, terakhir diubah 8 November 2021, <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/suriname/>.

<sup>83</sup> Aongh St-Hilaire, “Ethnicity, assimilation and nation in plural Suriname,” *Ethnic and Racial Studies* 24, no. 6, (2001): 1001, <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01419870120077940>.

Dimulai dengan adanya kebijakan penghapusan perbudakan Afrika yang dilakukan pada tahun 1863 telah membuat lebih dari 33.000 budak Afrika di Suriname dibebaskan. Budak-budak yang telah dibebaskan tersebut, sebagian besar menjadi pemilik tanah di pedesaan kecil, dan ada juga yang memutuskan untuk pindah ke kota. Hanya sedikit dari mereka yang memilih untuk tetap tinggal di perkebunan tempat mereka diperbudak.<sup>84</sup> Lalu, akibat kekurangan pekerja, para kolonial pun mendatangkan banyak pekerja dari India/Hindustan (pekerja kontrak Inggris) dan pekerja etnis Jawa dengan jumlah 32.962 orang pada tahun 1890-1939 di Suriname.<sup>85</sup>

Gerakan perekrutan etnis Jawa di Suriname mulai menjadi tren pada tahun 1880-an, ini dipicu oleh permasalahan politik di India pada saat itu. Disamping itu, etnis Jawa juga dinilai terampil dalam menghasilkan sumber tenaga kerja alternatif.<sup>86</sup> Perekrutan ini dilakukan setelah negosiasi dari para penanam dan pejabat Suriname kepada pemerintah Belanda pada saat itu. Menurut catatan *Museum Stichting Surinaams*, mayoritas pendatang awal berasal dari daerah Jawa Barat, bahkan ada juga yang berasal dari Surabaya dan Semarang.<sup>87</sup> Namun, seperti hal yang telah wajar timbul di negara yang menampung banyak etnis saat itu, stereotip terhadap orang-orang Jawa di sana tak dapat dihindarkan, mereka dianggap sebagai orang yang penurut dan teratur, tetapi juga ada anggapan negatif seperti orang bodoh, apatis, dan semacamnya. Tidak hanya kepada pekerja Jawa, stereotip juga muncul untuk pekerja lainnya, seperti stereotip hemat, pekerja keras tetapi licik yang dituju pada orang Hindustan. Serta stereotip keras dan kasar yang ditujukan terhadap orang-orang Afro-Suriname.<sup>88</sup>

Perlu diketahui bahwa para pekerja etnis Jawa diberi perumahan gratis setibanya mereka di Suriname, dan ditugaskan ke perkebunan Suriname. Namun, kualitas rumah yang diberikan di Suriname sebagian besar tidak memadai, dan para pemegang kontrak mengakui bahwa jumlah gaji

---

<sup>84</sup> C. Lockard, "The Javanese as emigrant: Observations on the development of Javanese settlements overseas," *Indonesia* 11, (April 1971): 46. Dalam Pamela Allen, "Javanese cultural traditions in Suriname 1." *RIMA: Review of Indonesian and Malaysian Affairs* 45, (2011): 204, [https://www.academia.edu/4344194/Javanese\\_Cultural\\_Traditions\\_in\\_Suriname](https://www.academia.edu/4344194/Javanese_Cultural_Traditions_in_Suriname).

<sup>85</sup> Rosemarijn Hoefte. *Suriname in the Long Twentieth Century: Domination, Contestation, Globalization*. (New York: Palgrave Macmillan, 2014), 30.

<sup>86</sup> Y. Ismael, '*Indonesia*' Pada Pantai Lautan Atlantik ('*Indonesia*' on the Atlantic Coast), (Jakarta: Balai Pustaka, 1955), 29. Dalam Pamela Allen, "Javanese cultural traditions in Suriname," 204.

<sup>87</sup> Rosemarijn Hoefte, *In Place of Slavery: A Social History of British Indian and Javanese Laborers in Suriname*, (Gainesville, Florida: University Press of Florida, 1998), 221. Dalam Pamela Allen, *Ibid*.

<sup>88</sup> Rosemarijn Hoefte, "Cleansing the world of the germ of laziness: hygiene, sanitation, and the Javanese population in Suriname," *História, Ciências, Saúde-Manguinhos* 21, no. 4, (2014): 1438, <https://www.narcis.nl/publication/RecordID/oai:pure.knaw.nl:publications%2F75c8a6e5-3dde-4348-be44-ec507e8881bd>

yang seharusnya mereka berikan kepada para pekerja migran realitanya jauh lebih rendah daripada yang telah dijanjikan sebelumnya.<sup>89</sup> Mereka para pekerja juga harus menyesuaikan diri dengan tempat yang baru, pola makan, dan rezim kerja di lingkungan yang tidak kondusif. Selain itu, faktor bahasa juga berdampak terhadap proses interaksi imigran Jawa di Suriname tersebut. Hanya sedikit etnis Jawa di sana yang bisa berbahasa *Lingua Franca Suriname*, *Sranan Tongo*, dan begitu pula dengan sebaliknya, tidak ada kelompok etnis lain di Suriname yang bisa berbahasa Jawa. Namun, pada saat sebelum terjadinya Perang Dunia II, kebanyakan migran etnis Jawa sekitar 75-80% dari mereka memutuskan untuk menetap di Suriname dan sisanya yaitu sekitar 20-25% migran Jawa memutuskan untuk kembali ke Jawa, Indonesia. Alasan mereka untuk menetap di Suriname sangat bermacam-macam, mulai dari alasan sederhana seperti takut untuk menaiki perahu, hingga alasan yang berupa anggapan dan pemikiran seperti tidak ingin dipermalukan jika kembali ke kampung halaman dan beranggapan bahwa kehidupan mereka akan lebih sulit di Jawa ketimbang di Suriname.<sup>90</sup> Lalu, adanya gelombang kedua dari perekrutan etnis Jawa ke Suriname terjadi pada tahun 1930 dan 1940.<sup>91</sup> Pada gelombang ini, etnis-etnis Jawa yang direkrut terdiri dari kalangan pemukim bebas. Tujuan dari perekrutan ini tidak jauh beda dengan gelombang pertama, yaitu untuk berpartisipasi dalam bidang pertanian di Suriname yang akhirnya menyeberangkan sekitar ribuan imigran yang dipekerjakan pada gelombang ini.

Terlepas dari itu semua, faktor-faktor “*home-sick*” seperti rindu akan kampung halaman dan keluarga besar, dan ditambah dengan jauhnya jarak geografis antara Suriname dan Indonesia, menyebabkan etnis Jawa di Suriname untuk membentuk lembaga perhimpunan dan pusat kebudayaan kalangan mereka seperti *Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie* (VHJI) ataupun Himpunan Peringatan Imigrasi Jawa. Lembaga pemerintahan seperti Kedutaan Besar Indonesia di Suriname juga memiliki peranan yang besar dalam kehidupan etnis Jawa di Suriname.

### **Lembaga-lembaga Budaya Etnis Jawa di Suriname**

Pada abad ke-20, Suriname telah melakukan kebijakan dengan otoritas dan pelembagaan budaya guna mempromosikan dan mempertahankan budaya Jawa di Suriname. Berbagai macam

---

<sup>89</sup> W. Kloosterboer, *Involuntary Labour Since the Abolition of Slavery*, (Leiden: E.J. Brill Publisher, 1960), 35. Dalam Pamela Allen, hlm. 205.

<sup>90</sup> J. van der Kroef, “The Indonesian Minority in Surinam,” *American Sociological Review* 16, no. 5, (1951): 674. Dalam Pamela Allen, hlm. 206.

<sup>91</sup> Pamela Allen, “Javanese cultural traditions in Suriname 1,” *RIMA: Review of Indonesian and Malaysian Affairs* 45, (2011): 206, [https://www.academia.edu/4344194/Javanese\\_Cultural\\_Traditions\\_in\\_Suriname](https://www.academia.edu/4344194/Javanese_Cultural_Traditions_in_Suriname).

upaya seperti *indianisation* yang akan dijelaskan lebih lanjut, serta pendirian lembaga-lembaga budaya dan pemerintahan resmi di Suriname. Ada dua lembaga utama yang beroperasi demi perwujudan pelestarian kebudayaan, yaitu: VHJI (*Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie*) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Suriname.

#### **A. *Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie (VHJI)***

Tahun 1985, sebuah lembaga pusat kebudayaan VHJI pun didirikan dan tujuan dari lembaga ini adalah untuk menjadi wadah kontribusi pada kesadaran nasional serta pelestarian seni budaya antara Suriname secara umum dan budaya Jawa secara khususnya, dan kalangan muda menjadi target dari lembaga ini karena dengan harapan untuk dapat lebih mengenal dan meneruskan budaya Jawa. VHJI memfasilitasi dalam pembelajaran berupa kelas pembelajaran, kursus, pameran dan juga pertunjukan budaya Jawa ditambah dengan motto '*Show, Do, Live*' -nya mereka.<sup>92</sup> Kelas tari-tarian Jawa, kelas alat musik Gamelan, kelas batik (kain tradisional Indonesia) dan juga kelas bela diri Indonesia yaitu pencak Silat, dapat disaksikan dan ditemui setiap malamnya di pusat kebudayaan "Sana Budaya" yang merupakan pusat kebudayaan terpentingnya VHJI.<sup>93</sup>

#### **B. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Suriname**

Sebelum tahun 1995, Indonesia telah mempunyai konsulat di Suriname. Namun, demi mempererat hubungan dan memperkuat budaya Jawa di Suriname, maka digantikan konsulat Indonesia di Suriname menjadi KBRI Suriname pada tahun 1995.<sup>94</sup> KBRI memfasilitasi orang-orang Indonesia di Suriname dan juga orang-orang di Indonesia untuk membantu memperkuat kebudayaan Indonesia atau Jawa di Suriname agar keberadaannya tetap terjaga. Usaha-usaha yang dilakukan oleh KBRI di Suriname yaitu memperkuat hubungan bilateral di berbagai bidang seperti ekonomi dan sosial budaya. Terkhusus untuk sosial budaya, Indonesia telah mengadakan program Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) dan sebanyak 7 orang telah mengikuti kegiatan tersebut pada tahun 2015 hingga 2019.<sup>95</sup> Bantuan lainnya seperti diadakannya kelas budaya dan bahasa Indonesia, perlu

---

<sup>92</sup> Ibid, hlm. 209.

<sup>93</sup> Sophie Villerius. (2018). *Development of Surinamese Javanese: Language contact and change in a multilingual context*, (Amsterdam: LOT Publishers, 2018), 43, [https://www.lotpublications.nl/Documents/528\\_fulltext.pdf](https://www.lotpublications.nl/Documents/528_fulltext.pdf)

<sup>94</sup> Pamela Allen, "Javanese cultural traditions in Suriname," 210.

<sup>95</sup> "Hubungan Bilateral Suriname," Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Diakses pada 9 Januari 2021, <https://kemlu.go.id/paramaribo/id/read/hubungan-bilateral-suriname/416/etc-menu>

diketahui bahwa ada hal menarik dalam kelas budaya dan bahasa Indonesia ini salah satunya adalah orang-orang etnis Hindustan yang mengikuti kelas tersebut karena mereka ingin mengerti maksud dari percakapan yang ada di sinetron Indonesia yang ditayangkan di Suriname.<sup>96</sup> Bantuan fasilitas alat musik tradisional gamelan dan juga adanya stasiun radio berbahasa Indonesia yang dimiliki oleh KBRI semakin memperkuat kebudayaan Indonesia khususnya kebudayaan Jawa di Suriname.

### **Bentuk Eksistensi Etnis Jawa di Suriname**

Etnis Jawa di Suriname dalam kehidupan sehari-hari mereka tetap mempertahankan tradisi dan kebudayaan mereka, khususnya tradisi dan kebudayaan Jawa. Hal tersebut sangat menunjukkan sifat nasionalisme karena mereka tidak meninggalkan identitas asli mereka yaitu keturunan Indonesia. Upaya dalam mempertahankan tradisi dan budaya tersebut dapat dilihat sebagai bentuk eksistensi etnis Jawa di Suriname, hal tersebut dapat dilihat jejaknya dan keberadaannya dalam bentuk bahasa, kebudayaan dan juga pengaruh etnis Jawa di perpolitikan Suriname.

#### **a. Bahasa**

Bahasa merupakan suatu media yang sangat penting dan mendasar di dalam aktivitas komunikasi, komunikasi tentunya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya penggunaan bahasa, sesuatu yang ingin diungkapkan maupun disampaikan kepada lawan bicara tidak akan tersampaikan. Suatu bahasa dapat menentukan kelangsungan atau keberadaan suatu bangsa, seperti sikap bahasa yang dilakukan oleh etnis Jawa di Suriname, di mana mereka tetap berusaha untuk menggunakan bahasa Jawa untuk berinteraksi, walaupun mereka tidak sedang di Indonesia.<sup>97</sup>

Penggunaan bahasa Jawa oleh etnis Jawa di Suriname dapat dilihat pada penggunaan bahasa Jawa yang dilakukan oleh beberapa dari mereka jika lawan bicara mereka merupakan sesama etnis Jawa Suriname.<sup>98</sup> Lalu adanya pemakaian nama-nama Jawa oleh individu seperti nama Ngadimin, Sastroredjo, Prawiroredjo dan lainnya sebagai

---

<sup>96</sup> Pamela Allen, "Javanese cultural traditions in Suriname," 211.

<sup>97</sup> Abdul Chaer dan Leonie Agustina, *Sosiolinguistik Suatu Pengantar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995) Dalam Siti Komariyah dan Puspa Ruriana, "PEMERTAHANAN BAHASA JAWA DI SURINAME," In: Seminar Nasional Pemertahanan Bahasa Nusantara, Hotel Pandanaran Semarang, (6 Mei 2010): 54, <http://eprints.undip.ac.id/36880/1/7.pdf>

<sup>98</sup> Siti Komariyah dan Puspa Ruriana, *Ibid.*

nama keluarga mereka, sedangkan nama awal individu mereka menggunakan unsur Suriname.<sup>99</sup> Penggunaan nama tempat seperti jalan dan desa dengan nama Jawa juga dapat ditemukan di Suriname, hal ini diakibatkan oleh faktor kebijakan *indianisation* pada tahun 1930-an. Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh gubernur di Suriname supaya etnis-etnis Jawa menghuni di suatu desa khas Jawa, nama desa itu pun telah dinamai dengan nama Jawa seperti Wonoredjo, Sidoredjo, dan Taman Sarie dan lainnya.<sup>100</sup> Serta juga adanya pemancar Radio yang menggunakan bahasa Jawa.<sup>101</sup>

### **b. Budaya**

Budaya merupakan suatu ciri khas ataupun identitas yang dimiliki oleh suatu kelompok, etnis, dan juga negara. Pemertahanan kebudayaan Jawa yang dilakukan oleh etnis Jawa di Suriname juga termasuk ke dalam eksistensi budaya Indonesia khususnya Jawa. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya kelas-kelas pembelajaran untuk mempelajari tari-tarian tradisional seperti tari Serimpi, kelas bela diri tradisional Indonesia yaitu Pencak Silat, kelas alat musik tradisional seperti angklung dan gamelan, serta adanya pertunjukan tradisional seperti ludruk, wayang, dan juga dagelan.<sup>102</sup> Kelas-kelas dan juga berbagai ragam pertunjukan ini biasanya dilakukan aktivitasnya di pusat kebudayaan yang ada di Suriname, seperti pusat kebudayaan bernama “Sana Budaya”.

### **c. Politik**

Etnis Jawa memang menjadi kelompok minoritas di Suriname, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang yang berasal dari etnis Jawa ini dapat berperan dan tergabung ke dalam dunia perpolitikan di Suriname. Orang-orang dari etnis Jawa dapat bersaing di dunia perpolitikan Suriname dan mereka juga membuat partai-partai etnis Jawa di Suriname, seperti partai Pertjajah Luhur dan partai Pandawalima.<sup>103</sup>

Tatanan politik Suriname dengan adanya kontribusi dari etnis Jawa menjadikan mereka dapat menduduki kursi jabatan yang strategis di bidang perpolitikan, seperti posisi

---

<sup>99</sup> Ibid, hlm. 55-56.

<sup>100</sup> Pamela Allen, “Javanese cultural traditions in Suriname,” 209.

<sup>101</sup> Siti Komariyah dan Puspa Ruriana, “PEMERTAHANAN BAHASA JAWA DI SURINAME,” 56.

<sup>102</sup> Pamela Allen, “Javanese cultural traditions in Suriname,” 212.

<sup>103</sup> Acep Rahmat, Nana Supriatna dan Moch Eryk Kamsori, “Dari Imigrasi Menuju Integrasi: Peranan Etnis Jawa dalam Politik di Suriname (1991- 2015),” *Factum: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah* 7, no. 1 (2018): 11, <https://ejournal.upi.edu/index.php/factum/article/view/11923/7178>.

menteri dan juga anggota-anggota majelis seperti pada masa politik tahun 1991 hingga 2015.<sup>104</sup> Bahkan, seorang dari etnis Jawa yang merupakan keturunan dari Banyumas, Indonesia bernama Raymond Sapoen sempat mencalonkan dirinya sebagai presiden Suriname pada tahun 2015. Hal tersebut merupakan bukti dari kontribusi etnis Jawa di perpolitikan Suriname, yang meskipun etnis Jawa merupakan kelompok minoritas di Suriname, banyak pendukung Raymond dari berbagai kalangan profesi yang merasa terwakilkan oleh pencalonan dirinya sebagai presiden di Suriname.<sup>105</sup>

## **Kesimpulan**

Para penjajah Belanda menaruh peran penting terkait dengan keberadaan etnis Jawa di Suriname, dimulai dengan membawa orang-orang Jawa ke Suriname dengan bertujuan untuk menjadikan mereka sebagai pekerja di Suriname. Para pekerja yang berada di Suriname tentunya bukan berasal dari etnis Jawa saja, namun juga berasal dari berbagai macam etnis seperti etnis Hindustan yang lebih dikenal dengan orang-orang India. Sebagian orang-orang etnis Jawa di sana ada yang meninggalkan Suriname dan kembali ke Indonesia, diakibatkan karena mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, mulai dari kendala bahasa, dan fasilitas kehidupan mereka yang kurang layak dan juga alasan emosional seperti rindu akan kampung halaman dan juga keluarga. Namun, sebagian besar dari mereka memilih untuk tidak kembali ke Indonesia dikarenakan hal sederhana seperti takut untuk naik perahu, dan juga alasan yang berdasar dari anggapan mereka seperti akan dipermalukan oleh orang-orang kampung mereka jika mereka kembali dan anggapan mereka atas kehidupan yang lebih susah jika mereka pulang kembali ke Indonesia.

Orang-orang etnis Jawa di Suriname melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan terhadap kebudayaan asli mereka, yakni mereka berusaha dan berupaya dalam mempertahankan eksistensi tradisi mereka di Suriname. Adanya kelas bahasa, budaya serta lembaga-lembaga budaya Indonesia yang didirikan di Suriname juga turut ikut andil dalam keberlangsungan eksistensi budaya Jawa, Indonesia di Suriname.

Meskipun etnis Jawa merupakan kelompok minoritas di Suriname, ini tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang etnis Jawa di Suriname tidak memiliki peran yang penting di

---

<sup>104</sup> Ibid

<sup>105</sup> “#TrenSosial: Keturunan Jawa di Suriname mulai dokter sampai polisi,” BBC Indonesia, 20 Maret 2015, [https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/03/150224\\_trensosial\\_sapoen\\_facebook](https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/03/150224_trensosial_sapoen_facebook).

dunia perpolitikan Suriname. Pencalonan Raymond Sapoen sebagai presiden Suriname pada tahun 2015 sangat membuktikan bahwa orang-orang etnis Jawa memiliki jabatan strategis di perpolitikan Suriname.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allen, Pamela. "Javanese cultural traditions in Suriname 1." *RIMA: Review of Indonesian and Malaysian Affairs* 45, (2011): 199-223.  
[https://www.academia.edu/4344194/Javanese\\_Cultural\\_Traditions\\_in\\_Suriname](https://www.academia.edu/4344194/Javanese_Cultural_Traditions_in_Suriname)
- BBC, "#TrenSosial: Keturunan Jawa di Suriname mulai dokter sampai polisi." BBC Indonesia, 20 Maret 2015.  
[https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/03/150224\\_trensosial\\_sapoen\\_face\\_book](https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/03/150224_trensosial_sapoen_face_book)
- Central Intelligence Agency. "Suriname." The World Factbook. Terakhir diubah 8 November 2021. <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/suriname/>
- Hoefte, Rosemarijn. "Cleansing the world of the germ of laziness: hygiene, sanitation, and the Javanese population in Suriname." *História, Ciências, Saúde-Manguinhos* 21, no. 4 (2014): 1437-1455.  
<https://www.narcis.nl/publication/RecordID/oai:pure.knaw.nl:publications%2F75c8a6e5-3dde-4348-be44-ec507e8881bd>
- Hoefte, Rosemarjin. *Suriname in the Long Twentieth Century: Domination, Contestation, Globalization*. New York: Palgrave Macmillan, 2014.
- Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. "Hubungan Bilateral Suriname." Diakses pada 9 Januari 2021. <https://kemlu.go.id/paramaribo/id/read/hubungan-bilateral-suriname/416/etc-menu>
- Komariyah, Siti., dan Puspa Ruriana. "PEMERTAHANAN BAHASA JAWA DI SURINAME." In: Seminar Nasional Pemertahanan Bahasa Nusantara, Hotel Pandanaran Semarang. (6 Mei 2010): 53-57. <http://eprints.undip.ac.id/36880/1/7.pdf>
- Rahmat, Acep., Nana Supriatna dan Moch Eryk Kamsori. "Dari Imigrasi Menuju Integrasi: Peranan Etnis Jawa dalam Politik di Suriname (1991- 2015)." *Factum: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah* 7, no. 1 (2018): 1-14.  
<https://ejournal.upi.edu/index.php/factum/article/view/11923/7178>



- St-Hilaire, Aongh. "Ethnicity, assimilation and nation in plural Suriname." *Ethnic and Racial Studies* 24, no. 6 (2001): 998–1019.  
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01419870120077940>
- Thomson, Alex. *An Introduction to African Politics*. Abingdon: Routledge, 2010.
- Villierius, Sophie. *Development of Surinamese Javanese: Language contact and change in a multilingual context*. Leiden: LOT Publishers, 2018.  
[https://www.lotpublications.nl/Documents/528\\_fulltext.pdf](https://www.lotpublications.nl/Documents/528_fulltext.pdf)
- Zed, Mestika. "Warisan Penjajahan Belanda di Indonesia Pasca-Kolonial (Perspektif Perubahan Dan Kesenambungan)." *Diakronika: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan* 17, no. 1 (2017): 90-103.  
<http://diakronika.ppj.unp.ac.id/index.php/diakronika/article/view/18/7>

# Dampak *Collapse*-nya *Evergrande* Terhadap Perkenomian Global

Elsa Mulyani, Salsabila

## ***Abstract***

*This paper aims to explain how the impact of Evergrande as a multinational company engaged in property in China is able to affect global economic conditions. This is motivated by the position of China which has become one of the great powers and its hegemony in the global economy. The first part will explain the real condition of Evergrande in the global order. The second part will describe the actual conditions that accompanied and caused the collapse of Evergrande. The third part will examine the impact on global markets and the impact on related actors such as the state, in this case the impact on Indonesia will be discussed. The author finds that the impact of Evergrande's collapse worsened the global economy.*

**Keywords:** *Property, Collapse, Global, Evergrande*

## **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana dampak Evergrande sebagai sebuah perusahaan multinasional yang bergerak dibidang properti di Tiongkok mampu mempengaruhi kondisi perekonomian global. Hal ini dilatar belakangi dengan posisi Tiongkok yang telah menjadi salah satu kekuatan besar dan hegemoninya dalam perekonomian global. Bagian pertama akan dijelaskan mengenai kondisi riil Evergrande dalam tatanan global. Bagian kedua akan dipaparkan kondisi aktual yang mengiringi serta menjadi penyebab collapse nya Evergrande. Bagian ketiga akan mengkaji dampak yang diberikan dalam pasar global serta dampak yang diberikan terhadap aktor-aktor terkait seperti negara, dalam hal ini yang akan dibahas adalah dampak yang diberikan ke Indonesia. Penulis menemukan bahwa dampak dari *collapse*-nya Evergrande memperburuk perekonomian global.

**Kata Kunci:** *Properti, Collapse, Global, Evergrande*

## **Pendahuluan**

Kondisi ekonomi global mengalami perubahan kearah yang buruk karena hadirnya *Corona virus Disease 2019* (COVID-19) yang ditetapkan sebagai pandemi. Banyak sektor-sektor strategis yang menjadi korban dari pandemi ini, salah satunya sektor perekonomian. Tiongkok sebagai negara yang merupakan sumber virus tersebut juga mengalami kerugian besar-besaran akibat stagnasi di seluruh sektor di negaranya. Hal ini menjadi pukulan bagi perekonomian global.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> International Monetary Fund, *World Economic Outlook: Recovery During a Pandemic - Health Concerns, Supply Disruptions, and Price Pressures*, 2021, <https://ieep.gwu.edu/2021/10/26/imf-world-economic-outlook-recovery-during-a-pandemic-health-concerns-supply-disruptions-and-price-pressures/>.

Namun, kondisi tersebut tidak berlangsung lama karena negara-negara saling bekerja sama dalam membangun kembali perekonomiannya.<sup>107</sup>

Tiongkok merupakan salah satu aktor penting dalam tataran internasional karena hegemoninya yang terlihat mencuat di sektor perekonomian. Tiongkok memiliki mega proyek yang mampu menghubungkan negara-negara yang ada di sekitarnya dalam melakukan kerjasama sehingga mampu meningkatkan kiprah ekonomi negara tirai bambu tersebut. Selain negara yang menjadi aktor dominan, tak kalah pentingnya eksistensi swasta yang turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam perekonomian Tiongkok, salah satunya Evergrande.<sup>108</sup>

Evergrande merupakan salah satu perusahaan di Tiongkok yang bergerak dibidang pengemabangan *real estate* dengan jumlah pendapatan yang berada diposisi kedua. Perusahaan yang berdiri pada tahun 1996 ini tidak hanya bergerak dibidang real estate, namun juga terlibat aktif dalam menjadi pengembang di sektor lain seperti mobil listrik, taman hiburan, bahkan sektor penting seperti kesehatan dan makanan. Kiprah Evergrande mengalami peningkatan semenjak masuk ke dalam Bursa Efek di Hong Kong pada tahun 2009. Setidaknya, terdapat sejumlah 248 anak perusahaan yang berada di bawah Evergrande Group, salah satunya adalah Tiongkok Evergrande New Energy Vehicle yang bergerak dalam produksi mobil listrik.<sup>109</sup> Namun, hingga saat ini belum ada satupun dari hasil produksi tersebut yang laku dijual di pasaran oleh Evergrande.

Sebagai sebuah perusahaan yang besar, Evergrande terlibat dalam kerjasama internasional terkait real estate yang secara tidak langsung perusahaan tersebut memberikan sumbangsih terhadap pembangunan Tiongkok. Dalam kondisi sistem politik Tiongkok yang tersentralisasi pada pemerintah domestik, banyak regulasi yang memiliki kemungkinan besar yang dapat mengganggu stabilitas dan kinerja dari Evergrande. Salah satunya ialah kebijakan tentang pembatasan pinjaman yang ditetapkan oleh pemerintah Tiongkok bagi perusahaan. Kebijakan tersebut menciptakan skema Ponzi yang mengharuskan Evergrande piawai dalam menggulir keuangannya. Secara tidak langsung, pembatasan tersebut merupakan salah satu penyebab Evergrande harus menghadapi kondisi *default* atau kondisi yang mengharuskan perusahaan tersebut tidak mampu membayar utang dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

---

<sup>107</sup> Dedi Junaedi and Faisal Salistia, "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak," in *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2020, 995–1115.

<sup>108</sup> Leonard P Goldberger and Leonard Goldberger, "A Guide to the Evergrande Debacle : Four Questions for Making Sense of What Lies Ahead," *ABI Journal*, 2021.

<sup>109</sup> Goldberger and Goldberger.

Evergrande sebagai perusahaan properti mengalami permasalahan besar terkait banyaknya hutang yang harus dilunasi karena membangun *real estate* namun tidak memperoleh keseimbangan dalam pelunasan hutang tersebut. Adanya skema Ponzi yang diciptakan oleh perusahaan itu sendiri karena untuk menunjang operasional juga diperoleh melalui utang, sehingga ketika regulasi dari pemerintah Tiongkok diterapkan, perusahaan seperti Evergrande tidak mampu bertahan. Keruntuhan Evergrande juga didukung oleh kondisi finansial internal yang tidak memadai sehingga perusahaan tidak memiliki kesempatan untuk meminjam utang kembali atau membayar utang yang telah dipinjam.

Dalam krisis yang dihadapi perusahaan sekelas Evergrande, jumlah utang yang dimiliki setara dengan utang nasional Finlandia, yakni sejumlah 300 miliar US Dollar. Hal ini membuat Evergrande harus menjual propertinya dengan harga dibawah ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya (diskon) yang dilakukan secara besar-besaran namun belum mampu menutup utang yang telah dipinjam oleh Evergrande. Memburuknya harga saham juga obligasi Evergrande memberikan masalah baru bagi perusahaan tersebut.<sup>110</sup>

Dalam proses pengembangan *real estate* tersebut, Evergrande sebagai sebuah perusahaan multi-nasional melibatkan banyak perusahaan maupun investor asing di dalamnya. Evergrande memiliki citra yang baik dalam pasar global khususnya properti, sehingga saat proses pembangunan berlangsung banyak dari properti tersebut dibeli oleh perorangan, kelompok maupun perusahaan tertentu. Hal ini tentu akan berimbas pada kelompok-kelompok yang menjalin kerjasama dengan Evergrande, jika perusahaan tersebut bangkrut, maka deposit yang telah dibayarkan tidak akan dapat dikembalikan. Alasan lainnya yang membuat *collapse* nya Evergrande berdampak pada ekonomi global ialah didasarkan bahwa Evergrande memiliki utang yang tersebar baik terhadap Bank domestik maupun perusahaan keuangan lainnya.

Evergrande bukanlah satu-satunya perusahaan yang mengalami kondisi tersebut, sebelumnya sebuah perusahaan besar di negara adidaya Amerika Serikat yakni Lehman Brothers mengalami hal yang serupa. Mega korporasi tersebut mengalami kebangkrutan pada tahun 2008 yang berdampak pada ekonomi global. Berkaca dari kasus tersebut, kondisi yang dialami oleh Evergrande merupakan kondisi sistemik yang memiliki permasalahan yang diawali dari permasalahan keuangan, perdagangan dan dapat berdampak terhadap valuta asing. Besarnya utang

---

<sup>110</sup> E-HOUSE, "China Evergrande Group: Strategic Repositioning Toward a Sustainable Growth Model," 2019, [http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/html/2010-06/09/content\\_539576.htm](http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/html/2010-06/09/content_539576.htm).

yang dimiliki oleh Evergrande mampu memengaruhi likuiditas perbankan yang perannya sebagai kreditur perusahaan. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan kondisi *rush*; yaitu sebuah kondisi yang dilakukan masyarakat dengan menarik uang secara besar-besaran dari Bank.

Pemerintah Tiongkok memiliki kontribusi yang besar dalam terjadinya krisis dan juga dalam menangani krisis yang dialami oleh Evergrande. Krisis Evergrande memiliki implikasi terhadap terjadinya devaluasi atau penurunan nilai mata uang yang berakibat terhadap valuta asing, khususnya rupiah ke yuan dan dollar. Selain itu, dampak lain yang juga dirasakan oleh Indonesia sebagai negara yang bekerjasama dengan Tiongkok dalam sektor ekonomi ialah dampak tidak langsung terhadap pasar saham, obligasi bahkan aktivitas ekspor impor.<sup>111</sup>

### **Evergrande**

Evergrande merupakan perusahaan properti terbesar di Tiongkok yang sudah berdiri selama 24 tahun, selain bisnis properti, Evergrande juga memiliki bisnis di sektor olahraga – pemilik klub bola terbesar di Tiongkok yaitu Guangzhou FC-, taman hiburan, manufaktur makanan dan minuman serta kendaraan listrik. Dalam bisnis properti, Evergrande memiliki lebih dari 1.300 proyek di 280 kota<sup>112</sup> dengan menawarkan *model ‘three highs and one low’* yaitu *high debt, high leverage, high turnover and low cost* atau singkatnya Evergrande menawarkan properti yang unggul dengan harga yang murah pada konsumennya menjadikan Evergrande diminati banyak orang. Kehadiran Evergrande dinilai sebagai gambaran mengenai tingginya pertumbuhan penduduk dan cepatnya laju urbanisasi di Tiongkok sebab perusahaan ini memberikan fasilitas rumah dan properti kepada urban desa-kota di Tiongkok yang sudah terjadi sejak tahun 1990-an. Pada tahun 90-an, pemerintah Tiongkok membuat inisiatif kebijakan untuk meningkatkan pendapatan penduduknya dengan menerapkan liberalisasi kebijakan dalam tanah serta mereformasi kebijakan fiskal dan moneter di negaranya yang kemudian kebijakan ini menyebabkan tingginya urbanisasi desa-kota. Dalam keadaan seperti ini, Evergrande hadir untuk memfasilitasi urban Tiongkok dengan menawarkan properti berharga murah oleh karenanya sejak saat itu hingga sekarang Evergrande menjadi ‘raksasa’ properti di Tiongkok.<sup>113</sup>

### **Collapse-nya Evergrande**

---

<sup>111</sup> Michael Ewy, “THE GREAT RESET Evergrande and the Final Meltdown of the Global Financial System,” 2021.

<sup>112</sup> Michael Ewy

<sup>113</sup> E-House China, 2019, China Evergrande Group: Strategic Repositioning Toward a Sustainable Growth Model

Pada akhir tahun 2021, Evergrande mengalami kolaps dan saham yang dimilikinya anjlok hingga hampir menyentuh angka 80%. Bahkan Fitch dan S&P yang merupakan lembaga pemeringkat perusahaan menurunkan rating Evergrande sebab kacaunya keuangan mereka. Penyebab kolaps ini terjadi karena Evergrande kekurangan uang sebab sebelumnya Evergrande terlalu banyak meminjam uang yang menyebabkan Evergrande tidak bisa membayar utang. Selain itu, cara Evergrande mengelola perusahaannya juga dianggap buruk dengan kurang memperhatikan tata kelola keuangan mereka. Evergrande memiliki lebih dari setengah jumlah obligasi yang akan jatuh tempo pada waktu dekat, dari 24 obligasi yang telah diterbitkan, enam obligasi akan jatuh tempo pada tahun 2022 serta sepuluh obligasi yang akan jatuh tempo pada tahun 2023 selain itu Evergrande juga memiliki utang kepada perbankan dan lembaga keuangan lainnya sebesar CNY 572 miliar.<sup>114</sup> Krisis Evergrande menyedot perhatian banyak pihak, sejumlah investor berniat membantu perusahaan ini dengan melepaskan hak pengembalian sahamnya sebesar \$13 miliar.<sup>115</sup> Kolapsnya Evergrande dipengaruhi juga oleh kebijakan baru Xi Jinping yang mencoba membatasi obsesi rakyatnya dalam bisnis properti dengan menaikkan harga sewa rumah dan tanah untuk mengontrol pasar.<sup>116</sup>

### **Dampak *Collaps*-nya Evergrande Terhadap Ekonomi Tiongkok dan Indonesia**

Krisis utang Evergrande memberikan dampak kepada keseimbangan bisnis di dalam pasar, pada sektor pasar pemasok bahan bangunan untuk proyek Evergrande misalnya sejak Evergrande mengalami krisis saham di sektor ini mengalami penurunan. Evergrande memiliki aset sebesar 310 miliar dollar AS yang nilai itu berkontribusi terhadap 2% dari Produk Domestik Bruto Tiongkok sehingga krisis yang dialami oleh perusahaan ini akan mengganggu pasar jika tidak segera ditangani. Menurut laporan, separuh dari nilai saham Evergrande Property Services Group Ltd pada tahun 2021 telah berkurang setengahnya kemudian China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd juga mengalami penurunan saham hingga lebih dari 90%. Penurunan saham Evergrande ini tidak hanya akan berdampak pada ekonomi Tiongkok tetapi juga berdampak pada ekonomi Amerika Serikat selaku salah satu negara eksposur properti ke Tiongkok. Di Eropa, analis JPMorgan Chase & Co Stephen Tusa memprediksi krisis Evergrande akan mengguncang pasar

---

<sup>114</sup> Wareza, Monica, 25 September 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210925111647-17-279074/kisah-ancaman-bangkrut-evergrande-china-efeknya-nan-dahsyat>, diakses pada 24 Desember 2021

<sup>115</sup> David Scanlan dan Cathy Chan, "What is China Evergrande and why is it important?," *Washington Post* [https://www.washingtonpost.com/business/what-is-china-evergrande-and-why-is-it-in-trouble/2021/12/05/1bfaf480-55a9-11ec-83d2-d9dab0e23b7e\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/business/what-is-china-evergrande-and-why-is-it-in-trouble/2021/12/05/1bfaf480-55a9-11ec-83d2-d9dab0e23b7e_story.html), diakses pada 24 Desember 2021

<sup>116</sup> Scanlan dan Chan

bahan dasar Eropa dan perusahaan yang akan berdampak adalah BHP Group Plc sebab Tiongkok merupakan penyumbang pendapatan mereka hingga 62%. Untuk menangani masalah ini, Evergrande mengambil langkah cepat dengan membayar bunga wesel lokal walaupun upaya ini tidak cukup untuk mengatasi krisis sebab pemegang obligasi dolar masih belum menerima kupon jatuh tempo.<sup>117</sup>

Kasus Evergrande merupakan kasus yang serius bagi ekonomi Tiongkok sebab *pertama*, banyak masyarakat Tiongkok yang membeli rumah atau bangunan sebelum proses pembangunan terjadi dengan membayar uang deposit hal ini dapat menyebabkan masyarakat Tiongkok yang membeli bangunan di Evergrande kehilangan uangnya begitupun dengan perusahaan-perusahaan yang mempercayakan pembangunan infrastrukturnya pada Evergrande. *Kedua*, perusahaan pemasok bahan bangunan akan berpotensi besar mengamali kebangkrutan. *Ketiga*, kondisi ini berpotensi besar memberikan dampak terhadap finansial Tiongkok sebab jika Evergrande benar-benar gagal membayar hutang maka perbankan akan terkena dampaknya juga dengan terjadinya krisis kredit. *Keempat*, kondisi ini akan mempengaruhi investor yang akhirnya enggan menginvestasikan uangnya di Tiongkok.<sup>118</sup> Kehadiran investor terhadap perusahaan properti sangat diperlukan oleh Tiongkok sebab melalui sektor real estate Tiongkok bisa menumbuhkan ekonominya dengan signifikan, selama lima tahun terakhir sektor real estate memberikan dana investasi mencapai 13,5% dari produk domestik bruto yang jumlah tersebut diperkirakan tiga kali lipat lebih besar daripada Amerika Serikat.<sup>119</sup>

Pada kasus Evergrande ini, sejumlah pihak meyakini jika pemerintah Tiongkok akan turun tangan dalam menangani kasus krisis misalnya Mark Williams seorang kepala Asia economist at Capital Economics yang sangat yakin pemerintah Tiongkok akan turun tangan sebab pemerintah Tiongkok tidak akan mungkin membiarkan hal ini berdampak pada sektor bank yang lain sehingga menyebabkan kerusakan lebih parah momen ini juga sekaligus menjadi kesempatan pemerintah Tiongkok untuk unjuk kebolehan dalam mengelola negara.<sup>120</sup>

---

<sup>117</sup> Ambaranie Nadia Kemala Movanita (ed), 26 September 2021, <https://money.kompas.com/read/2021/09/26/160039926/ini-dampak-krisis-evergrande-bagi-china-as-hingga-eropa?page=all>, diakses pada 24 Desember 2021

<sup>118</sup> BBC, "Evergrande: China property giant misses debt deadline," dalam <https://www.bbc.com/news/business-58579833>, diakses pada 24 Desember 2021

<sup>119</sup> Sandria, Ferry, 21 September 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210921130445-17-277926/dahsyat-begini-efek-evergrande-terhadap-ekonomi-china>, diakses pada 24 Desember 2021

<sup>120</sup> Domm, Patti, 20 September 2021, <https://www.cnbc.com/2021/09/20/chinas-evergrande-crisis-could-inflict-pain-on-the-world-economy.html> diakses pada 24 Desember 2021

Tiongkok memiliki kemampuan untuk mengatasi krisis Evergrande sebab Tiongkok memiliki kapasitas fiskal, perangkat hukum dan sejumlah lembaga yang bisa mengatasi masalah ini. Sejauh ini, pemerintah Tiongkok telah mendorong perusahaan milik pemerintah (BUMN) dan pengembang properti lain yang didukung negara untuk membeli beberapa aset Evergrande. IMF menilai, apapun langkah kebijakan yang akan diambil pemerintah Tiongkok selama memiliki rencana yang jelas maka krisis ini bisa diatasi. Namun, IMF tetap menegaskan agar pemerintah Tiongkok tetap memperhatikan aspek ekonomi berkelanjutan dalam menangani kasus ini.<sup>121</sup>

Terdapat isu bahwa keseriusan pemerintah Tiongkok untuk membantu krisis Evergrande didorong motif keinginan pemerintah Tiongkok untuk menjadikan Evergrande sebagai salah satu BUMN di negaranya sebagai upaya menyelamatkan pembeli rumah maupun investor ritel produk manajemen aset Evergrande. Akan tetapi, sejumlah berita menerangkan jika campur tangan pemerintah Tiongkok baru akan terjadi ketika Evergrande benar-benar gagal melikuidasi bisnisnya. Meskipun begitu, pemerintah pusat telah memerintahkan sejumlah aparat pemerintah daerah dan BUMN untuk bersiap menghadapi guncangan ekonomi yang disebabkan krisis Evergrande. Menurut Samuel Sekuritas yang merupakan seorang analis pemerintah Tiongkok kesulitan menghadapi krisis ini sebab Evergrande bukan satu-satunya pengembang properti yang memiliki rasio utang tinggi sehingga anggaran dana maupun perhatian pemerintah Tiongkok bisa terbagi.<sup>122</sup>

Dari sejumlah langkah yang telah diambil tersebut tampaknya pemerintah Tiongkok lebih serius menangani hal ini daripada pemerintah Amerika Serikat ketika kasus Lehman Brothers tahun 2008 terjadi. Keseriusan pemerintah Tiongkok ini dapat terjadi sebab krisis Evergrande merupakan bencana yang sudah diketahui akan terjadi sebab berkaitan dengan penerapan aturan baru yaitu aturan tiga garis merah' oleh pemerintah Tiongkok yang membatasi pinjaman perusahaan properti tertentu. Dalam hal ini, pemerintah Tiongkok tepat setahun sebelum krisis Evergrande terjadi atau saat aturan ini dikeluarkan sudah memprediksi Evergrande akan terkena dampak dari kebijakan baru ini yang berakibat pada merosotnya keseluruhan saham Evergrande

---

<sup>121</sup> Amani, Ntasha Khairunnisa, 13 Oktober 2021, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4682969/imf-china-sebenarnya-mampu-selesaikan-masalah-utang-evergrande>, diakses pada 26 Desember 2021

<sup>122</sup> Saputra, Dany, 27 September 2021, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210927/9/1447239/menanti-langkah-agresif-china-atasi-virus-evergrande>, diakses pada 26 Desember 2021



hingga hampir 90% pada tahun ini. Kebijakan ini diambil sebab selama puluhan tahun sektor properti terus-menerus meminjam uang ke berbagai pihak yang menyebabkan adanya fenomena pinjaman tak terkendali di sektor usaha ini. Bank sentral China dan Bank Rakyat China menyebut praktik ini sebagai tindakan beresiko tinggi jika terus dilakukan sehingga pemerintah Tiongkok mengeluarkan keputusan untuk menerapkan kebijakan ‘tiga garis merah’.

Krisis Evergrande berbeda dengan Lehman Brothers karena krisis Evergrande sengaja dibuat terjadi oleh pemerintah Tiongkok dengan mekanisme pelan namun pasti sedangkan Lehman Brothers merupakan bencana ‘kejutan’ yang dalam proses krisisnya tidak disebabkan oleh pemerintah secara langsung. Pada kasus Lehman Brothers, pemerintah AS harus membuat legislasi supaya mempunyai kewenangan untuk bisa mengintervensi urusan perusahaan swasta sedangkan Tiongkok tidak melakukan langkah tersebut karena mereka memiliki sistem ekonomi sosialis yang melgitimasi campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi rakyatnya. Dalam hal ini, pemerintah Tiongkok berusaha untuk mengendalikan pasar properti melalui bank-bank milik negara sehingga terlihat perusahaan mana saja yang akan mengalami kesulitan keuangan di kemudian hari sedangkan Amerika Serikat sebagai negara ekonomi pasar tidak membuat mekanisme ini sehingga kehancuran Lehman Brothers ‘mengejutkan’ pemerintah AS. Di samping itu, Tiongkok lebih selektif dan berhati-hati dalam mengambil tindakan saat krisis ekonomi menghantam negaranya, saat kasus krisis keuangan AS tahun 2008 pemerintah AS memberikan sejumlah bantuan pada bank-bank besar yang mereka miliki sedangkan pemerintah Tiongkok membuat perhitungan sistematis yang melihat bagian terpenting yang harus diselamatkan dan sebisa mungkin tidak mengganggu operasional harian Evergrande sebab jika operasional harian Evergrande terganggu hal ini akan mengganggu juga ekonomi masyarakat yang telah membeli properti pada Evergrande. Pemerintah Tiongkok menginginkan agar Evergrande menyelesaikan proyek-proyek perumahan yang sedang dikerjakan agar kalangan pembeli dari warga biasa tidak terganggu dan kepercayaan terhadap pasar properti tidak terganggu dengan serius. Langkah pemerintah Tiongkok ini dinilai tepat untuk mengurangi dampak kerugian di pasar perumahan akan tetapi hal ini dapat menjadikan harga di pasar properti terus menurun, akibatnya calon pembeli menunda pembelian aset di pasar properti yang bisa mengakibatkan kegiatan pasar menjadi lesu. Jika seandainya pasar properti Tiongkok lesu maka hal ini akan mempengaruhi kepercayaan investor internasional terhadap obligasi real estate Tiongkok yang menjadikan biaya

pinjaman dari investor internasional untuk pengembangan properti Tiongkok menjadi lebih mahal.<sup>123</sup>

Seperti dikutip dari Reuters, PBOC menyuntikan dana sebesar 90 miliar yuan (14 miliar dolar AS atau setara Rp 199,4 triliun) ke dalam sistem perbankan untuk mendukung kondisi pasar stabil saat dibuka kembali. Sebagai informasi, pasar saham Tiongkok harus ditutup selama dua hari karena adanya hari libur untuk merayakan Festival Musim Gugur. Kekhawatiran muncul karena kondisi Evergrande yang terlilit uang ditakutkan dapat berdampak besar terhadap perekonomian Tiongkok. Hal ini membuat investor di pasar saham dan oblior global kian gelisah. Kepala Investasi EM Sumitomo Mitsui Bank Tokyo Yasutada Suzuki mengatakan suntikan dana tunai PBOC merupakan upaya resmi pemerintah untuk mencegah terjadinya krisis.<sup>124</sup>

Presiden Direktur Schroders Indonesia Michael T. Tjoajadi menilai kasus Evergrande tentu akan memberikan dampak terhadap pasar keuangan Tiongkok tetapi efek yang diterima oleh Indonesia tidak akan sebesar efek yang dirasakan Tiongkok, Tjoajadi menegaskan investro Indonesia tidak perlu khawatir dan uang mereka akan tetap aman. Keuangan Indonesia tetap aman-aman saja hal ini dapat dilihat dari cadangan devisa Indonesia berada pada kisaran US\$146,9 miliar pada bulan September 2021 tepat ketika kasus Evergrande terjadi. Artinya, meskipun Evergrande krisis keuangan Indonesia tetap baik-baik saja bahkan naik 1,45 persen dari bulan Agustus. Selain itu, CAD Indonesia juga berada di bawah 1,5 persen dari PDB dan Bank Indonesia (BI) juga berada pada posisi aman sebab tingkat suku bunga acuannya bernilai positif. Oleh karenanya, Indonesia berada pada posisi yang sangat baik, karena pertumbuhan ekonominya cenderung meningkat pasca COVID-19 berbeda dengan beberapa negara lain yang bahkan suku bunga acuannya masih negatif dan perekonomiannya tergoncang karena kebijakan likuiditas (tapering) di bank sentral AS, The Federal Reserve.<sup>125</sup>

Namun di sisi lain, krisis keuangan Evergrande membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani waspada sebab jika Evergrande benar-benar tidak mampu membayar utangnya maka akan

---

<sup>123</sup> Oi, Mariko, 26 Desember 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-59740020>, diakses pada 26 Desember 2021

<sup>124</sup> Masya Fameli Rhusellin, "Cegah krisis Evergrande, bank sentral China sunti dana ratusan triliun," <https://www.kompas.com/properti/read/2021/09/22/190000721/cegah-krisis-evergrande-bank-sentral-china-suntik-dana-ratusan-triliun>, diakses pada 26 Desember 2021

<sup>125</sup> CNN Indonesia, "Alasan RI tak perlu khawatir efek gagal bayar Evergrande," <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211007190315-92-704876/alasan-ri-tak-perlu-khawatir-efek-gagal-bayar-evergrande>, diakses pada 24 Desember 2021

berakibat pada ekspor komoditas Indonesia karena ekspor komoditas sangat dipengaruhi oleh global economic recovery yang digerakan oleh Tiongkok, Eropa dan Amerika. Selain Sri Mulyani, ekonom Bhima Yudhisitira juga merasa risau sebab kegagalan Evergrande melunasi utangnya akan meningkatkan persepsi risiko di sektor properti yang meningkat sehingga membuat investor dan perbankan lebih ketat menyeleksi untuk mendanai proyek properti atau real estate yang skalanya jumbo, hal ini mengakibatkan terjadinya credit crunch atau sulitnya mendapat pinjaman bagi pengembang properti padahal proyek properti akan diperkirakan kembali aktif setelah Covid-19 mereda. Bhima memproyeksikan setelah Covid-19 di Indonesia mereda atau berakhir, kelas menengah dan atas yang sebelumnya menahan uang mereka untuk membeli rumah atau apartemen setelah Covid-berakhir mereka akan mulai membeli rumah dan apartemen kembali karena roda ekonomi yang kembali berjalan tetapi karena adanya kasus Evergrande kelas menengah dan atas akan bisa saja tetap menahan uang mereka karena tidak mau merugi sehingga kasus Evergrande bisa juga menjadi hambatan untuk ekspansi properti.

Lebih jauh, Bhima khawatir kinerja ekspor Indonesia akan melemah sebab kasus Evergrande akan berdampak pada sektor bahan baku atau material proyek properti seperti besi baja, keramik, bahan tambang hingga kayu yang mengalami penurunan permintaan karena imbas dari kasus Evergrande sehingga rantai pasok perusahaan di bidang ekspor material properti harus dicermati jika krisis properti di Tiongkok terjadi berlarut-larut maka bukan tidak mungkin kinerja ekspor properti Indonesia juga akan melemah. Kasus Evergrande menjadi pelajaran bagi Indonesia jika kelebihan utang pada sebuah perusahaan akan berdampak tidak sehat sehingga BUMN yang memiliki utang tinggi harus berhati-hati agar tidak terjadi krisis seperti Evergrande terutama BUMN di bidang konstruksi. Tercatat pada bulan Agustus 2021 ekspor Indonesia mencapai 21,42 miliar dollar AS yang nilainya naik sebab ada kenaikan harga batu bara, nikel dan kelapa sawit, kebangkrutan Evergrande dikhawatirkan akan berdampak pada ekspor Indonesia yang sedang baik.<sup>126</sup>

Pemerintah Tiongkok telah merumuskan kebijakan *three red lines* atau tiga garis merah yang bertujuan untuk mengurangi risiko tingkat utang dari sektor properti yang sedang menjamur di negaranya. Sejumlah ahli ekonomi Indonesia berpendapat Indonesia tidak akan terdampak dari

---

<sup>126</sup> Rizal, Jawahir Gustav & Inggried Dwi Wedhaswary (editor), 4 Oktober 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/04/125500165/krisis-evergrande-apa-dampaknya-untuk-indonesia-?page=all>, diakses pada 24 Desember 2021

krisis Evergrande ini tetapi harus tetap mewaspadai efek dominonya yang berpotensi mengacaukan sektor properti di Indonesia. Jika seandainya pemerintah Tiongkok tidak menangani hal ini dengan tepat maka Tiongkok berpotensi untuk mengurangi pembelian barang-barang ekspor dari Indonesia sehingga mempengaruhi perekonomian Indonesia. Namun sejumlah ahli memprediksi jika efek domino dari Evergrande ini tidak akan sebesar seperti yang terjadi saat krisis Lehman Brothers pada tahun 2008. Asumsi ini didasari pada perbedaan antara Lehman Brothers dengan Evergrande. Evergrande dominan mengembangkan bisnisnya di sektor properti yang memiliki aset bernilai yang *valuenya* hampir tidak mengalami penyusutan sedangkan Lehman Brothers mengandalkan surat utang yang lebih rentan goyah jika ada masalah ekonomi. Selain perbedaan fokus pengembangan bisnis, penanganan krisis di Amerika Serikat dengan Tiongkok juga berbeda. AS menitikberatkan krisis Lehman Brothers pada kebijakan pasar sehingga mau tidak mau Lehman Brothers harus ‘mandiri’ menangani krisis yang mereka hadapi sedangkan pemerintah Tiongkok akan lebih mengintervensi dan melakukan proyeksi sebab mereka memiliki kebijakan ekonomi sosialis sehingga kebijakan pemerintah Tiongkok akan menjadi penentu apakah Evergrande akan keluar dari krisis atau tidak. Para ahli ekonomi menyatakan walaupun kasus Evergrande di Tiongkok bisa memicu krisis ekonomi global tetapi bisnis properti di Indonesia relatif aman sebab investasi properti di Indonesia didominasi oleh investor lokal yang mana alur investasinya mengikuti pergerakan pasar lokal sehingga iklim investasinya sesuai dengan pergerakan ekonomi Indonesia. Seandainya krisis Evergrande membawa efek maka efeknya tidak akan terlalu besar, maksimal hanya akan berpengaruh pada kehati-hatian investor asing dalam menanamkan modal di sektor properti Asia namun tidak berpengaruh pada kinerja pasar secara langsung. Namun, dalam jangka panjang hal ini bisa mempengaruhi pengembangan bisnis properti di Indonesia, jika perusahaan induk di Tiongkok mati maka perusahaan Indonesia juga berpotensi untuk mati namun ada skenario lain yaitu pasar properti di Indonesia dianggap menjanjikan dengan kinerja yang baik maka bukan tidak mungkin pasar properti di Indonesia akan menjadi pusat pengembangan mengalahka pasar properti di Tiongkok sebab pasar lokal tidak dipengaruhi oleh krisis tersebut. Salah satu perusahaan properti Indonesia yang bekerjasama dengan pengembang Tiongkok adalah PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) yang telah meneken kerja sama dengan China Fortune Land Development Co Ltd (CFLD) sejak lima tahun yang lalu dalam proyek

pengembangan salah satu kawasan di Tangerang. Meskipun Tiongkok sedang mengalami krisis tetapi kerjasama antara ASRI dengan CFLD masih tetap berlanjut.<sup>127</sup>

Menurut Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri, dampak krisis Evergrande ke Indonesia setidaknya bisa melalui dua jalur yaitu ekspor dan utang. Dari sisi ekspor, Yose mengatakan krisis likuiditas Evergrande bisa berdampak pada penurunan harga komoditas karena pengaruh langsung terhadap ekonomi Tiongkok. Namun, hal itu akan terjadi jika upaya pemerintah Tiongkok gagal melokalisasi risiko tersebut untuk meredam efek yang dihasilkan. Selanjutnya, dari sisi utang, krisis Evergrande bisa berdampak pada utang-utang dari negara berkembang yang berpotensi menjadi mengalami penurunan kredibilitas.

### **Kesimpulan**

Evergrande merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang properti dengan nama yang besar dalam pasar tersebut. Kiprahnya berdampak baik selama bertahun-tahun dan merupakan perusahaan mega proyek yang memiliki penghasilan terbesar kedua di Tiongkok. Salah satu mega proyek yang sedang berlangsung dijalankan oleh Evergrande ialah bisnis real estate yang melibatkan banyak pihak-pihak swasta, pemerintah maupun individu. Namun dalam perjalanannya, proyek ini mengalami masalah yang besar akibat banyaknya hutang yang dimiliki oleh Evergrande namun tidak mampu dibayar sesuai jatuh tempo, sehingga kondisi tersebut menimbulkan krisis yang berakibat pada jatuhnya Evergrande. Selain itu, Evergrande tidak hanya berdampak pada perekonomian dalam negeri, namun juga terhadap ekonomi global. Posisi Evergrande sebagai sebuah perusahaan multi-nasional yang melibatkan dan ikut dalam pasar global, memberikan dampak yang buruk terhadap kondisi pasar global, tidak terkecuali Indonesia. Dampak krisis tersebut menempatkan Indonesia dalam posisi yang berbahaya di pasar global seperti aktivitas ekspor impor, maupun saham dan obligasi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

E-HOUSE. "China Evergrande Group: Strategic Repositioning Toward a Sustainable Growth Model," 2019. [http://paper.people.com.cn/rmrhwb/html/2010-06/09/content\\_539576.htm](http://paper.people.com.cn/rmrhwb/html/2010-06/09/content_539576.htm).

---

<sup>127</sup> Muhdany Yusuf Laksono, "Apa dampak krisis Evergrande pada properti Indonesia? Ini kata REI," <https://www.kompas.com/properti/read/2021/09/29/160000021/apa-dampak-krisis-evergrande-pada-properti-indonesia-ini-kata-rei?page=all>, diakses pada 24 Desember 2021

- Ewy, Michael. "THE GREAT RESET Evergrande and the Final Meltdown of the Global Financial System," 2021.
- Goldberger, Leonard P, and Leonard Goldberger. "A Guide to the Evergrande Debacle : Four Questions for Making Sense of What Lies Ahead." *ABI Journal*, 2021.
- International Monetary Fund. *World Economic Outlook: Recovery During a Pandemic - Health Concerns, Supply Disruptions, and Price Pressures*, 2021.  
<https://iiep.gwu.edu/2021/10/26/imf-world-economic-outlook-recovery-during-a-pandemic-health-concerns-supply-disruptions-and-price-pressures/>.
- Junaedi, Dedi, and Faisal Salistia. "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak." In *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 995–1115, 2020.
- Wareza Monica. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210925111647-17-279074/kisah-ancaman-bangkrut-evergrande-china-efeknya-nan-dahsyat>, diakses pada 24 Desember 2021
- Ambaranie Nadia Kemala Movanita (ed).  
<https://money.kompas.com/read/2021/09/26/160039926/ini-dampak-krisis-evergrande-bagi-china-as-hingga-eropa?page=all>, diakses pada 24 Desember 2021
- BBC, "Evergrande: China property giant misses debt deadline," dalam <https://www.bbc.com/news/business-58579833>
- Sandria, Ferry. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210921130445-17-277926/dahsyat-begini-efek-evergrande-terhadap-ekonomi-china>, diakses pada 24 Desember 2021
- Domm, Patti. <https://www.cnbc.com/2021/09/20/chinas-evergrande-crisis-could-inflict-pain-on-the-world-economy.html> diakses pada 24 Desember 2021
- Amani, Ntasha Khairunnisa. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4682969/imf-china-sebenarnya-mampu-selesaikan-masalah-utang-evergrande>, diakses pada 26 Desember 2021.
- Saputra, Dany. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210927/9/1447239/menant-langkah-agresif-china-atasi-virus-evergrande>, diakses pada 26 Desember 2021.
- Oi, Mariko. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-59740020>, diakses pada 26 Desember 2021.
- Rizal, Jawahir Gustav & Inggried Dwi Wedhaswary (ed).  
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/04/125500165/krisis-evergrande-apa-dampaknya-untuk-indonesia-?page=all>, diakses pada 24 Desember 2021

# **Dampak Climate Change bagi Gajah dan Manusia: Perburuan Gading**

## **Mamut Sebagai Substitusi Gading Gajah**

Abimanyu Rizky Ilahi, Ayuda Lestika Putri, Elga Velisya

### ***Abstrack***

*This paper aims to analyze the impact of climate change on elephants and humans. In this paper the author tries to answer why mammoth tusks are the target of hunters as a substitute for elephant tusks. At first, countries and environmental activists considered that global warming had a bad effect on humans in many aspects. However, when global warming occurs and makes the ice around the north pole melt, this opens access to the discovery of mammoth fossils which are potential economic prospects. In this paper, the author finds that by hunting for mammoth tusks, the hunting of elephant tusks will decrease, and this also provides promising economic benefits.*

**Keywords:** *Climate Change, Mammoth Tusk, Elephant Tusk, Hunting*

### **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari climate change terhadap Gajah dan Manusia. Dalam tulisan ini penulis berusaha untuk menjawab mengapa Gading Mamut menjadi incaran pemburu sebagai pengganti Gading Gajah. Pada awalnya, para negara dan aktivis lingkungan menilai bahwa pemanasan global yang terjadi memberikan efek buruk terhadap manusia dalam banyak aspek. Meskipun demikian, ketika pemanasan global terjadi dan membuat es di sekitar kutub utara mencair, hal ini membuka akses terhadap penemuan fosil Mamut yang menjadi prospek potensial dalam ekonomi. Dalam tulisan ini, penulis menemukan bahwa dengan melakukan perburuan Gading Mamut, maka perburuan Gading Gajah akan berkurang, dan hal ini juga memberikan keuntungan ekonomi yang cukup menjanjikan.

**Kata Kunci:** Perubahan Iklim, Gading Mamut, Gading Gajah, Pemburuan

### **Pendahuluan**

Isu iklim saat ini masih terus hangat diperbincangkan. Permasalahan ini menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas bagi negara-negara hingga saat ini. Warga dunia terus mendesak pemimpin dunia untuk melakukan aksi nyata terhadap permasalahan ini. Bukan tanpa alasan, hal ini dilakukan karena permasalahan iklim dampaknya akan menyangkut banyak pihak. Bukan hanya peradaban manusia, tetapi peradaban semua makhluk hidup di muka bumi. Peneliti dan orang-orang kaya berlomba-lomba menemukan inovasi untuk mengatasi permasalahan iklim. Seperti miliarder di dunia saat ini berlomba-lomba menemukan cara agar dapat bertahan hidup di Mars. Meskipun usaha ini sudah dilakukan namun tetap saja belum menemukan titik terang. Saat

ini planet sudah jelas mampu untuk tempat kita bertahan hidup adalah bumi. Sehingga isu iklim ini benar-benar harus ditemukan jalan keluarnya secepatnya.

Pemanasan global yang merupakan penyebab perubahan iklim tidak dapat kita hentikan, namu laju perubahannya dapat kita perlambat.<sup>128</sup> Usaha-usaha yang dilakukan negara-negara di unia saat ini dengan mengadakan kesepakatan-kesepakatan. Pada tahun 1979, negara – negara di dunia mengadakan Konferensi Iklim di Jenewa untuk mengatasi perubahan iklim di tingkat internasional. Pemanasan global menjadi agenda pembahasan dalam kegiatan tersebut. Sebagai solusi kemudian, dibentuklah Badan Internasional Penilaian Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)).<sup>129</sup>

Setelah itu, negara – negara melakukan pertemuan pada tahun 1990, yang membahas tentang isu perubahan iklim dengan berlandaskan laporan penelitian – penelitian yang telah dilakukan IPCC. Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) akhirnya dibuat oleh PBB yang memiliki tujuan untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bumi dengan menerapkan upaya – upaya yang telah ditetapkan di dalam konvensi tersebut. Hasil dari pertemuan tersebut adalah teridentifikasinya dua kategori negara yaitu kelompok Annex I dan Annex II. Annex I ialah kelompok negara – negara industri, yaitu negara yang menghasilkan gas rumah kaca dalam jumlah besar serta sebagian besar kelompok ini merupakan negara yang berada dalam masa transisi ekonomi dan negara yang berkewajiban untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang mereka hasilkan dari kegiatan industri. Annex II merupakan kelompok negara – negara yang tidak berada pada masa transisi ekonomi namun merupakan anggota Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Berdasarkan pemaparan fakta di atas sudah jelas bahwa perubahan iklim merupakan bencana dan memberi dampak negatif bagi kehidupan manusia. Namun ternyata disamping itu, ada dampak positif di bidang ekonomi. Salah satunya seperti yang penulis akan bahas yaitu kepunahan Mamut berdampak positif secara ekonomi karena gadingnya dapat diperjual belikan dan pempadatkan keuntungan yang besar.

---

<sup>128</sup> David Herring and Rebecca Lindsey, ““Can We Slow or Even Reverse Global Warming?,” *Climate.Gov*, September 7, 2021, <https://www.climate.gov/news-features/climate-qa/can-we-slow-or-even-reverse-global-warming> .

<sup>129</sup> KCPI-IC Ican, “Upaya Ditingkat Internasional : Kesepakatan Dunia Dalam Menangani Perubahan Iklim” *Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan*, 2017, <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/aksi/mitigasi/implementasi/10-tentang/21-upaya-ditingkat-internasional> .



## Kondisi Climate Change

Proses alam dan ulah manusia yang terjadi dalam jangka waktu panjang dapat merubah komposisi atmosfer dan tata guna alam, salah satu contohnya yaitu terjadinya perubahan iklim, dimana IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) mendefinisikan bahwa perubahan iklim merujuk pada variasi rata – rata kondisi alam suatu tempat atau pada variabilitasnya yang nyata secara statistik untuk jangka waktu panjang.<sup>130</sup> Kemudian bencana alam dan cuaca ekstrem seperti kebakaran yang terjadi di Kutub Utara, banjir mematikan di Jerman dan Belgia pada Juli 2021, area es laut seukuran Florida menghilang di Artik dari Juni hingga pertengahan Juli 2021 merupakan dampak dari perubahan iklim. Hal ini terjadi karena kenaikan suhu diatas tingkat pra industri yaitu dengan rata – rata 1,1°C bahkan laporan penilaian keenam dari Kelompok Kerja I IPCC menunjukkan bahwa dunia dapat mencapai atau melampaui pemanasan 1,5°C dalam dua dekade.<sup>131</sup> Dunia akan bertambah buruk jika mengambil jalur intensif karbon (SSP5 – 8,5) sebab menaikkan tingkat pemanasan global dari 3,3 – 5,7°C diatas tingkat pra industri pada akhir abad ini.<sup>132</sup>

Semua hal itu dapat ditanggulangi jika dunia mengambil tindakan ambisius seperti melakukan perubahan transformasional yang cepat (mengubah cara menggunakan dan menghasilkan energy, membuat dan mengonsumsi barang dan jasa serta mengolah lahan yang kita miliki) untuk membatasi emisi pada tahun 2020-an sehingga pemanasan dapat dibatasi pada rata – rata hingga 1,5°C pada akhir abad ini. Skema tersebut berisi potensi kelebihan (overshoot) berselang 2041 dan 2060 dari tingkat 1,6°C ke suhu dibawah 1,5°C pada akhir abad ini. Selain itu, dunia harus mencapai emisi CO2 nol bersih dan mengurangi gas non-CO2 seperti metana secara besar – besaran untuk membantu membatasi dampak berbahaya dari perubahan iklim meski sistem iklim tidak akan langsung berubah.<sup>133</sup> Dampak perubahan iklim dirasakan diseluruh dunia, dimana kerugian manusia dan ekonomi akan sangat besar daripada biaya yang harus dikeluarkan untuk mengambil tindakan sekarang. Di Afrika Selatan, Mediterania, Amazon, Amerika Serikat bagian Barat dan Australia akan semakin terjadi kekeringan dan kebakaran yang akan berdampak pada

---

<sup>130</sup> DLH Kabupaten Buleleng, “Perubahan Iklim (Climate Change),” October 15, 2019, <https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/perubahan-iklim-climate-change-32>

<sup>131</sup> Kelly Levin, David Waskow, and Rhys Gerholdt, “5 Temuan Besar Dari Laporan Iklim IPCC 2021,” August 23, 2021, <https://wri-indonesia.org/id/blog/5-temuan-besar-dari-laporan-iklim-ipcc-2021> .

<sup>132</sup> Levin, Waskow, and Gerholdt.

<sup>133</sup> Levin, Waskow, and Gerholdt.

mata pencaharian, pertanian, sistem air dan ekosistem, perubahan salju, es dan banjir sungai. Dampak tersebut juga akan berdampak pada infrastruktur, transportasi, produksi energy dan pariwisata di Amerika Utara, Kutub Utara, Eropa, Andes serta badai juga akan meningkat di sebagian besar Amerika Utara, Eropa dan Mediterania.<sup>134</sup> Faktor utama pendorong terjadinya perubahan iklim adalah manusia, dimana hal itu terjadi karena kegiatan manusia yang menghasilkan emisi yang menimbulkan emisi di bumi sehingga memicu kenaikan suhu yang terjadi baru – baru ini.

### **Perburuan Gading Gajah**

Banyaknya kasus – kasus tentang lingkungan yang terjadi pada beberapa tahun belakangan ini menjadikan masyarakat perhatian terhadap isu kejahatan lingkungan yang dampaknya dapat merugikan lingkungan hidup.<sup>135</sup> Perdagangan ilegal satwa liar yang tidak terkendali merupakan salah satu jenis dari kejahatan lingkungan dan telah menjadi isu internasional, merupakan kejahatan transnasional dan dapat menjadi bisnis menguntungkan bagi kelompok kriminal terorganisir. Gajah merupakan spesies hewan terbesar yang hidup di darat. Ciri fisik dari gajah adalah memiliki belalai yang panjang dan kaki yang besar. Gajah di dunia diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu gajah Asia dan Afrika. Gajah merupakan salah satu hewan yang dilindungi di dunia namun juga diperdagangkan. Gading gajah menjadi aspek yang diburu kemudian diperjual belikan ke pasar gelap internasional dalam berbagai bentuk produk. Populasi gajah pun terus mengalami penurunan terkhususnya gajah Asia yang sejak awal populasinya jauh di bawah gajah Afrika yang diperkirakan hanya 39, 500 – 43, 500 gajah Asia tersebar di 13 negara.<sup>136</sup> Kasus perdagangan gading gajah terjadi terhadap populasi gajah Afrika dan gajah Asia. UNODC menyatakan bahwa perdagangan tersebut menghasilkan \$75 juta dalam setiap tahunnya, dimana bukan hanya gading gajah yang diperdagangkan namun juga cula badak, serta bagian harimau dari Afrika dan Asia Tenggara ke Asia. Kejahatan ini terus terjadi terus menerus setiap tahunnya padahal sudah dengan jelas perburuan gajah dilarang keras dan telah tertera di dalam Appendix I milik Convention on International Trade in endangered Species of Wild Fauna dan Flora (CITES). Negara besar seperti Amerika Serikat, Prancis, bahkan Tiongkok yang merupakan negara tertinggi

---

<sup>134</sup> Levin, Waskow, and Gerholdt.

<sup>135</sup> Philipe Bangun, "EFEKTIVITAS KERJASAMA WWF INDONESIA – BBSKDA RIAU DALAM MEMERANGI PERDAGANGAN ILEGAL GADING GAJAH SUMATERA DI PROVINSI RIAU 2010-2015," *Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, 4, 3 (2017), <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>.

<sup>136</sup> Bangun.

permintaan gading gajah turut melarang import gading gajah dan perdagangan gading gajah sepenuhnya.

Berbeda halnya dengan negara Thailand, mereka memiliki aturan nasional yang masih mengizinkan proses jual beli gading gajah dan itu tertera dalam Draught Animal Act 1939 yang menyatakan bahwa gajah jinak Thailand beserta gadingnya dapat diperdagangkan.<sup>137</sup> Hal ini membuat Thailand sebagai negara dengan pasar gading terbesar yang tidak diatur (unregulated ivory market) di dunia dan merupakan tempat penampungan perdagangan gading gajah ilegal yang berasal dari Afrika.<sup>138</sup> Itu terjadi dikarenakan para pedagang dan pengukir gading tidak mampu untuk mendapatkan gading legal dari gajah jinak Thailand. Padahal, kegiatan pembunuhan atau penangkapan gajah liar tanpa izin resmi dari pemerintah merupakan tindakan ilegal seperti yang telah di atur dalam Wild Elephant Protection Act 1921 dan Wild Animal Reservation and Protection Act (WARPA) 1992.<sup>139</sup>

Berbeda dengan Thailand, Indonesia telah mengatur Undang – Undang untuk melindungi gajah yang tertera dalam Undang – Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Indonesia mengatur hal ini karena gajah Sumatera merupakan bagian dari gajah Asia. Gajah Sumatera merupakan hewan yang masuk kedalam daftar fauna terancam punah dalam International Union for Conservation of Nature (IUCN). Gajah Sumatera mempunyai peranan dalam melindungi keanekaragaman hayati di ekosistem habitatnya dan kelestarian hutan melalui kotorannya yang terdapat biji tanaman sehingga mereka dijuluki sebagai “spesies payung”. Berbagai ancaman dihadapi gajah di berbagai belahan dunia termasuk gajah di Indonesia sehingga jumlah populasi Sumatera terus berkurang. Ini dapat dilihat dari data tahun 2017 yang mana jumlah populasi gajah Sumatera berkurang setengahnya dari sekitar 2.400 – 2.800 ekor menjadi 1.200 – 1.400 ekor. Saat ini jumlahnya hanya tersisa sekitar 350 ekor gajah Sumatera di Riau, ini berdasarkan hasil survei dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau dan yayasan World Wide Fund for Nature

---

<sup>137</sup> Tjokorda Istri Supraniti Sudharsana, Putu Ratih Kumala Dewi, and A. A. Ayu Intan Prameswari, “Strategi Advokasi WWF dalam Menekan Perdagangan Gading Gajah Ilegal di Thailand Tahun 2013-2016,” *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana*, n.d.

<sup>138</sup> Sudharsana, Dewi, and Prameswari.

<sup>139</sup> Sudharsana, Dewi, and Prameswari.

(WWF) Indonesia.<sup>140</sup> Konflik gajah dan manusia menjadi penyebab utama dari kematian gajah di Provinsi Riau, dimana masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan habitat gajah memberikan racun kepada mereka karena dianggap sebagai hama.<sup>141</sup> Konflik gajah dan manusia ini dipicu karena adanya deforestasi hutan untuk pemukiman, pertanian, perkebunan, pertambangan mengakibatkan terjadinya penyempitan habitat gajah sehingga mereka berkeliaran di pemukiman warga. Itu sebabnya para gajah dianggap sebagai hama oleh masyarakat. Peracunan gading gajah berkaitan erat dengan perdagangan ilegal gading gajah sebab kebanyakan bangkai gajah yang ditemukan selalu tidak memiliki gading.

Kasus penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) terhadap delapan pelaku perburuan gading yang terjadi di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2015 menjadi bukti bahwa perburuan ilegal gading gajah terjadi di Riau. Perburuan tersebut membunuh gajah di kawasan hutan Mandau dan tiga ekor gajah di Taman Nasional Tesso Nilo.<sup>142</sup> Dua gading gajah berukuran dua meter, senjata api laras panjang, enam peluru dan tiga buah benda tajam menjadi bukti dari kasus tersebut. Kedelapan orang pelaku perburuan ilegal gading gajah disimpulkan oleh humas WWF Indonesia program Riau sebagai kelompok professional karena mereka dapat mengambil gading tersebut dengan kondisi utuh.<sup>143</sup> Dapat disimpulkan bahwa pemburu professional telah tersebar diseluruh bagian negara yang memiliki populasi gajah termasuk Riau. Mereka merupakan bagian dari jaringan pasar gelap yang memperdagangkan bagian tubuh satwa liar baik itu dalam keadaan utuh maupun produk seperti obat – obatan, aksesoris, souvenir, furniture dan lain – lain. Kejahatan perdagangan ilegal berdasarkan kasus penangkapan tersebut dapat digolongkan sebagai kejahatan lingkungan transnasional karena memiliki jaringan serta terkoneksi ke berbagai negara – negara di dunia khususnya di Asia Tenggara dalam membantu operasi perdangan dari Indonesia ke luar negeri.<sup>144</sup>

### **Gajah Purba: Mamut**

Gajah yang kita sering lihat hari ini adalah hasil evolusi dari gajah-gajah yang hidup jutaan tahun yang lalu atau yang biasa disebut oleh para Arkeolog sebagai gajah purba. Rentang waktu hadirnya spesies tersebut ada sekitar 2 juta tahun yang lalu hingga 10.000 tahun yang lalu. Akibat

---

<sup>140</sup> Sudharsana, Dewi, and Prameswari, "Strategi Advokasi WWF dalam Menekan Perdagangan Gading Gajah Ilegal di Thailand Tahun 2013-2016."

<sup>141</sup> Bangun.

<sup>142</sup> Bangun.

<sup>143</sup> Bangun.

<sup>144</sup> Bangun.

punahnya mereka masih diperdebatkan oleh peneliti, seperti perubahan iklim dan perburuan yang dilakukan oleh manusia purba. beberapa Spesies yang pernah hidup di dunia diantara lain;<sup>145</sup>

Nama	Ciri-ciri Khas	Tempat persebaran
Amebelodon	Ukuran tubuh sedang, memiliki gading mirip sekop untuk mengoyak batang pohon	Amerika Utara
American Mastodon	Ukuran tubuh besar, memiliki gading mirip Mamut, namun jauh lebih melengkung	Amerika Utara dan Mexico
Anancus	Pendek dan memiliki gading yang lurus	Eropa dan Asia
Barytherium	Mirip dengan Tapir, namun jauh lebih berat (panjang 10 meter dan berat 2 ton)	Afrika
Deinotherium	Ukuran tubuh sedang, memiliki gading di dagu yang mengarah kebawah	Afrika dan Asia
Gajah Kerdil	Ukuran tubuh sekitar satu-pertiga gajah Sumatra	Pulau-pulau kecil di Italia dan Yunani
Stegomastodon	Ukuran tubuh sedang, memiliki gading yang lurus kedepan	Amerika Utara dan Selatan
Stregostrabelodon	Ukuran tubuh besar, memiliki 2 pasang gading di posisi normal dan di bawah bibir	Asia
Mamut	Ukuran besar, berbulu, dan memiliki gading yang melengkung	Asia dan Eropa (Siberia dan Yakutia), Alaska

<sup>145</sup> Thought Co, "Prehistoric Elephants, Picture and Profiles," *Thoughtco*, accessed December 9, 2021, <https://www.thoughtco.com/prehistoric-elephant-pictures-and-profiles-4043331>.

Gajah purba yang kita akan bahas adalah Mamut. Mamut tercatat muncul pertama kali di wilayah Eurasia pada 2.6 juta tahun yang lalu. Spesies ada di Eurasia terbagi menjadi 3, namun masih didalam satu genus yang sama yaitu *Mammuthus*. Spesies Mamut pertama adalah *Mammuthus Meridionalis* yang mendiami seluruh wilayah Eropa pada 2.6 juta tahun yang lalu, *Mammuthus Trogontherii* pada 700.000 tahun yang lalu, juga di wilayah Eropa, dan *Mammuthus Primigenius* yang mendiami wilayah Eropa barat, Tengah, Timur, dan Asia Utara. Perubahan yang terjadi pada tiap spesies tidak terlalu menonjol. Populasi terbesar mamut di wilayah Eropa Barat ada di negara Inggris, Italia, dan Romania. Ketiga negara tersebut merupakan rumah dari *Mammuthus Meridionalis* yang tinggal sekitar 2 Juta tahun yang lalu.<sup>146</sup>

Mamut mengalami proses evolusi untuk beradaptasi dengan lingkungan yang tidak bersahabat. Tumbuhnya bulu lebat yang menyelimuti mamut adalah salah satu evolusi untuk menjaga mamut tetap hangat di musim dingin. Evolusi lain yang dialami oleh mamut adalah perbesaran rahang dan penambahan alur gigi geraham untuk mengunyah dedaunan kasar dan rerumputan di wilayah Tundra, tanah datar yang sangat luas yang terletak di wilayah Amerika dan Eurasia dengan iklim subtropis.<sup>147</sup>

Di wilayah Siberia dan Yakutia, spesies mamut yang mendominasi adalah mamut berbulu (*Mammuthus Primigenius*) dengan bulu yang lebih tebal dan 9 alur gigi geraham, sedikit lebih panjang dari *Meridionalis* yang memiliki 7 alur gigi geraham. Mamut berbulu yang hidup di wilayah Eropa barat dan tengah mengalami kepunahan lebih awal, sekitar 12.000 tahun yang lalu akibat perubahan iklim masa pleistosen atau yang kita lebih kenal dengan akhir zaman es. Mamut yang tinggal di wilayah Eropa Timur dan Asia Utara bertahan jauh lebih lama. Mereka mampu bertahan selama 2000 tahun hingga kepunahan total mamut sekitar 10.000 tahun yang lalu. Alasan mengapa mamut di wilayah ini bisa bertahan jauh lebih lama adalah suhu yang lebih dingin dibandingkan wilayah-wilayah Eropa lainnya. Dengan suhu minus 40 derajat celcius, predator utama yang memburu mamut, yaitu manusia tidak mampu bertahan di suhu tersebut dalam jangka panjang.<sup>148</sup>

---

<sup>146</sup> Adrian M. Lister dan Andrei V. Sher, "The Origin and Evolution of the Woolly Mamut (USA: American Association for the Advancement of Science, 2001)," n.d., 2–3.

<sup>147</sup> Adrian M. Lister, "The Pattern and Process of Mamut Evolution in Eurasia (UK : Quaternary International, 2005)," n.d., 2–4.

<sup>148</sup> Anthony J. Stuart, "The Extinction of Woolly Mamut (*Mammuthus Primigenius*) and Straight-Tusked Elephant (*Palaeoloxodon Antiquus*) in Europe, (UK : Quaternary International, 2005)," n.d., 1–2.

Mamut yang diawetkan masih lengkap dengan jaringan daging dan darah yang segar diawetkan selama 30.000 tahun memiliki banyak komponen yang sama dengan gajah dengan perbedaan seperti tumpukan lemak dan bulu tebal berwarna kecoklatan hingga kemerah-merahan yang ada di sekujur tubuhnya untuk menghangatkan dirinya di iklim dingin. Telinga yang kecil mirip dengan Gajah Asia dan Gading yang Panjang. Gading inilah yang menjadi salah satu keunikan Mamut yang sama dengan Gajah pada masa kini.<sup>149</sup>

### **Melelehnya Permafrost dan Perburuan Gading Mamut**

Pada masa mamut masih berjalan di Eurasia, tidak banyak predator yang bisa menerkam dan menjatuhkan seekor mamut. Dengan tinggi 3meter lebih, predator seperti singa Eurasia dan serigala purba akan kesulitan dalam berburu hewan yang tinggi, berbulu dan kuat. Satu-satunya mahluk yang berhasil menjatuhkan mamut adalah manusia. Dengan berkah akal-pikiran yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, manusia berburu mamut dengan tombak dan berburu bersama untuk meningkatkan keberhasilan perburuan. Penelitian yang dilakukan oleh organisasi Max Planc menyebutkan bahwa mamut bisa bertahan hidup hingga saat ini apabila manusia tidak melakukan perburuan.

Populasi mamut terlama yang bertahan hidup adalah mamut yang tinggal di wilayah Siberia, tepatnya di pulau Wrangel. Kepunahan masal yang terjadi di Siberia daratan tidak mempengaruhi populasi mamut yang tinggal di pulau Wrangel karena tidak tersentuh oleh manusia pada masa itu. Koloni mamut yang tersisa menemukan masalah baru, yaitu populasi mereka yang sedikit dan adanya bukti kawin sedarah antar mamut yang menciptakan kondisi kesehatan kronis dan kekurangan sperma bagi mamut jantan, bahkan kemandulan yang menyebabkan kepunahan mereka sekitar 4000-3700 tahun yang lalu.<sup>150</sup> Mamut yang mati di tanah pleistosen terkubur oleh salju atau lumpur yang menumpuk hingga menciptakan sebuah endapan khusus yang tertutup selama ribuan tahun yang dijuluki Permafrost atau kulkas abadi. Tidak hanya mamut yang terkubur didalam kulkas ini, namun ribuan tulang belulang hewan-hewan yang pernah hidup di zaman

---

<sup>149</sup> Sean Michael Ragan, "How to Tell Mammoth Ivory from Elephant Ivory," accessed December 18, 2021, <https://makezine.com/2012/03/29/how-to-tell-mammoth-ivory-from-elephant-ivory/>.

<sup>150</sup> Laura Geggel, "The Last Woolly Mammoth Has Disastrous Dna, Live Science," accessed December 19, 2021, <https://www.livescience.com/woolly-mammoth-genetic-problems.html>.

tersebut, herbifora, karnifora, dan omnifora, semua ‘tertidur’ untuk selamanya. Wilayah Sakha, Yakutia adalah salah satu lokasi ditemukannya tulang belulang dan gading dalam jumlah banyak.<sup>151</sup>

Perubahan Iklim yang makin menjadi menyebabkan melelehnya Permafrost di wilayah Siberia dan Yakutia. Dari peristiwa ini, banyak fosil-fosil purba yang muncul ke permukaan seperti tulang-belulang dan hewan yang terawetkan dalam Permafrost. Dampak negatif dari melelehnya permafrost adalah terlepasnya gas Karbon Dioksida (CO<sub>2</sub>) yang terperangkap di bangkai hewan dan sisa-sisa tanaman purba. Hal ini bisa meningkatkan suhu bumi dan mempercepat pencairan kutub utara dan selatan.<sup>152</sup>

Para pemburu gading di Siberia menggunakan aliran sungai Kolyma sebagai satu-satunya jalur transportasi antara wilayah berpenduduk dan tambang gading. Dengan menggunakan selang air, mereka menyemburkan air bertekanan tinggi yang mengikis tanah Permafrost, menciptakan gua-gua kecil untuk mencari harta karun mereka. Para pemburu ini kebanyakan adalah warga lokal yang berpindah pekerjaan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sebuah gading mamut berharga sekitar 500 US Dollar atau sekitar 7 juta rupiah. Pendapatan yang mereka bisa raup dalam satu kali berburu adalah 33.000 US Dollars atau sekitar 475 juta Rupiah.<sup>153</sup>

Pasar terbesar dari kegiatan jual-beli gading mamut adalah Tiongkok. Banyak kerajinan yang bisa diciptakan dari gading mamut sebagai pengganti gading gajah Afrika. Tiongkok menjadi pasar terbesar di dunia dengan permintaan hingga populasi Gajah Afrika menurun menjadi 412 ribu ekor.<sup>154</sup> Pada tahun 2017, Tiongkok telah menerapkan peraturan mengenai pelarangan penjualan gading. Orang-orang asal Tiongkok akan ditangkap dan ditindaklanjuti oleh aparat negara yang bersangkutan apabila terbukti masih menjual gading gajah.<sup>155</sup> Data tahun 2018 yang dimiliki oleh Traffic briefing menunjukkan pasar legal gading gajah telah berkurang dari 76 toko

---

<sup>151</sup> Matthew Luxmoore, “As Siberia’s Permafrost Thaws, Scientists Marvel At The Mammoth Treasures Beneath, Radio Free Europe,” accessed December 18, 2021, <https://www.rferl.org/a/siberia-permafrost-thaw-mammoth/31342051.html>.

<sup>152</sup> Jordan Wilkerson, “How Much Worse Thawing Permafrost Will Affect Climate Change?, Scientific American,” accessed December 23, 2021, <https://www.scientificamerican.com/article/how-much-worse-will-thawing-arctic-permafrost-make-climate-change/>.

<sup>153</sup> Helen Pilcher, “Who Are the Hunters of Rare Mammoth Tusks in Russia?, ScienceFocus,” accessed December 19, 2021, <https://www.sciencefocus.com/nature/meet-the-mammoth-hunters-collecting-rare-tusks-in-russia/>.

<sup>154</sup> Save the Elephants, “Statistics of Elephant Hunting in Africa by Save the Elephants,” accessed December 19, 2021, <https://www.savetheelephants.org/about-elephants-2-3-2/statistics/>.

<sup>155</sup> Kevin T. Bielicki, “China’s Ivory Ban a Work in Progress,” accessed December 19, 2021, <https://thediplomat.com/2019/03/chinas-ivory-ban-a-work-in-progress/>.



di seluruh Tiongkok menjadi 54 toko sejak penerapan hukum yang berlaku. 54 toko lainnya masih dibuka, namun telah menurunkan plakat penjual gading legal.<sup>156</sup>

## Penutup

Perubahan iklim membawa dampak negatif karena akan membinasakan seluruh makhluk hidup di dunia. Meskipun begitu ternyata terdapat manfaat di bidang ekonomi. Seperti yang penulis bahas di tulisan ini, perubahan iklim yang melelehkan permafrost di Siberia dan Yakutia serta kepunahan mamut 10.000 tahun yang lalu memberi keuntungan karena meninggalkan fosil gading yang berharga. Selain itu peminatnya juga banyak sehingga fosil Mamut bernilai tinggi.

## Daftar Pustakafadrian

Bangun, Philipe. “EFEKTIVITAS KERJASAMA WWF INDONESIA – BBSKDA RIAU DALAM MEMERANGI PERDAGANGAN ILEGAL GADING GAJAH SUMATERA DI PROVINSI RIAU 2010-2015.” *Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, 4, 3 (2017).

DLH Kabupaten Buleleng, “Perubahan Iklim (Climate Change),” October 15, 2019. <https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/perubahan-iklim-climate-change-32>.

Geggel, Laura. “The Last Woolly Mammoth Has Disastrous Dna, Live Science.” Accessed December 19, 2021. <https://www.livescience.com/woolly-mammoth-genetic-problems.html>.

Herring, David, dan Rebecca Lindsey. ““Can We Slow or Even Reverse Global Warming?”” *Climate.Gov*, September 7, 2021. <https://www.climate.gov/news-features/climate-qa/can-we-slow-or-even-reverse-global-warming>.

KCPI-IC Ican, “Upaya Ditingkat Internasional : Kesepakatan Dunia Dalam Menangani Perubahan Iklim.” *Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan*, 2017. <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/aksi/mitigasi/implementasi/10-tentang/21-upaya-ditingkat-internasional>.

Levin, Kelly, David Waskow, dan Rhys Gerholdt. “5 Temuan Besar Dari Laporan Iklim IPCC 2021,” August 23, 2021. <https://wri-indonesia.org/id/blog/5-temuan-besar-dari-laporan-iklim-ipcc-2021>.

---

<sup>156</sup> Yu Xiao, “China’s Ivory Market after the Ivory Ban in 2018” *TRAFFIC Briefing*, 2018, <https://www.traffic.org/site/assets/files/11150/chinas-ivory-market-post-ban.pdf>.

- Lister, Adrian M dan Andrei V. Sher. *The Origin and Evolution of the Woolly Mammoth* (USA: American Association for the Advancement of Science, 2001)
- Lister, Adrian M. *The Pattern and Process of Mammoth Evolution in Eurasia* (UK : Quaternary International, 2005)
- Luxmoore, Matthew “As Siberia’s Permafrost Thaws, Scientists Marvel At The Mammoth Treasures Beneath, Radio Free Europe.” Accessed December 18, 2021. <https://www.rferl.org/a/siberia-permafrost-thaw-mammoth/31342051.html>.
- Pilcher, Helen. “Who Are the Hunters of Rare Mammoth Tusks in Russia?, ScienceFocus.” Accessed December 19, 2021. <https://www.sciencefocus.com/nature/meet-the-mammoth-hunters-collecting-rare-tusks-in-russia/>.
- Ragan, Sean Michael. “Mammoth Ivory from Elephant Ivory.” Accessed December 18, 2021. <https://makezine.com/2012/03/29/how-to-tell-mammoth-ivory-from-elephant-ivory/>.
- Save the Elephants, “Statistics of Elephant Hunting in Africa by Save the Elephants.” Accessed December 19, 2021. <https://www.savetheelephants.org/about-elephants-2-3-2/statistics/>.
- Stuart, Anthony J. *The Extinction of Woolly Mammoth (Mammuthus Primigenius) and Straight-Tusked Elephant (Palaeoloxodon Antiquus) in Europe*. (UK: Quaternary International, 2005).
- Sudharsana, Tjokorda Istri Supraniti, Putu Ratih Kumala Dewi, and A. A. Ayu Intan Prameswari. “Strategi Advokasi WWF dalam Menekan Perdagangan Gading Gajah Ilegal di Thailand Tahun 2013-2016.” *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana*, n.d.
- Thought Co, “Prehistoric Elephants, Picture and Profiles.” *Thoughtco*. Accessed December 9, 2021. <https://www.thoughtco.com/prehistoric-elephant-pictures-and-profiles-4043331>.
- Wilkerson, Jordan “How Much Worse Thawing Permafrost Will Affect Climate Change?, Scientific American.” Accessed December 23, 2021. <https://www.scientificamerican.com/article/how-much-worse-will-thawing-arctic-permafrost-make-climate-change/>.
- Xiao, Yu. “China’s Ivory Market after the Ivory Ban in 2018.” TRAFFIC Briefing, 2018. <https://www.traffic.org/site/assets/files/11150/chinas-ivory-market-post-ban.pdf>.
- Xiao, Yu. “China’s Ivory Ban a Work in Progress.” Accessed December 19, 2021. <https://thediplomat.com/2019/03/chinas-ivory-ban-a-work-in-progress/>.



Peace, Conflict, Development  
**Studies Center**

Pekanbaru, Riau.

(+62) 812-6027-7425

[pcdstudiescenter@gmail.com](mailto:pcdstudiescenter@gmail.com)  
[www.pcdstudiescenter.com](http://www.pcdstudiescenter.com)

---